



# NASKAH KAJIAN KONSEP DAN BENTUK STANDAR PENDIDIKAN MASA DEPAN

**PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
TAHUN 2021**

**NASKAH KAJIAN KONSEP DAN BENTUK  
STANDAR PENDIDIKAN MASA DEPAN**



**PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN  
PENDIDIKAN**

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan Izin-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Kajian Konsep dan Bentuk Standar Nasional Pendidikan Masa Depan. Kajian ini dilakukan sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Urgensi dari kajian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan implementasi Standar Nasional Pendidikan secara nasional pada saat ini melalui Diskusi Kelompok Terpumpun.

Kajian Konsep dan Bentuk Standar Nasional Pendidikan Masa Depan memiliki keunikan, yaitu data diperoleh secara kualitatif melalui Diskusi Kelompok Terpumpun sebanyak 2 tahap. Integrasi data antara hasil diskusi dan analisis menggunakan *software Nvivo* menjadi penguat rumusan rekomendasi untuk pengembangan Standar Nasional Masa Depan.

Naskah ini dibuat untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program agar dapat dimanfaatkan bagi perbaikan pelaksanaan program pada masa mendatang. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan naskah ini.

**Jakarta, Desember 2021**

**Tim Penulis**

## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggung Jawab Kegiatan**

1. Prof. Dr. Ali Saukah, M.A.
2. Prof. Bambang Setiaji

### **Tim Ahli Substansi**

Ketua:

Drs. Widiyanto Satyo Nugroho, M.Math., Ph.D.

Sekretaris

Dr. Widowati Pusporini, M.Pd.

Anggota

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, ST., MT.
2. Dr. Rumtini
3. Dr. M. Alfian Alfian M, M.Si.
4. Hari Prasetyo, Ph.D
5. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D
6. Diah Wihardini, B.Sc.(Hons)., M.Ed., Ph.D
7. Dr. Daglan M. Walangitan, M.Pd.
8. Dr. Nancy Novitra Souisa, M.Si.
9. Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
10. Dr. Arbaiyah Yusuf, M.A.

Tim Ahli Teknis

11. Dr. Ana Fitrotun Nisa, M.Pd.I
12. Ajeng Euis Permata Sari, S.Kom.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
TIM PENYUSUN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PENTINGNYA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN .....	8
A. Pengertian Standar .....	8
B. Pengertian Standar dalam Pendidikan.....	10
C. Alasan-alasan Diperlukannya Standar Nasional Pendidikan .....	12
D. Landasan Standar Nasional Pendidikan .....	16
1. Landasan Konstitusional, Ideologis dan Filosofis (UUD NRI Tahun 1945) .....	16
2. Landasan Yuridis .....	19
3. Landasan Sosiologis-Kultural .....	20
4. Landasan Akademis .....	24
5. Landasan Politis .....	26
E. Penerapan Pendidikan Berbasis Standar di Beberapa Negara .....	28
F. Tren Standar Pendidikan Abad Ke-21 .....	35
BAB III TANTANGAN PENDIDIKAN DI MASA DEPAN.....	41
B. Faktor Pendorong Disrupsi Pendidikan .....	43
C. Tantangan Pendidikan Nasional Masa Depan.....	49
1. Tantangan ke-Indonesiaan dalam sistem pendidikan nasional.....	50
2. Tantangan eksternal sistem pendidikan nasional di masa depan.....	55
D. Isu-Isu Global.....	60
E. Penutup.....	65
BAB IV PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) .....	66
A. Metode Perumusan Problematika .....	66

B. Lapisan dan Kelompok yang Terlibat dalam Implementasi SNP .....	67
C. Tata Kelola dalam Implementasi SNP .....	70
D. Problem lain terkait Implementasi SNP .....	73
E. Bagan Arus ( <i>Flow Chart</i> ) Implementasi SNP .....	83
F. Tantangan Implementasi Standar Pendidikan .....	85
G. Implementasi Kebijakan yang Berhasil .....	87
H. Tantangan Implementasi SNP di Indonesia .....	89
<b>BAB V KONSEP DAN BENTUK STANDAR NASIONAL MASA DEPAN ...</b>	<b>94</b>
A. Pendidikan yang Berorientasi Masa Depan .....	94
B. Konsep Standar Nasional Pendidikan Masa Depan .....	97
1. Demand/Tuntutan .....	98
2. Kompetensi .....	110
3. Karakter .....	112
4. Pemberlakuan Standar Pendidikan .....	119
5. Pengelolaan Standar .....	120
C. BENTUK STANDAR NASIONAL MASA DEPAN .....	121
1. Prinsip Standar Nasional Masa depan .....	121
2. Isi Standar Nasional Pendidikan Masa Depan .....	122
3. Kriteria Standar Nasional Pendidikan Masa Depan .....	123
4. Format Standar Masa Depan .....	124
<b>BAB VI REKOMENDASI .....</b>	<b>131</b>
A. Keberadaan Standar Pendidikan .....	131
B. Arti Pentingnya Standar Nasional Pendidikan .....	132
C. Permasalahan SNP .....	133
D. Pengembangan Standar .....	134
E. SNP Masa Depan .....	135
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>145</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pokok Bahasan Naskah Kajian Standar Pendidikan Masa Depan .....	5
Gambar 2. Kerangka Kemampuan Abad ke-21 (Kids, 2019).....	37
Gambar 3. Proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok usia..	54
Gambar 4. Tata Kelola Sistem Pendidikan .....	84
Gambar 5. Bagan struktur Konsep Standar Pendidikan Masa Depan .....	98
Gambar 6. Bagan hasil analisis menggunakan Nvivo.....	132



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Lebih lanjut, UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” (Pasal 28C Ayat 1).

Selain itu, UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa, “Setiap orang bebas ... memilih pendidikan dan pengajaran ...” (Pasal 28 E). Dan secara khusus diatur ketentuan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU; Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; Ayat 5: (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai



agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi hasil amandemen yang dilakukan di Era Reformasi tersebut (UUD NRI 1945) jelas membuktikan adanya komitmen yang tinggi atas pemajuan dunia pendidikan di tanah air. Dalam menjalankan amanat konstitusi di bidang pendidikan tersebut, selama kurun tiga dekade terakhir, sistem pendidikan Indonesia telah ditata melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menggantikan perundang-undangan sebelumnya. Dalam UU Sisdiknas tersebut, pendidikan nasional dimaknai sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan, dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran sebagaimana diamanahkan dalam UUD NRI 1945 (Pasal 31, Ayat 1). Pengaturan lebih lanjut dalam sistem pendidikan nasional mengamanahkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Untuk dapat menyediakan pendidikan yang bermutu pada seluruh jenjang pendidikan, dalam sistem pendidikan Indonesia diperlukan rujukan mutu sehingga berbagai pihak yang berperan

serta dalam penyelenggaraan pendidikan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dapat memberikan layanan pendidikan bermutu yang diamanahkan dalam sistem pendidikan Indonesia. UU Sisdiknas mengamanahkan adanya Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu penyelenggaraan pendidikan, dan khusus untuk jenjang pendidikan tinggi, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanahkan adanya Standar Pendidikan Tinggi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.

Kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita dewasa ini, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pendidikan nasional, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Dalam kerangka implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), aspek pendidikan menjadi penting untuk dapat secara berkelanjutan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang bermutu, dari jenjang pendidikan paling awal, pendidikan dasar, menengah sampai jenjang pendidikan tinggi perlu untuk selalu dikelola dengan baik, sehingga membutuhkan acuan mutu pendidikan yang merefleksikan penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakat yang mampu dan cakap menghadapi tantangan perkembangan kehidupan abad ke-21 dan di masa yang akan datang.

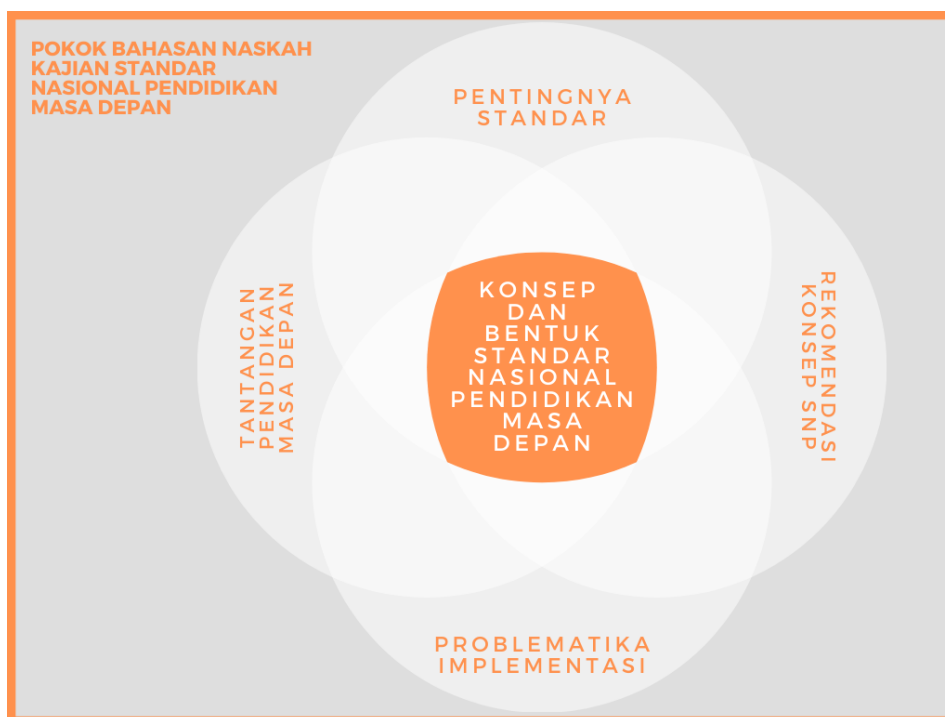
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang standar nasional pendidikan yakni PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (sebagai versi aturan yang terakhir, merevisi aturan sebelumnya), pada bagian menimbang menyatakan bahwa “pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk

kepentingan peningkatan mutu pendidikan”, sehingga standar pendidikan kita di masa depan memang perlu dirancang dan dikembangkan dari pengalaman yang diperoleh dari berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang sudah dijalankan dalam kurun tiga dekade terakhir.”

Dalam menyikapi kebutuhan standar pendidikan di masa depan, maka dilakukanlah kegiatan kajian terkait dengan konsep dan bentuk standar nasional pendidikan di masa depan. Kajian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan pemikiran terhadap upaya menyiapkan sistem pendidikan Indonesia yang bermutu dan mampu mengikuti tantangan perkembangan global, sehingga sistem pendidikan Indonesia tetap dapat menciptakan masyarakat yang mampu dan cakap untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

Kajian ini akan difokuskan secara khusus pada pemikiran tentang konsep dan bentuk standar nasional pendidikan (SNP) masa depan, setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi SNP yang berlaku, mengkaji literatur yang terkait penyelenggaraan pendidikan (di Indonesia dan di sejumlah negara lain), serta melalui serangkaian diskusi kelompok terpumpun yang melibatkan berbagai pihak (pakar dan praktisi pendidikan) terkait penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Naskah ini terdiri dari 7 Bab, yang mewakili keseluruhan alur pemikiran untuk memunculkan rekomendasi gambaran Standar Pendidikan Masa Depan. Pembahasan mengenai berbagai pokok pemikiran naskah ini merupakan intisari yang dikemukakan melalui Diskusi 16 orang Tim Ahli dan Diskusi Kelompok Terpumpun sebanyak 2 tahap dengan melibatkan 26 orang responden pakar (*expertise*).



**Gambar 1.**

Pokok Bahasan Naskah Kajian Standar Pendidikan Masa Depan

Beberapa alasan yang mengemuka, mengapa standar nasional diperlukan adalah: 1) alasan-alasan yang bersifat filosofis, dikaitkan dengan tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa; 2) alasan-alasan yang bersifat praktis, dalam rangka menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang (alasan efektivitas politik pendidikan).

Tantangan Pendidikan Indonesia di masa depan, muncul dari faktor Internal dan Eksternal. Tantangan internal sistem pendidikan nasional ke depan antara lain: Potensi tergerusnya jati diri bangsa Indonesia di era global, penguatan wawasan kebhinekaan bangsa Indonesia, pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, penyiapan kompetensi sumber daya manusia usia muda menyabut bonus demografi

Indonesia. Isu-isu global yang menjadi tantangan eksternal sistem pendidikan nasional ke depan antara lain kebutuhan kompetensi baru dalam era global, perubahan kultur sosial masyarakat, perubahan kultur individu, lingkungan, pola pendidikan dan perubahan bentuk dunia kerja.

Beberapa hal yang menjadi problematika dalam implementasi SNP pada saat ini, antara lain: Permasalahan pertama adalah persepsi dan pandangan pemangku kepentingan terhadap naskah SNP sendiri. Kedua, banyak pihak yang terlibat dalam implementasi SNP. Kategorisasi yang menggambarkan lapisan tata kelola dan para pihak yang terlibat dalam implementasi SNP. Ketiga, SNP sebaiknya fokus, tajam, mendasar dan sederhana sehingga mudah digunakan oleh satuan pendidikan atau Perguruan Tinggi. Bahasa SNP dirasa sulit dipahami dan memiliki indikator kerja terlalu banyak.

Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Indonesia: 1) kondisi geografis yang paling utama adalah terkait dengan aksesibilitas dari pendidikan itu sendiri, 2) keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, 3) politik, peristiwa pemilu atau pilkada masih menjadikan masalah pendidikan sebagai sarana kampanye yang cukup seksi, 4) Budaya, Indonesia sebagai negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar sangat bervariasi juga dalam kehidupan budayanya, 5) Agama, 6) Daerah rentan bencana (sosial dan alam).

Konsep Standar Nasional Masa Depan, muncul dari beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, antara lain sebagai berikut: 1) Tuntutan (masyarakat berbudaya, masyarakat berkecakapan, tuntutan dunia kerja, tuntutan spiritualitas, dan pemenuhan hak siswa), 2) Kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, 3) Karakter

(religiosity dan integrity, mandiri, berkebangsaan, agility, dan resilience), 4) Bagaimana standar pendidikan diimplementasikan, dan 5) Pembagian otoritas pengelolaan standar. Bentuk Standar Pendidikan membahas mengenai prinsip-prinsip, isi, kriteria, dan format yang harus ditetapkan dalam sebuah standar pendidikan.

Terakhir, terdapat beberapa rekomendasi yang dikemukakan dalam naskah ini untuk memberikan gambaran bagi pemangku kebijakan untuk memberikan pertimbangan pada saat mengembangkan sebuah standar pendidikan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **PENTINGNYA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

Standar dalam pendidikan memiliki arti penting dalam mewujudkan proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Hal ini mengemuka dalam diskusi terpusat (*Focus Group Discussion/FGD*) dalam rangka membahas tema kajian “Konsep dan Bentuk Standar Nasional Pendidikan” yang dilakukan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang melibatkan Tim Ahli dan responden pakar, sebagaimana dilaporkan dalam naskah ini. Tidak ada yang menyangkal pentingnya penerapan standar nasional dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana penerapan standar di bidang-bidang strategis lainnya. Disadari bahwa pendidikan merupakan kata kunci penting untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Dalam kerangka itulah, ruang lingkup Bab tentang pentingnya standar nasional pendidikan ini meliputi: (a) pengertian standar; (b) pengertian standar nasional pendidikan; (c) alasan-alasan diperlukannya standar nasional pendidikan; (d) landasan standar nasional pendidikan; (e) penerapan pendidikan berbasis standar di beberapa negara; dan (e) tren standar pendidikan abad ke-21.

#### **A. Pengertian Standar**

Terkait standar nasional pendidikan, mengemuka pertanyaan apakah yang dimaksud standar dalam pendidikan? Jawaban atas pertanyaan ini, tidak dapat dilepaskan dari pengertian standar secara umum sebagai ukuran, spesifikasi, acuan, pedoman,



kebakuan, atau aturan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) misalnya, mengartikan kata “standar” antara lain sebagai “ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan”(Kbbi, 2016). Pengertian tersebut selaras dengan arti kata *standard* dalam kamus-kamus internasional (Webster, 2014).

Dalam konteks pengertiannya dalam bahasa Indonesia, merujuk KBBI (Kbbi, 2016), standar juga dikaitkan dengan pengertian “alat penopang yang berkaki (untuk menaruh bendera, menyangga sepeda, menopang alat potret, dan sebagainya). Dengan demikian, standar juga bermakna penyangga atau penopang. Merujuk maknanya yang berbeda-beda, kendatipun terdapat pemahaman umum yang sama, kata standar bersifat kontekstual. Dalam konteks apa kita bicara tentang standar, akan sangat menentukan kesesuaian maknanya (apakah sebagai ukuran, acuan, pedoman, aturan, atau yang lain).

Mengingat kompleksitas makna standar dalam bahasa Indonesia, karenanya, dibutuhkan definisi formal dalam perundang-undangan atau peraturan terkait dengan bidang yang dibahas, terutama dalam konteks ini pendidikan. Dalam konteks ini dapat dipahami manakala UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional misalnya, memberi pengertian apa itu standar nasional pendidikan. Masalahnya adalah apakah pengertian yang dilekatkan, masih relevan dengan konteks perkembangan dan dinamika dunia pendidikan kita di perjalanan abad ke-21 yang semakin ditandai oleh teknologi digital? Diperlukan tinjauan dan analisis kritis mengenai hal ini.



## **B. Pengertian Standar dalam Pendidikan**

Selanjutnya, bagaimana dengan pengertian standar dalam pendidikan? Dalam literatur yang berkembang selama ini, standar dalam pendidikan mengemuka ke dalam konsep “pendidikan berbasis standar” (Indonesia, 2003). Dalam berbagai literatur, “pendidikan berbasis standar” diungkapkan dalam berbagai istilah, di antaranya: *standard-based education*, *competence-based education*, *proficiency-based education*, *standard-based system*, *mastery-based education*, *outcome-based education*, dan *performance-based education*. Konsep *outcome-based education* (OBE) misalnya dikembangkan dari filsafat pendidikan Bloom et al. (1984) yang menekankan pentingnya domain kognitif (pengetahuan), afektif (sikap/perasaan), dan psikomotorik (tindakan). OBE menekankan, setiap bagian dari sistem pendidikan harus mengarah ke tujuan (*outcomes*). Akhir pengalaman pendidikan (*educational experience*) setiap siswa ialah, mereka harus telah mencapai tujuan. Dalam konteks ini, tidak ada satu gaya pengajaran, pembelajaran, ataupun penilaian yang ditentukan dalam OBE, tetapi sebaliknya, kelas (*classes*) atau kurikulum, kesempatan belajar (*opportunity*), dan penilaian (*assessment*), semuanya harus membantu siswa mencapai hasil yang ditentukan (Spady, 1994).

Secara filosofis, menurut Musthafa et al. (2018), standar dapat dikaji dari sudut pandang ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, standar perlu ditetapkan secara jelas dan terukur mengenai apa yang perlu menjadi esensi atau substansi yang harus distandarkan. Secara epistemologi, dikaji bagaimana seharusnya standar itu dilihat, dianalisis, dirumuskan, dan dikembangkan menjadi standar. Dan secara aksiologi, standar perlu dikaji,

dipetakan, dan dipilih esensi atau nilai (*value*) secara humanis, sosiologis, dan politis.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1, Butir 17). Standar pendidikan dalam hal ini dikaitkan dengan “kriteria minimal tentang sistem pendidikan”. Tidak ada penjelasan yang rinci mengenai hal ini apa yang dimaksud “kriteria minimal” baik dalam Penjelasan UU maupun peraturan-peraturan di bawahnya. Sehingga wajar, manakala mengemuka pertanyaan: mengapa minimal, bukan maksimal, serta pertanyaan-pertanyaan lain seperti sampai kapan penyelenggara pendidikan dikatakan harus telah memenuhi “kriteria minimal” tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan adanya ganjalan, kalau bukan dapat memicu kesalahpahaman, atas pengertian standar nasional pendidikan dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan formal pendidikan di Indonesia. Pada kenyataannya, respons para pemangku kepentingan terhadap konsep tentang urgensi standar nasional dan pendidikan berbasis standar, sangat positif. Namun demikian, konsep atau gagasannya belum dapat dipahami secara utuh dan merata oleh masyarakat, termasuk para aktor yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga, hal ini perlu secara khusus memperoleh perhatian oleh Tim Kajian “Konsep dan Bentuk Standar Nasional Pendidikan”.

### **C. Alasan-alasan Diperlukannya Standar Nasional Pendidikan**

Beberapa alasan yang mengemuka, mengapa standar nasional diperlukan adalah: 1) alasan yang bersifat filosofis, dikaitkan dengan tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka memperkuat persatuan bangsa; 2) alasan-alasan yang bersifat praktis, dalam rangka menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang (alasan efektivitas politik pendidikan): (a) alasan perlunya penyesuaian atau respons atas perkembangan pendidikan dalam lingkup global; (b) alasan perlunya pengelolaan penyelenggaraan atau manajemen pendidikan yang efektif; (c) alasan keharusan jaminan keberlangsungan (kontinuitas) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas; 3) alasan ekonomis sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara dan pengelola pendidikan, yang dalam hal ini adalah negara dan institusi pendidikan, kepada para pemangku kepentingan, yakni peserta didik, orang tua, dan masyarakat pada umumnya.

Alasan filosofis terkait dengan konteks hubungan antara tujuan pendidikan dengan bagaimana cara mencapai dan mengevaluasi ketercapaian tujuan tersebut. Standar dibutuhkan untuk memberikan acuan atau arahan tentang cara mencapai tujuan sehingga segala upaya untuk menilai cara-cara tersebut dan memberikan umpan balik atas ketercapaian itu mengacu kepada standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Di level tertinggi, standar biasa ditetapkan oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah, dan diberlakukan secara nasional. Ketika suatu standar ditentukan dan diberlakukan secara nasional, pemerintah telah menetapkan suatu tujuan pendidikan yang bersifat nasional pula. Adapun hakikat pendidikan nasional Indonesia menurut konstitusi adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam

konteks ini, tujuan pendidikan untuk mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia di berbagai level masyarakat berlaku secara nasional sehingga bisa juga dimaknai sebagai alat atau sarana pemersatu bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, sekaligus mengakomodasi prinsip kebhinekaan. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki esensi *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahwa keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya merupakan realitas objektif yang memperkaya khasanah bangsa. Standar nasional pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga akhlak mulia, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang religius (ber-Ketuhanan Yang Maha Esa) dan berjiwa Pancasila.

Alasan filosofis juga berkaitan dengan tanggung jawab dan peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam rangka mencerdaskan kehidupannya, negara memiliki kewenangan dalam politik pendidikan yang terkait dengan pembuatan kebijakan dalam bidang pendidikan, penentuan kelembagaan pemerintah tingkat pusat dan daerah yang berwenang dalam regulasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan (termasuk penentuan standar nasional pendidikan), pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam konstitusi, dan aspek-aspek politik pendidikan lainnya. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa secara filosofis, negara merupakan penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan nasional.

Terkait dengan alasan praktis yang pertama, standar diperlukan untuk kepentingan pengakuan dan kesetaraan, dan untuk merespons dinamika dan perkembangan global. Arus warganegara Indonesia ke mancanegara dan sebaliknya, baik dalam rangka menjalani proses pendidikan, keperluan pekerjaan, ataupun

lainnya hanya mungkin terjadi apabila terdapat pengakuan kesetaraan atas kompetensi warganegara Indonesia di kancah global. Pengakuan dunia atas kesetaraan hasil sistem pendidikan nasional secara berkala dinilai dan dipantau oleh berbagai lembaga internasional, seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) melalui *Programme for International Student Assessment* (PISA) atau *the International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA) melalui program *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS). Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai sistem penilaian pendidikan secara internasional tersebut sangat bermanfaat sebagai salah satu cara melakukan evaluasi diri tentang proses dan hasil dari sistem pendidikan nasional.

Pengakuan atas kompetensi lulusan di dunia kerja bagaimanapun juga merupakan indikator penting kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di ranah global. Hal itu dapat dicapai melalui sistem pendidikan yang berlandaskan pada standar pendidikan yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Standar pendidikan menjadi dasar dalam sistem pendidikan melalui perancangan kurikulum dan proses pendidikan, penyiapan sarana prasarana, pembiayaan, dan tentunya penyiapan guru dengan kompetensi yang sesuai untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai harapan.

Terkait alasan praktis kedua, diperlukan pengelolaan penyelenggaraan atau manajemen pendidikan yang efektif karena dunia pendidikan bersifat beragam dan dinamis. Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi insani anak bangsa, termasuk bakat dan watak manusia Indonesia agar menjadi manusia berakhlak mulia dan berjiwa Pancasila, berpengetahuan,

dan terampil. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada tidak boleh terjebak pada kondisi yang salah kelola sehingga kontraproduktif bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan di Indonesia juga dilakukan dalam rangka merespons kompleksitas penyelenggara dan model penyelenggaraan pendidikan. Selain sekolah, Indonesia memiliki beragam bentuk satuan pendidikan dengan kurikulum pendidikan yang beragam. Karenanya, standar nasional pendidikan menjadi acuan bersama dalam penyelenggara pendidikan, baik pada satuan pendidikan yang secara kelembagaan di bawah Kemendikbudristek ataupun yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, apakah yang berstatus negeri, subsidi, ataupun swasta.

Alasan praktis ketiga, keharusan jaminan keberlangsungan (kontinuitas) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas melalui standar nasional pendidikan menjadi penting karena proses pendidikan tidak sekadar berjangka pendek, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Penetapan standar pendidikan merupakan salah satu perangkat jaminan mutu pendidikan melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Melalui standar nasional pendidikan, satuan pendidikan memastikan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik pada jalur yang sama maupun ke jalur pendidikan yang berbeda. Sebagai salah satu acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, standar menjadi ukuran atau kriteria yang sama bagi berbagai elemen pelaksana dan penyelenggara pendidikan. Misalnya salah satu upaya pemantauan, pengawasan, dan penjaminan mutu pendidikan dilakukan melalui akreditasi. Standar nasional pendidikan menjadi dasar pelaksanaan akreditasi semua satuan pendidikan yang ada di seluruh wilayah NKRI.



Pada hakikatnya keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan nasional juga memuat aspek kesejarahan atas pengalaman pendidikan di Indonesia, sejak era kolonial Belanda. Aspek historis tersebut penting untuk direfleksikan ke konteks masa depan penyelenggaraan pendidikan nasional yang kontinyu. Para pendiri bangsa telah meletakkan komitmen kebangsaan bahwa pendidikan merupakan hal sangat penting dan mendasar yang harus diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Nishimura (1995) menyatakan bahwa undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah sebagai perundang-undangan bidang pendidikan nasional pertama kali dalam sejarah Indonesia, menyatakan bahwa, “Landasan pendidikan terletak pada prinsip-prinsip Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan budaya nasional Indonesia” (Pasal 4).

#### **D. Landasan Standar Nasional Pendidikan**

Perumusan standar nasional pendidikan membutuhkan landasan konstitusional sekaligus landasan ideologis dan filosofis (UUD NRI Tahun 1945), landasan yuridis, landasan sosiologis-kultural, landasan akademis, dan landasan politis. Masing-masing landasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Landasan Konstitusional, Ideologis dan Filosofis (UUD NRI Tahun 1945)**

Landasan penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia berpijak pada konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945) yang didalamnya terdapat Pancasila (Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI tahun 1945) sekaligus merupakan landasan ideologis dan filosofis.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menguraikan tujuan nasional yakni, "... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Komitmen ideologis "mencerdaskan kehidupan bangsa" memberi implikasi bahwa setiap anak Indonesia terlepas dari stratifikasi sosial, posisi geografis, kondisi fisik mereka (sehat jasmani atau difabel), semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan mencerdaskan. Nelson Mandela (Strauss, 2013), tokoh pemersatu Afrika Selatan menegaskan bahwa "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia." Pendidikan dapat membuat putra-putri Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam pembangunan nasional dan masyarakat global.

Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan satu sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi, yaitu pendidikan yang mencerdaskan peserta didik serta dalam kerangka kerangka keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia – yang sekaligus menekankan terintegrasinya nilai-nilai



keagamaan (religiusitas), nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Dalam konteks falsafah Pancasila, maka keseluruhan proses pembangunan nasional di bidang pendidikan harus dilaksanakan dalam kerangka pengalaman nilai-nilai Pancasila, yang menekankan dimensi spiritual keagamaan, moral, dan etik dalam kehidupan bangsa (**sila pertama**: Ketuhanan yang Maha Esa); menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, guna memastikan terjaminnya hak dan kewajiban asasi warga negara dalam suasana kehidupan bangsa yang anti-diskriminasi dan ketidakadilan yang merendahkan kemanusiaan (**sila kedua**: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab); menekankan kesetiakawanan sosial dan penghargaan atas perbedaan sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (**sila ketiga**: Persatuan Indonesia); menekankan bahwa kehidupan demokrasi bangsa harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila, karenanya diperlukan pendidikan politik guna menjamin kualitas partisipasi rakyat (**sila keempat**: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan); dan mengupayakan pemerataan pembangunan, termasuk pembangunan dalam bidang pendidikan, yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia berdasarkan asas keadilan sosial (**sila kelima**: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Dengan demikian, Pancasila merupakan landasan ideologis dan filosofis kehidupan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional bidang pendidikan.

## 2. Landasan Yuridis

Yang dimaksud landasan yuridis adalah dasar hukum yang dipakai dalam perumusan standar nasional pendidikan, sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945), perundang-undangan bidang pendidikan, dan peraturan-peraturan hukum di bawahnya yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945), pembangunan nasional bidang pendidikan merupakan bagian dari rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang meliputi aspek keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan yang luas dan mendalam, serta etika sosial yang saling menghargai sesama manusia. Upaya dan langkah tersebut harus sejalan dengan tujuan dan misi negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Secara yuridis Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menekankan bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara, karena itu pendidikan merupakan misi suci agar seluruh rakyat Indonesia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya melalui pendidikan. Ketentuan yuridis anggaran pendidikan tertuang jelas dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan yuridis ini menandakan bahwa betapa pentingnya pembangunan manusia sebagai subjek, objek, dan tujuan pembangunan nasional yang bermuara pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing global negara Indonesia dalam pergaulan hubungan antarnegara di dunia.

Ketentuan-ketentuan yuridis dalam perumusan standar nasional pendidikan karenanya harus memperkuat implementasi prinsip-prinsip non diskriminatif; mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dalam rangka mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat peserta didik; mengedepankan prinsip *social justice* (keadilan sosial); serta menumbuhkan jiwa nasionalisme yang inklusif – memiliki rasa kebangsaan yang tinggi namun tidak menutup diri dari pergaulan global. Hal-hal tersebut harus tetap kuat tertanam, kendatipun dunia pendidikan nasional menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dalam menghadapi geliat teknologi digital dengan berbagai dampak negatifnya, serta adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ruang gerak pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, terutama peserta didik, menjadi terbatas. Dalam konteks inilah secara yuridis, dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan hadirnya aturan-aturan baru yang mampu mengantisipasi berbagai perkembangan yang dapat mempengaruhi bidang pendidikan, sehingga proses dan praktik pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### **3. Landasan Sosiologis-Kultural**

Landasan sosiologis-kultural dalam kerangka standar nasional pendidikan menekankan bahwa proses pendidikan

mengakomodasi realitas kemajemukan bangsa dengan segenap modal sosialnya. Pendidikan nasional memberdayakan peserta didik untuk menghargai dan menjaga kemajemukan bangsa, baik dari sisi pluralisme keagamaan, kebahasaan, kesukuan, maupun perbedaan gender. Karena itu, konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan juga harus memperhatikan karakter kedaerahan atau lokalitas, menghargai kearifan lokal yang kaya di sebuah bangsa yang majemuk (*bhinneka*).

Landasan sosiologis-kultural mempertautkan dunia pendidikan dengan perubahan dan perkembangan sosial yang dinamis, baik di lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sebagai negara demokrasi, maka proses pendidikan di Indonesia mutlak harus mengaleborasi pengertian (substansi) dan praktik demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi berbagai prinsipnya, antara lain penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, menghargai realitas perbedaan gender (menghindari pandangan dan praktik kebijakan yang bias gender), mengakomodasi prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, kesetaraan, serta prinsip mendasar lainnya.

Landasan sosiologis-kultural berorientasi pada fungsi-fungsi sosial, baik yang bersifat laten maupun manifes. Tidak hanya aspek pengetahuan terkait ruang lingkup sosiologis dan kultural, tetapi proses pendidikan mengarahkan kepada pola sikap dan perilaku yang mencerminkan aktivasi fungsi-fungsi sosial yang luas, sehingga pendidikan pada hakikatnya juga pergerakan dalam perubahan sosio-kultural yang positif. Pendidikan menciptakan pola perilaku sosial yang bermartabat dan berkarakter atau berkepribadian Pancasila. Sehingga dengan demikian segenap pelaku dan pemangku kepentingan dunia pendidikan, ialah mereka yang mampu bersikap kritis

objektif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat dan perjalanan bangsanya; bersikap toleran, terbuka, dialogis, literatif, dan hal-hal yang mencerminkan nilai-nilai substansial demokrasi.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan arena interaksi antara pendidik dan peserta didik yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosio-kulturalnya. Lembaga dan segenap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan terkait erat dengan norma dan nilai budaya yang terbentuk dalam lingkungan sosio-kultural kebangsaannya. Karenanya, pendidik mempunyai peran melakukan pengajaran merujuk pada kurikulum yang berbasis sosio-kultural kebangsaan. Sementara, peserta didik menyerap pengetahuan dan menginternalisasi nilai-nilai sosio-kultural kebangsaan dari setiap topik bahasan yang disampaikan.

Dalam menjalankan peran masing-masing, pendidik dan peserta didik mengikuti norma yang berlaku di lembaga pendidikan, sebagai bagian integral dari norma yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, interaksi yang terjadi pada satuan pendidikan sebagai lembaga pendidikan yang inklusif dan berwawasan sosial-kebangsaan, dilakukan secara sistematis dan teratur diarahkan untuk internalisasi peserta didik nilai harmoni sosial di tengah kemajemukan bangsa.

Dalam konteks sosiologis-kultural, berprestasi tidak semata-mata ditandai oleh aspek tingginya nilai-nilai dalam seluruh mata pelajaran di sekolah, atau tingginya kecerdasan intelektual, tetapi juga kemampuan peserta didik mengenali, menjadi bagian, dan berkontribusi dalam lingkungan sosial-

masyarakatnya (kecerdasan sosial). Aspek kepedualian sosial dan kultural tidak boleh terlewatkan atau dipandang sebelah mata, mengingat proses pendidikan merupakan proses yang inklusif, terbuka, selalu berkembang dan terkait erat dengan perkembangan sosio-kultural yang terjadi di lingkup lokal, nasional, maupun global.

Landasan sosiologis-kultural memperkuat relasi dan integrasi sosial-kemasyarakatan yang luas dan plural, tidak sebatas beruang lingkup di dalam kelas semata-mata. Peserta didik dan pendidik harus menyadari betul bahwa interaksi mereka dalam proses belajar-mengajar ialah bagian integral dari dinamika sosial kemasyarakatan dan kebangsaan di tengah-tengah ragam perkembangan global yang dinamis. Dengan kata lain, kesadaran sosiologis-kultural mempertegas posisi mereka yang tidak eksklusif, melainkan inklusif sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, bahkan antar-bangsa (global). Konteks sosiologis-kultural mengarahkan peserta didik untuk adaptif di lingkungan sosialnya, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Pendidikan menumbuhkan karakter tanggung jawab sosial yang kokoh di tengah situasi sosial-kebangsaan yang penuh tantangan. Di era teknologi digital dan pandemi Covid-19, tanggung jawab sosial dan kultural dibutuhkan dalam menjawab ragam masalah dan tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam merespons masalah dan tantangan yang semakin kompleks itulah, melalui landasan dan khasanah sosiologisnya, segenap pemangku kepentingan dunia pendidikan memiliki kesadaran sosial dan kultural yang utuh, serta mampu melakukan langkah-langkah strategis yang bermakna.



#### 4. Landasan Akademis

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menjadi hakikat pembangunan nasional negara kita sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” seperti yang termaktub pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Untuk membangun seorang manusia Indonesia yang seutuhnya, diperlukan suatu usaha terstruktur yang bisa dimulai dari penentuan definisi dari “yang seutuhnya” tersebut, kemudian menetapkan kriteria pengukuran ketercapaian yang akan dapat memvalidasi apakah definisi tersebut sudah dipenuhi, dan yang tak kalah penting adalah pengembangan dan penerapan cara atau usaha yang harus dilakukan untuk memenuhi kriteria pengukuran tersebut. Hal ini selaras dengan konsep *Constructive Alignment* yang menitikberatkan pada hubungan antara tiga elemen penting dalam suatu proses pembelajaran yang berkualitas, yaitu tujuan/capaian pembelajaran, proses penilaian/evaluasi, dan aktivitas mengajar dan belajar (Biggs and Tang, 2011). Demi kaidah keabsahan, reliabilitas, dan keadilan, diperlukan suatu definisi tujuan yang sama dimana keberhasilan pembangunan manusia di seluruh pelosok Indonesia bisa dibandingkan, dievaluasi, dan diusahakan ketercapaiannya secara seksama dan merata. Pendefinisian tujuan yang sama inilah yang kemudian disebut sebagai standar, dan ketika akan diberlakukan secara nasional dan merata untuk semua masyarakat Indonesia, standar ini pun bisa disebut sebagai standar nasional.

Sebagai landasan akademis, standar diperlukan untuk menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berimbang di

manapun dia hidup di Indonesia. Aspek pemerataan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*) menjadi dua aspek pendidikan yang amat penting di sini dan seyogyanya selalu dijadikan tujuan dalam implementasi dan penyelenggaraan Pendidikan, mengingat adanya perbedaan geografi dan demografi setiap anak didik di berbagai pelosok Indonesia. Melalui standar yang telah ditentukan, baik itu capaian pembelajaran, sarana dan prasarana, kompetensi guru, dan/atau proses selanjutnya, Pemerintah dan satuan Pendidikan terkait jadi memiliki panduan tentang bagaimana penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dilakukan. Dengan adanya standar pulalah yang akan menjamin sekolah menjadi sebuah wadah yang inklusif, suportif, dan berkeadilan agar setiap anak didik dapat berkembang sesuai dengan kompetensinya.

Di sini standar menjadi tolok ukur bagaimana suatu proses dan fasilitas Pendidikan harus dibangun dan dikembangkan demi keberhasilan dan peningkatan kualitas performa anak didik. Seperti yang telah diusulkan oleh UNESCO (2021) dalam laporan penataan kembali sistem Pendidikan masa depan, angka keberhasilan Pendidikan yang tidak disertai narasi akuntabilitas yang kuat, keterkoneksian tanpa inklusivitas budaya, pemberian informasi tanpa pemberdayaan, dan penggunaan teknologi Pendidikan tanpa tujuan yang jelas haruslah dihindari. Untuk mendefinisikan tujuan inilah, standar perlu dibuat dan dijadikan acuan dalam perancangan dan penentuan kebijakan Pendidikan selanjutnya.

Dengan adanya standar yang ingin dicapai, seluruh pemangku kepentingan, yang mencakup setiap warga negara, pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat umum, bisa bekerja keras dan saling bersinergi untuk memastikan apa dan



bagaimana standar tersebut akan dicapai. Standar yang sama dan berimbang pun sangat dibutuhkan dalam penentuan kriteria dan kegiatan pengukuran baik itu pengukuran individu peserta didik, sekolah, ataupun pemerintah daerah/pusat, yang hasilnya dapat digunakan sebagai umpan balik guna peningkatan kualitas pendidikan, keberlanjutan kegiatan pendidikan di jenjang pendidikan yang bertingkat, dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat melalui pembayaran pajak.

#### **5. Landasan Politis**

Landasan politik pendidikan nasional, termasuk dalam dalam perumusan standar nasional pendidikan, berimpitan dengan landasan filosofisnya, bahwa proses pendidikan bermuara pada menguatnya politik kebangsaan. Artinya, peserta didik hadir sebagai manusia Indonesia memiliki komitmen kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi dan berperan penting dalam memajukan bangsa. Landasan politik pendidikan memperkuat ikhtiar aktualisasi "mencerdaskan kehidupan bangsa", di mana segenap elemen dan entitas kebangsaan selain memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, juga cerdas dalam berinteraksi sosial dan politik.

Landasan politik pendidikan yang memperkuat jati diri bangsa ditopang oleh budaya demokrasi, interaksi sosial masyarakat majemuk yang inklusif dan produktif, penguatan imajinasi kebangsaan, dan menjunjung tinggi keadilan, sehingga peserta didik yang juga merupakan warga bangsa senantiasa memiliki rasa solidaritas yang tinggi, berpikir strategis, dan mampu bertindak melindungi bangsa dari berbagai ancaman.

Dengan demikian landasan politik pendidikan nasional memperkuat nasionalisme kewargaan yang inklusif dan partisipatif berkeadilan.

Negara memiliki tanggung jawab negara dalam mewujudkan dan menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang relevan, di tengah-tengah masyarakat yang terbuka, kritis dan partisipatif, untuk kemajuan bersama. Negara menjamin aktor-aktor strategis dalam bidang pendidikan hadir dan berperan dalam peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan kepada segenap warga bangsa.

Lebih dari itu, landasan politik pendidikan berkolerasi dengan menguatnya praktik berdemokrasi yang baik, mampu mengantarkan bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi yang dihormati bangsa-bangsa lain. Sikap-sikap yang selaras dengan budaya demokrasi, antara lain sikap anti-korupsi, mendukung adanya pemilu berkala yang bersih, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital bagi kemaslahatan bersama.

Landasan politik juga harus bermuara pada penguatan integrasi bangsa. Masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal yang dapat mendegradasi persatuan dan kesatuan nasional, harus diselesaikan secara elegan. Dalam konteks perkembangan geopolitik dan geostrategis, eksistensi negara-bangsa terus dihadapkan pada dinamika kontestatif dengan berbagai entitas kekuatan politik eksternal. Karenanya, landasan politik menggarisbawahi pentingnya proses pendidikan yang memperkuat daya saing bangsa melalui keunggulan sumberdaya manusia yang dihasilkannya.

Landasan politik memperkuat ideologi negara Pancasila, di mana proses dan praktik pendidikan nasional harus bertumpu

pada strategi yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta mencegah berkembangnya politisasi identitas, paham-paham radikal yang bertentangan dengan ideologi dan karakter bangsa yang ber-Pancasila. Yang juga tidak kalah pentingnya, landasan politis harus mengantisipasi perkembangan luar biasa menyusul kehadiran teknologi digital. Landasan politis harus menghadirkan praktik-praktik “demokrasi digital”, yang hakikatnya memperkuat demokrasi bangsa. Pendidikan berkontribusi bagi kemajuan demokrasi digital yang menumbuhkan watak dan sikap demokratis dan adil – anti-hoaks, anti-penyebaran fitnah dan hal-hal lain yang merusak. Pendidikan berkontribusi penting dalam menumbuhkan sikap demokratis dan adil khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan baik di ranah formal, non-formal, dan informal.

#### **E. Penerapan Pendidikan Berbasis Standar di Beberapa Negara**

Selama tiga dekade terakhir, sistem pendidikan di dunia dari berbagai negara telah mengembangkan suatu konsep yang memayungi praktik pendidikan di suatu negara, yang disebut ‘standar pendidikan’ atau sistem pendidikan berbasis standar. Pelopor dari sistem ini adalah Inggris dan Amerika Serikat (AS). Awalnya pendidikan berbasis standar dilandasi asumsi bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sebagai dasar akuntabilitas publik diperlukan standar pendidikan.

Banyak negara berkepentingan untuk menyusun standar pendidikan agar sistem pendidikan mereka dapat dibandingkan. Walaupun demikian, tetap ada perbedaan yang mendasar tentang bagaimana suatu negara mengoperasikan pendidikan berbasis

standar, terutama terkait dengan nilai pendidikan (*educational values*) yang dianut. Di hampir semua negara, telah terjadi pergeseran pada pendidikan dasar dan menengah ke arah pendidikan universal, yaitu pendidikan dasar dan menengah menjadi hak setiap warga negara. Penerapan standar pendidikan di banyak negara berimplikasi pada penerapan sistem penilaian terstandar.

*International Association of Educational Assessment* telah mengumpulkan sistem penilaian dari sekitar 50 negara yang memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu ujian terstandar (*standardized test*) secara nasional menggunakan pilihan ganda berbasis norma nasional. Beberapa contoh penerapan pendidikan berbasis standar di berbagai negara diberikan sebagai berikut: apabila standar pendidikan nasional diartikan sebagai standar pendidikan yang berisi capaian pembelajaran yang wajib diterapkan oleh seluruh institusi pendidikan di sebuah negara, maka bisa dikatakan bahwa di Amerika Serikat pun standar nasional semacam ini belum diberlakukan.

Di AS, pemerintah pusatnya hanya memberlakukan ujian evaluasi yang wajib dilakukan oleh sekelompok siswa di kelas 4, 8, dan 12 yang dipilih secara acak. Ujian evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dengan standar konten yang cukup kuat melalui program NAEP-nya, atau *National Assessment of Education Progress*, yang sudah dimulai sejak tahun 1960an (Ravitch, 1996; NCES, 2020). Namun, isu standar nasional ini kembali mencuat dengan alasan demi keunggulan (*excellence*) and kesempatan yang sama (*equal opportunity*), dan sejak tahun 2009 pembuatan standar nasional yang diberi nama *Common Core State Standards* (CCSS) dan bersifat *voluntary* ini mulai dikembangkan untuk bidang bahasa Inggris dan kesenian (*English Language Art*)

dan matematika pada jenjang Taman Kanak-kanak Tahun ke-2 (Kindergarten) sampai dengan Kelas 12 (CCSSI, 2021). Akhirnya, 42 negara bagian AS (dari total 50) bersedia untuk mengadopsi dan menerapkannya di seluruh institusi pendidikan di wilayahnya mulai di tahun 2021.

Orientasi kebijakan pendidikan di AS, berbeda apabila dibandingkan dengan Jepang. Dua negara industri ini memiliki perbedaan yang diametral dalam kebijakannya. Di AS, komunitas lokal secara tradisi mengontrol sekolahnya masing-masing. Kendati negara bagian memiliki tanggung jawab resmi untuk pendidikan, namun setiap distrik secara tradisi mengembangkan kebijakan pendaftaran masuk sekolah, dan menyusun anggaran menciptakan variasi dalam kualitas guru, pembiayaan, kurikulum, fasilitas dan pencapaian siswa antardistrik (Latif, 2020).

Di Jepang, rezim pendidikan sejak kepemimpinan rezim Meiji akhir abad ke-19 menganut sistem kesatuan pendidikan nasional untuk mengejar kemajuan. Kementerian pendidikan nasional mengendalikan segala aspek pendidikan. Kementerian pendidikan menetapkan kurikulum nasional wajib, pelatihan guru dan aturan sekolah, serta pedoman pembiayaan pendidikan. Dalam struktur hirarkis Jepang, peran tradisional dari komunitas lokal dan personil sekolah melaksanakan kebijakan birokrat kementerian pendidikan (Latif, 2020).

Meskipun AS dan Jepang menerapkan sistem pendidikan berbeda, terdapat kesamaan: eksekutornya didominasi tenaga-tenaga spesialis pendidikan (elite tradisional pendidikan). Namun, kedua negara sejak 1990-an merestrukturisasi kebijakan pendidikan, menolak kemapanan kuasa pendidikan tradisional.

Pada 1994, pemerintah federal AS pertama kali mewajibkan kebijakan nasional pendidikan, dan pada 2002, menuntut negara-negara bagian memberlakukan rezim pengujian (*testing*) dan akuntabilitas secara spesifik. Sebaliknya, Jepang menerapkan deregulasi dan desentralisasi sistem pendidikan. Pada 1997 pemerintah Jepang pertama kali membolehkan program pilihan di sekolah-sekolah umum jenjang menengah. Pada 2004, kebijakan desentralisasi diterapkan dengan memberi kewenangan pemerintah provinsi mengontrol dana pendidikan nasional (Latif, 2021: 385).

Yang juga sering memperoleh perhatian dalam sistem pendidikannya ialah negara-negara Skandinavia, terutama Finlandia. Finlandia seringkali dirujuk sebagai barometer keberhasilan pendidikan sebuah negara. Sebagaimana dirangkum *World Economic Forum* penerapan sistem pendidikan Finlandia ditandai oleh hal-hal antara lain: *Pertama*, persaingan antarsekolah tidak menghasilkan siswa sukses apabila dibandingkan kerjasama antarsekolah. Setiap lembaga akademik di negara ini didanai melalui biaya publik atau negara. Para guru dilatih membuat penilaian siswa sendiri alih-alih menggunakan tes standar nasional atau internasional. Guru dipercaya melakukan kinerja lebih baik tanpa harus termotivasi untuk saling berkompetisi.

*Kedua*, guru di Finlandia lebih tinggi dibanding di AS. Untuk menjadi seorang guru di para calon harus bergelar magister dan menyelesaikan pendidikan profesi. Hasilnya, para guru dapat diandalkan untuk melakukan penelitian pedagogis (pengajaran) terbaik tentang pendidikan. *Ketiga*, pemerintah membuat keputusan kebijakan pendidikannya berdasarkan penelitian. Jika hasil penelitian menunjukkan perlu perbaikan, kementerian pendidikan federal menerapkannya.



*Keempat*, penerapan hasil penelitian membuat kebijakan tidak terikat proyek, uang, atau kepentingan politik. Guru-guru Finlandia didorong membuat laboratorium mini untuk gaya mengajar, meningkatkan yang berhasil dan menghilangkan yang tidak berhasil. Pola pikir eksperimental ini memungkinkan guru mampu berpikir dan menemukan solusi *out of the box*.

*Kelima*, Finlandia mengharuskan guru memberi siswa waktu bermain 15 menit untuk setiap 45 menit pengajaran. Kebijakan tersebut bermula dari keyakinan mendalam bahwa anak-anak harus tetap anak-anak selama mungkin. Hasilnya menunjukkan siswa yang diberikan setidaknya satu kali istirahat selama 15 menit setiap pergantian pelajaran atau lebih berperilaku lebih baik di sekolah dan mengerjakan tugas lebih baik.

*Keenam*, banyak hal ditawarkan sekolah-sekolah Finlandia kepada siswa, hanya satu yang tidak: PR. Waktu yang dihabiskan di rumah disediakan untuk keluarga, di mana satu-satunya pelajaran dipelajari anak-anak adalah tentang kehidupan. *Ketujuh*, Finlandia, memberikan TK dan tempat penitipan anak secara gratis dan berkualitas. Lebih dari 97 persen anak usia 3 hingga 6 tahun memanfaatkan satu di antara dua pilihan tersebut. Lebih dari itu, TK dan penitipan anak mereka berkualitas.

Di kawasan Asia Timur, Korea Selatan merupakan negara maju. Kemajuannya, tentu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pendidikannya. Pendidikan kontemporer Korea Selatan baru mulai setelah merdeka dari Jepang sejak tahun 1945. Fase pendidikan di Korea Selatan dapat dibagi menjadi tiga yakni 1945-akhir 1950-an merupakan masa membangun kembali dasar hukum dan kelembagaan sistem pendidikan sekaligus mencabut penataan ulang pendidikan kolonial. Fase kedua mulai 1960-an - 1990-an,

pendidikan diatur oleh pemerintah otoriter dan fokus nasionalisme untuk mendorong ekonomi dan rekonsiliasi nasional. Selanjutnya, fase ketiga pertengahan 1990-an hingga sekarang merupakan pendidikan yang demokratisasi dan desentralisasi pada perubahan globalisasi untuk setelah sistem politik kehilangan politik otoriter (BongHee et al.).

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura dikenal sebagai negara yang berprestasi dalam bidang pendidikan. Bagaimana sistem pendidikannya? Di Singapura, pendidikan wajib mencakup enam tahun sekolah dasar, empat tahun sekolah menengah, dan satu hingga tiga tahun sekolah pasca sekolah menengah. Prasekolah, yang disebut taman kanak-kanak, bersifat sukarela dan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan penyedia swasta. Sistem instruksional dikendalikan secara terpusat dengan kurikulum dan silabus yang dikembangkan dengan baik untuk setiap kursus yang disesuaikan dengan ujian akhir kursus. Pada akhir tahun keempat sekolah dasar, siswa mengikuti tes berbasis sekolah yang menentukan level (*band*) apa yang akan dipelajari siswa untuk bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, dan sains selama dua tahun ke depan. Di akhir tahun keenam sekolah dasar, ketika siswa berusia sekitar 12 tahun, siswa mengikuti Ujian Meninggalkan Sekolah Dasar (PSLE) dalam bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, dan sains. Berdasarkan hasil ini, siswa diterima di salah satu dari empat jalur di sekolah menengah.

Kementerian Pendidikan Singapura mengawasi pengembangan kurikulum nasional, yang mencakup “Hasil Pendidikan yang Diinginkan”. Hasil yang diinginkan adalah keunggulan siswa dalam keterampilan hidup, keterampilan pengetahuan, dan pengetahuan disiplin mata pelajaran yang disusun menjadi delapan keterampilan inti dan nilai: pengembangan karakter, keterampilan manajemen



diri, keterampilan sosial dan kooperatif, literasi dan numerasi, keterampilan komunikasi, keterampilan informasi, keterampilan berpikir. dan kreativitas, dan keterampilan penerapan pengetahuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kementerian telah berusaha untuk melonggarkan kendali mereka atas kurikulum, mendorong sekolah untuk mempertimbangkan kurikulum sebagai kerangka kerja, dan untuk menyesuaikan serta bekerja dalam kerangka tersebut untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka. Sekolah menengah juga didorong untuk mengembangkan kursus tambahan untuk menghadirkan cita rasa yang berbeda di sekolah mereka; siswa memilih sekolah menengah mereka, dan sering kali memilih sekolah yang pendekatannya uniknya sesuai dengan minat mereka. Guru melakukan penilaian berkelanjutan terhadap siswanya di semua tingkat pendidikan. Siswa mengikuti ujian nasional di akhir sekolah dasar, menengah, dan pasca-sekolah menengah. Ujian ini berfungsi sebagai pintu gerbang ke pendidikan menengah pertama, menengah atas, dan tinggi.

Dari uraian di atas, negara-negara di dunia memiliki pendekatan masing-masing dalam penerapan standar pendidikan nasional mereka. Semuanya menyadari bahwa pendidikan memiliki arti penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional mereka. Di negara-negara maju, kebijakan pendidikan tidak serta merta bersifat sentralistik, tetapi mereka tetap objektif dalam melakukan evaluasi kebijakan, sehingga memungkinkan perubahan-perubahan.

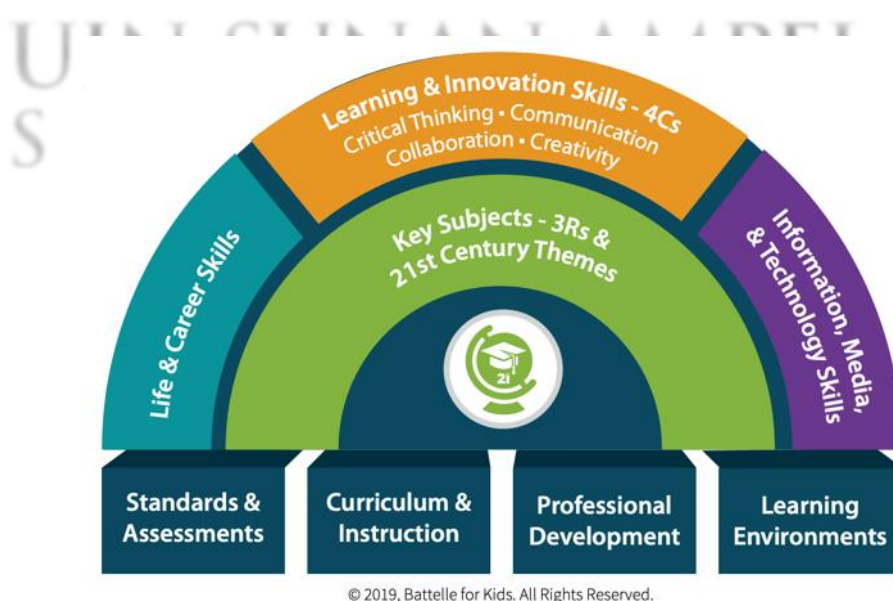
## F. Tren Standar Pendidikan Abad Ke-21

Kita telah menginjak dekade kedua abad ke-21 yang ditandai oleh perkembangan global yang dinamis. Berbagai *insight* telah disebarluaskan mengenai kompetensi, kemampuan, dan/atau ketrampilan yang dibutuhkan di masa depan (Whiting, 2020). Dengan cepatnya perkembangan jaman dan teknologi yang menyertainya, terutama dengan adanya revolusi industri ke-4 ini, kompetensi yang harus dimiliki oleh dan akan lebih membantu generasi penerus bangsa ini untuk cepat beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan baru antara lain adalah kemampuan memecahkan masalah (*problem-solving*), pengelolaan diri (*self management*), bekerja sama dengan orang lain, dan ketrampilan untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi. Kompetensi ini menjadi kompetensi dasar yang akan menurunkan kompetensi-kompetensi lainnya seperti *analytical thinking and innovation; active learning and learning strategies; complex problem-solving; critical thinking and analysis; creativity, originality, and initiative; leadership and social influence; technology use, monitoring, and control; technology design and programming; resilience, stress tolerance, and flexibility*, seperti yang disadur dari Whiting (2020).

Sebuah pergerakan yang mempromosikan kompetensi harapan abad ke-21 (*21<sup>st</sup> Century Skills*) dipelopori oleh Jejaring P21 (Partnership for 21<sup>st</sup> Century Learning) menggambarkan kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang siswa untuk berhasil dalam dunia kerja dan kehidupan (lihat Gambar 2). P21 menganjurkan adanya pengintegrasian pengetahuan akademik inti, pemikiran kritis, dan keterampilan sosial dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membantu siswa menguasai kemampuan multi-dimensi yang dibutuhkan di masa depan. Selain 3R (**R**eading, **wR**iting, **aR**ithmetics) sebagai kemampuan akademik inti, ada juga

4C (**Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity**) sebagai ketrampilan untuk belajar dan berinovasi, ketrampilan kerja dan bertahan hidup, serta ketrampilan yang berkaitan dengan informasi, media, dan teknologi.

Keterampilan tersebut dapat membantu siswa berhasil dalam karir masa depan mereka dengan mendukung sistem pembelajaran abad ke-21 untuk meningkatkan *result* (Kids, 2019). Dengan mengintegrasikan pembelajaran kognitif dan keterampilan yang dibutuhkan ke dalam kurikulum, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang subjek dan mencoba memecahkan masalah yang kompleks di dunia nyata di masa depan. Sebagaimana ditulis Alismail and McGuire (2015), pengintegrasian standar nasional dan kerangka P21 ke dalam kurikulum sekolah, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, akan mendukung pembelajaran kognitif dan keterampilan yang dibutuhkan sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu hal dan tentang bagaimana memecahkan masalah yang kompleks di dunia nyata di masa depan.



## Gambar 2.

Kerangka Kemampuan Abad ke-21 (Kids, 2019)

Selain kompetensi, kemampuan, dan ketrampilan abad ke-21 yang tersebut di atas, ada 4 aspek atau kompetensi yang dapat diusulkan untuk harus ada di konsep standar nasional pendidikan masa depan di Indonesia sebagai hasil dari diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dengan para pakar ahli yang dilakukan oleh Tim Kajian di bulan Agustus 2021. Aspek/kompetensi tambahan tersebut antara lain adalah kompetensi transformatif, ketahananbantingan (*resilience*), dan semangat keberagaman (*multiculturalism*) dan keber-agama-an (*spirituality/religiosity*). Yang pertama, kompetensi transformatif merujuk pada kemampuan peserta didik untuk memperbarui sesuatu atau menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis terhadap sesuatu. Peserta didik diharapkan bisa memiliki kepercayaan diri dan kemampuan berpikir yang selalu berkembang (*growth mindset*). Sedangkan, kemampuan ketahananbantingan (*resilience*) atau kegigihan (*grit*) menjadi salah satu faktor penting dari kemampuan beradaptasi seorang peserta didik (*agility*) dalam menghadapi situasi dan kondisi di masa kini dan mendatang yang *volatile* atau sering berubah. Lalu, kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan belajar kepada siapa saja tentu tidak luput dari kemampuan menghormati keberagaman dan memahami bahwa manusia berasal dari latar belakang yang berbeda (multikultural).

Yang terakhir, pentingnya anak-anak bangsa dapat memiliki kemampuan spiritualisme atau keber-agama-an sehingga setiap manusia Indonesia bisa dididik dan dibangun menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Yaitu, manusia yang tidak hanya

memiliki kualitas jasmani yang baik, namun juga kualitas mental dan rohani yang juga baik sehingga dapat mengelola dan mengontrol diri dalam rangka aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi penuh terhadap kemajuan dirinya sendiri, masyarakat sekitar, serta bangsa dan negara Indonesia.

Dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sarat dengan berbagai kompetensi yang diharapkan dalam menghadapi masa depan, guru sebagai tenaga pendidik memegang peranan yang sangat penting. Guru diharapkan menjadi pusat suatu kontrak sosial yang baru untuk pendidikan (UNESCO, 2021). Peran mereka harus lebih dihargai dan dikembangkan kembali sebagai suatu usaha bersama yang akan melahirkan pengetahuan baru yang bisa mendorong transformasi sosial dan pendidikan. Para guru sebaiknya saling bergandengan tangan untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan kepada dan terus membuka dialog dengan para generasi penerus bangsa yang akan mewarisi dan bersama-sama membangun masa depan. Oleh karena itu, ada 4 prinsip yang bisa membantu dalam mempersiapkan kompetensi guru di masa depan (OECD, 2021, hal. 90), yakni:

1. Kerja guru yang ditandai oleh kolaborasi dan kerja dalam tim. Pengajaran yang berkualitas didukung oleh sinergi yang baik antar guru dan lingkungannya sehingga kebutuhan mental, fisik, dan sosial anak bisa terpenuhi dengan baik.
2. Menghasilkan pengetahuan, tindakan reflektif, dan penelitian menjadi bagian yang terpadu dalam proses belajar-mengajar. Peran guru sebagai seorang pembelajar perlu disadari dan didukung karena merekalah yang akan mengidentifikasi masalah dan inovasi apa yang diperlukan, mendefinisikan

pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan menghasilkan praktik pedagogik yang baru dan lebih baik dalam meningkatkan kualitas pengajarannya.

3. Otonomi dan kebebasan guru harus didukung. Jati diri guru sebagai seorang profesional perlu terus didukung dan ditingkatkan dengan cara memberikan induksi dan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi yang tepat dan berkesinambungan. Dengan memiliki bekal yang cukup kuat, guru akan selalu memiliki kepercayaan diri untuk membuat kebijakan (*judgment*) dan menggunakan keahliannya (*expertise*) dalam merancang dan membimbing pembelajaran anak didiknya.
4. Guru harus berpartisipasi dalam diskusi publik tentang Pendidikan masa depan. Keberadaan guru untuk selalu ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam mekanisme pembuatan dan pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan menjadi kunci utama demi keberhasilan usaha penataan kembali sistem pendidikan kita ini. demi keberhasilan.

Uraian di atas telah menunjukkan bahwa standar sangat dibutuhkan untuk memberikan acuan dan arahan dalam menetapkan upaya-upaya guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan penilaian terhadap ketercapaian tujuan tersebut. Di bidang pendidikan, tujuan pendidikan sering merujuk kepada peningkatan kapasitas dan kualitas anak didik, sehingga standar pendidikan harus ditentukan terlebih dahulu agar dapat membantu perumusan dan penentuan arah kebijakan dan/atau kegiatan-kegiatan pendidikan sehingga menjadi lebih efektif dan optimal.





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **TANTANGAN PENDIDIKAN DI MASA DEPAN**

Setelah Bab II memaparkan tentang pentingnya standar nasional pendidikan, bab ini terfokus pada uraian tentang konteks tantangan pendidikan kita di masa depan. Tantangan (*challenge*) menurut *Cambridge Dictionary* (Dictionary, 2018) merupakan sebuah pekerjaan, tugas atau situasi yang sulit yang memerlukan usaha yang keras, tekad yang kuat dan keterampilan yang tinggi agar berhasil mengatasinya. Tantangan pendidikan nasional dapat diartikan sebagai berbagai situasi internal maupun eksternal, saat ini dan proyeksi ke depan, yang berpotensi menjadi penghambat ataupun pendorong untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Sebagaimana bidang-bidang lain, bidang pendidikan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak mudah, menyusul adanya revolusi industri 4.0, yang ditandai oleh dominasi terutama oleh teknologi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligent*). Pandemi Covid-19 juga merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan di tanah air. Dinamika regional dan global, juga layak diperhitungkan dalam mencermati kompleksitas tantangan bidang pendidikan, sebagaimana diuraikan dalam bab ini.

### **A. Hakikat Pendidikan di Indonesia**

Pada hakikatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pendidikan di Indonesia diselenggarakan dalam konteks “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tentu saja hal tersebut memiliki makna yang dalam, di mana pendidikan dan kebangsaan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Menurut Pasal

31 UUD NRI 1945, pendidikan di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dijabarkan melalui Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024 yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 22 tahun 2020 luaran dari pendidikan adalah terbentuknya Profil Pelajar Pancasila yang bercirikan: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan perlu dimaknai sebagai sesuatu yang dinamis dan adaptif terhadap berbagai perubahan lingkungan level nasional maupun global yang terjadi dari masa ke masa. Artinya, untuk mewujudkan tujuan yang sama, misalnya membentuk manusia Indonesia yang mandiri, akan berbeda tuntutan dan tantangannya jika dilakukan pada awal kemerdekaan, dengan jika dikerjakan pada lingkungan global saat ini dan di masa depan. Dalam konteks inilah diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas tantangan bidang pendidikan pada masa kini, yang berdampak pada masa depan. Dengan demikian, kita diharapkan mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi masa depan.

## **B. Faktor Pendorong Disrupsi Pendidikan**

Perubahan atau lebih tepatnya disrupsi lingkungan global saat ini dalam berbagai aspek kehidupan (ekonomi, sosial, budaya maupun politik) telah dan sedang terjadi dengan intensitas yang cepat dan sulit diprediksi. Dalam ekonomi misalnya krisis global yang terjadi sejak tahun 2008 menyebabkan banyak ketidakpastian serta munculnya berbagai model bisnis baru yang tidak diprediksi sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang sekarang masih berlangsung dan belum ada kepastian waktu penyelesaiannya telah memporak-porandakan ekonomi global. Dunia global semakin menuju kondisi lingkungan yang *volatile, uncertain, complex* dan *ambiguous* (VUCA) yang dikenalkan oleh Warren Bennis and Burt Nanus (Bennis & Nanus, 1985).

*Volatile* artinya perubahan dalam berbagai aspek terjadi dengan variansi yang tinggi salah satu indikasinya adalah fluktuasi harga komoditi, nilai tukar mata uang, fluktuasi permintaan dan sebagainya saat pandemic Covid-19; *uncertain* artinya perubahan yang terjadi di masa depan sulit dilihat polanya dengan hanya melihat masa lalu; *complex* maknanya berbagai aspek saling terhubung sehingga satu problem akan terhubung dengan berbagai faktor penyebab, berbagai pihak yang berkepentingan dan lain sebagainya; dan *ambiguous* maksudnya situasi dimana hubungan sebab akibat sama sekali tidak diketahui dengan jelas sehingga interpretasi atas situasi oleh berbagai pihak juga menjadi berbeda-beda dan sulit disatukan. Drucker (2012) menyatakan pentingnya setiap pihak untuk menyiapkan diri dalam menghadapi masa perubahan di era global ini.

Salah satu kunci utama dalam menghadapi berbagai kondisi global ini adalah penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tentunya, sistem pendidikan yang mencakup berbagai jalur pendidikan (formal, nonformal, dan informal), jenjang pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi) dan jenis pendidikan (pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus) perlu dirancang dengan tepat sehingga mampu mewujudkan luaran yang responsif terhadap kebutuhan global, antara lain kompeten, berdaya saing global dan adaptif terhadap berbagai tantangan di masa depan. Dalam dokumen *APEC Education Strategy 2016-2030* (APEC, 2020), dikemukakan bahwa Pendidikan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan di kawasan Asia Pacific karena: 1) memberikan kemampuan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk tetap produktif dan kompetitif di pasar kerja; 2) menciptakan masyarakat yang sehat dan stabil melalui warga masyarakat yang bertanggungjawab dan memiliki komitmen untuk selalu terus meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan; dan 3) meningkatkan pemahaman budaya dan memberikan peluang kolaborasi internasional antar warga dunia secara global.

Karakter perubahan dan kondisi global sedemikian, tentu saja juga berpengaruh pada bidang pendidikan yang menuntut respons yang tepat melalui reposisi peran dan fungsi pendidikan. Faktor utama yang menyebabkan dunia pendidikan perlu melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat adalah perkembangan teknologi dan globalisasi. Sebenarnya kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan karena terdapat hubungan yang sangat erat, yakni pesatnya perkembangan teknologi akan mempercepat terwujudnya era globalisasi, sementara globalisasi telah mendorong tumbuhnya berbagai peluang dan kebutuhan pengembangan teknologi ke depan.

Schwab (2017) memaparkan bagaimana perkembangan teknologi pada abad 21 yang memasuki era Revolusi Industri 4.0 telah dan sedang membawa perubahan fundamental bagi berbagai sektor kehidupan dengan, (i) kecepatan yang nonlinear, (ii) kedalaman dan keluasan yang berdampak pada ekonomi, bisnis, masyarakat dan individu, serta (iii) berdampak pada transformasi dari seluruh sistem, nasional maupun global, industri, perusahaan, dan masyarakat. Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) atau *cyber physical system* yang antara lain ditandai dengan berkembangnya IoT (*internet of things*) di mana berbagai perangkat telah terhubung dengan internet, *big data* serta *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan telah menyebabkan perubahan tentang bagaimana cara kita hidup, bekerja maupun berhubungan dengan orang lain.

Di bidang ekonomi, perkembangan teknologi terkini dalam *autonomous vehicles*, *3D printing*, *advanced robotics*, dan *new materials* menyebabkan revolusi dalam *supply* maupun *demand*. Produk dan layanan baru bermunculan dengan target pasar yang tadinya belum ada. Banyak pekerjaan yang menjadi efisien dengan penggantian tenaga manusia dengan robot untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Bahkan, Uber misalnya telah memberikan layanan transportasi orang atau barang dengan mobil/*drone* tanpa awak.

Selain itu inovasi dalam digital telah berkembang sangat cepat. Digitalisasi berarti otomasi yang menyebabkan konsep skala ekonomi dalam produksi menjadi kurang relevan. Berbagai platform teknologi yang saling terhubung dengan berbagai perangkat (*internet of things/IoT*) berkembang dengan pesat. Bisnis dengan konsep *sharing-economy* menggantikan bisnis konvensional yang mengandalkan kepemilikan kapital/modal. Uber, Gojek dan Grab



penyedia layanan taksi yang tidak memiliki kendaraan, Youtube dan Facebook merupakan penyedia media yang tidak memproduksi konten, Alibaba merupakan retailer terbesar namun tidak memiliki inventori, Airbnb merupakan penyedia penginapan terbesar di dunia namun tidak memiliki gedung (Goodwin, 2018). Ke depan, para inovator bisnis lah yang akan mendapatkan benefit paling banyak dari konsep *sharing-economy* ini.

Dunia pendidikan sebagai institusi yang berperan penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan mampu memainkan peran di era RI 4.0 harus melakukan adaptasi dengan perubahan ini. Saat ini dunia memasuki *post-knowledge era* dimana dunia pendidikan tidak hanya dituntut melahirkan luaran sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai pasar kerja, namun juga dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang dengan pengetahuannya mampu melahirkan pengetahuan baru (*creating new knowledge*) untuk berinovasi (Ehlers & Kellermann, 2019). Di samping itu, dari aspek proses pendidikan, inovasi digital telah menyebabkan berbagai disrupsi tentang bagaimana institusi pendidikan berinovasi dalam sistem pendidikannya. Di era RI 4.0, pengetahuan menjadi mudah diakses oleh setiap orang melalui berbagai *platform* digital *Massive Open Online Courses* (MOOC), seperti Khan Academy, Youtube, IndonesiaX, Coursera, dan lain-lain dengan biasa yang terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Bahkan *University of the People* ([www.uopeople.edu](http://www.uopeople.edu)) menyediakan pendidikan bergelar jarak jauh yang gratis dan terakreditasi global dengan pengajar profesional dan berkompentensi global dari seluruh dunia. Hal ini tentu menjadikan sistem pendidikan secara menyeluruh (*whole system*) dituntut untuk meninjau kembali bisnis

prosesnya dan melakukan rekayasa ulang (*reengineering*) agar adaptif terhadap tuntutan global.

Selain RI 4.0, faktor lain yang mendorong perubahan fundamental dalam pendidikan adalah globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena dengan karakteristik masifnya pertumbuhan aliran komunikasi, perdagangan, pertukaran budaya, informasi dan lain-lain dengan batasan wilayah yang semakin kabur dalam masyarakat global (Crawford et al., 2020). Berbagai pengembangan inovasi digital dengan berbagai perangkat yang terkoneksi internet serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengikis batasan ruang dan waktu. Dalam berbagai aspek, ekonomi, sosial maupun budaya, seluruh dunia telah terhubung (*interconnected*) dan saling bergantung (*interdependent*). Pandemi Covid 19 saat ini merupakan salah satu contoh bagaimana kejadian di satu negara berpengaruh pada negara lain di berbagai sektor.

Dalam bidang ekonomi, aliran barang dari dalam dan keluar negeri semakin bebas. Potensi ekspansi produk ke pasar luar negeri terbuka, di saat yang sama ancaman membanjirnya produk-produk dari luar negeri juga semakin nyata. Produk-produk yang inovatif, berkualitas dengan harga terjangkau semakin mudah didapatkan dengan berbagai pilihan. Perusahaan-perusahaan dunia akan merekrut talenta-talenta global dari berbagai belahan dunia untuk mewujudkan inovasi produknya serta melakukan berbagai kolaborasi dengan mitra (pemasok, *wholesaler*, *retailer*) dari belahan dunia lain untuk mengefisienkan rantai pasoknya.

Di bidang sosial, berbagai identitas individu yang didasarkan pada kesamaan wilayah, daerah, negara dan lain sebagainya menjadi semakin tidak relevan. *Nation identity* akan berubah menjadi *global identity*. Setiap personal memiliki lingkungan maya

lintas negara di media sosial. Hal ini akan melahirkan nilai-nilai baru yang kemungkinan besar berbeda/berbenturan dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dimana dia tinggal. Kemampuan untuk memiliki cara pandang yang terbuka (*open minded*) dengan toleransi yang tinggi diperlukan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat global.

Globalisasi di bidang budaya juga dapat dirasakan dengan cepatnya berbagai budaya dan nilai-nilai asing menyebar ke seluruh penjuru dunia. Fenomena K-Pop dari Korea Selatan yang menjadikan idola kaum milenial di seluruh dunia sebagai contohnya. Selain itu menyebarnya faham/pemikiran sekularisme dan radikalisme lintas negara juga mulai terjadi. Gaya hidup (*life style*), *fashion*, maupun produk budaya negara-negara maju menjadi penentu tren (*trend setter*) di negara-negara berkembang.

Sekali lagi, institusi pendidikan berperan krusial di era globalisasi untuk menghasilkan individu yang mandiri dengan daya saing global, mampu berkolaborasi dalam tim lintas negara, dan di saat yang sama memiliki kedewasaan yang mampu memilah dan membentuk/mewarnai nilai-nilai positif dalam masyarakat dunia. Era RI 4.0 dan globalisasi saat ini masih terus berkembang dengan arah yang masih belum sepenuhnya dapat diprediksi, sehingga ke depan lingkungan global akan semakin *volatile, uncertain, complex* dan *ambiguous*. Hal ini menegaskan kembali betapa sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dituntut untuk mampu beradaptasi dalam membentuk masyarakat global yang memanusiakan manusia, hidup bahagia dalam harmoni.

### **C. Tantangan Pendidikan Nasional Masa Depan**

Perubahan yang sangat cepat yang sedang dan telah terjadi di berbagai sektor akibat Revolusi Industri 4.0 dan globalisasi berpotensi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia ke depan. Indonesia harus mampu berperan sebagai subyek yang berkontribusi atau mewarnai perubahan yang terjadi, bukan hanya sebagai obyek dari perubahan. Perubahan yang terjadi harus dipandu untuk peningkatan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Indonesia.

Jepang mengenalkan gagasan *Society 5.0* sebagai arah perkembangan teknologi ke depan yakni teknologi harus mampu memberikan kebahagiaan bagi manusia (*human-centred society*) baik secara ekonomi maupun sosial dalam masyarakat Jepang yang menua (*ageing society*). Seperti Jepang, Indonesia juga harus merespon dengan cepat perubahan ini melalui penyiapan sumber daya manusianya. Sistem pendidikan Indonesia harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing global dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia, serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang adaptif di masa depan sesuai yang diharapkan bukanlah masalah yang sederhana. Apalagi, sistem pendidikan Indonesia saat ini secara kualitas dibanding dengan negara lain juga masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan pemerintah secara sungguh-sungguh agar pendidikan Indonesia di masa depan kompetitif.

Berbagai tantangan pendidikan nasional yang perlu mendapatkan perhatian dan upaya sungguh-sungguh dari

pemerintah Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yakni tantangan ke-Indonesiaan dan tantangan global. Tantangan ke-Indonesiaan merupakan gambaran situasi bangsa Indonesia yang mengalami disrupsi dan perlu mendapatkan perhatian serius dalam sistem pendidikan nasional. Sementara tantangan global merujuk kepada tuntutan global di masa depan yang harus diperhatikan dalam menyiapkan sistem pendidikan nasional agar dihasilkan sumber daya manusia yang adaptif, kompetitif dan responsif terhadap perubahan di masa depan.

## **1. Tantangan ke-Indonesiaan dalam sistem pendidikan nasional**

### **a. Penguatan jati diri bangsa Indonesia di era global**

Tidak dapat dipungkiri, globalisasi akibat perkembangan teknologi informasi menyebabkan karakteristik masyarakat dunia bergeser dari heterogen menjadi homogen, dari *nation identity* menjadi *global identity*. Hal ini sudah mulai dirasakan bagi generasi milenial yang semakin tinggi intensitas interaksi dengan identitas global, misalnya penggunaan bahasa Inggris untuk berkomunikasi, gaya berpakaian, gaya hidup yang lebih bebas, nilai-nilai kehidupan dan lain-lain. Identitas global di sini ditentukan oleh masyarakat dunia dengan peradaban paling dominan dan menguasai informasi, misalnya negara-negara barat. Di masa depan dominasi ini bisa saja berubah. Semakin derasnya aliran informasi dan interaksi masyarakat lintas negara dalam dunia digital tentu akan secara alami menggerus identitas anak-anak muda yang sejak kecil lebih aktif berinteraksi dalam lingkungan dunia digital dalam bentuk sosial media maupun media digital lain dibandingkan dengan lingkungan riil di masyarakat.

Masyarakat Indonesia di dunia luar saat ini dikenal sebagai masyarakat yang religius, ulet, ramah, gotong royong dan terbuka/toleran (Draine & Hall, 2000), dengan identitas kultur budaya dan etnik yang kaya. Identitas bangsa ini menjadi pembeda dengan bangsa lain di dunia yang berpotensi memberikan nilai tambah secara ekonomi di kompetisi global dalam berbagai sektor, misalnya industri pariwisata, kuliner dan lain-lain, di mana keunikan ini akan menjadi nilai *attractiveness* dari Indonesia dibandingkan dengan bangsa lain. China merupakan salah satu contoh negara yang saat ini bisa dikatakan mampu mempertahankan kultur dan budaya masyarakat walaupun tersebar di berbagai negara lain. Berbagai China Town menjadi etalase produk-produk China sehingga menjadi salah satu penggerak ekonomi negara China.

Merespon hal ini, sistem pendidikan nasional harus mampu mempertahankan keunikan Indonesia di tengah gempuran budaya asing. Penguatan identitas bangsa perlu diakomodasi dalam pendidikan baik dalam bentuk isi pembelajaran (misalnya nilai-nilai religius, bahasa nasional dan daerah, kewarganegaraan) maupun proses pembelajaran. Melalui media digital, keunikan ini justru ke depan akan menjadi aset berharga di tengah homogenitas masyarakat cosmopolitan dunia.

#### **b. Peningkatan wawasan kebhinekaan bangsa Indonesia**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras maupun bahasa daerah yang diikat dengan konsensus dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda namun tetap satu jua dengan 5 prinsip kebangsaan yang dinamakan Pancasila. Singkatnya, keduanya menjadi pondasi



dan pilar keberadaan negara Indonesia. Salah satu dampak era digital adalah berkembangnya media sosial yang menjadi ruang setiap individu mengeluarkan gagasan atau pendapat secara terbuka (*freedom of speech*) sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Sebagai individu hal ini merupakan bagian dari ekspresi dan aktualisasi diri di era digital.

Kebebasan ekspresi setiap orang di dunia maya yang merupakan ruang publik ini perlu kontrol kedewasaan individu dan memperhatikan keragaman masyarakat Indonesia. Hal ini untuk menghindari potensi benturan budaya, friksi dalam isu-isu sensitif SARA yang merenggangkan ikatan kebangsaan. Kesadaran bahwa gagasan atau pemikiran pikiran akan dicerna dengan *point of view* yang berbeda-beda di masyarakat Indonesia yang beragam perlu ditumbuhkan bagi setiap anak bangsa. Tanggung jawab bersama untuk merawat kebhinekaan Indonesia perlu ditanamkan sejak dini untuk menjaga NKRI.

Kesadaran akan kondisi kebhinekaan Indonesia ini harus dipupuk di setiap jenjang pendidikan baik dalam isi pembelajaran maupun proses pembelajaran yang mengakomodasi interaksi siswa dengan multi kultur. Pembentukan wawasan global harus dilengkapi dengan penguatan wawasan kebhinekaan Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat maju secara harmonis dalam lingkungan yang multi suku, agama dan ras.

### **c. Pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia**

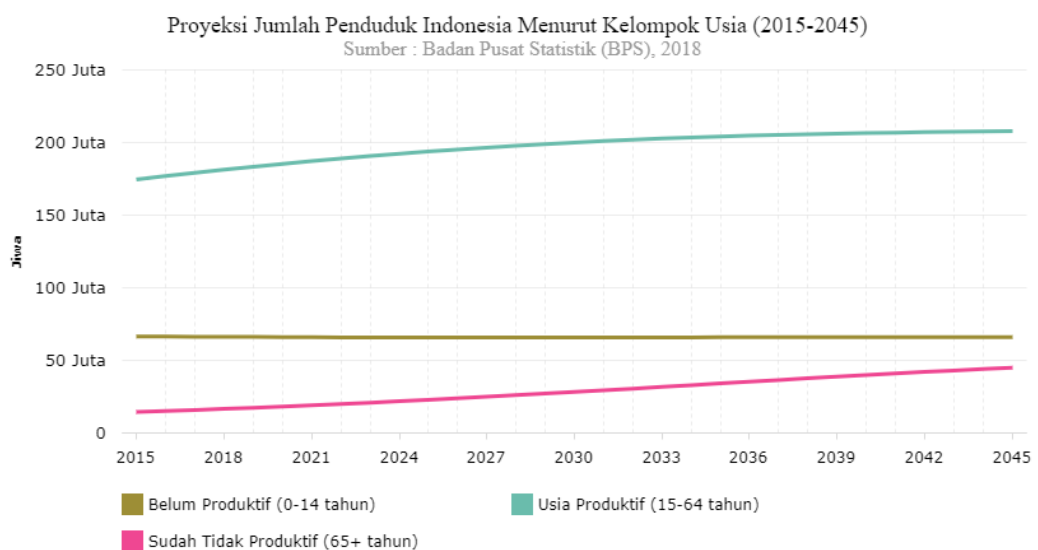
Wilayah Indonesia terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan luas area 8,3 juta km<sup>2</sup>. Hal

ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia. Sayangnya, hingga saat ini konsentrasi pendidikan berkualitas masih cenderung terpusat di pulau Jawa, di mana disparitas kualitas layanan dan sumber daya pendidikan masih sangat lebar. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa, hak akses pendidikan bermutu bagi peserta didik di seluruh wilayah Indonesia belum merata. Peserta didik di daerah terpencil misalnya, harus perlu pindah ke kota agar dapat mengakses pendidikan bermutu. Salah satu efeknya adalah bahwa untuk menempuh pendidikan bermutu diperlukan biaya yang tinggi, serta dampaknya pada kurang berhasilnya pengembangan potensi anak akibat ketidaksesuaian nilai-nilai lokal saat dia tumbuh, dengan tempat pendidikan baru di kota.

Tantangan lainnya adalah percepatan dan perluasan akses terhadap kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital, sehingga setiap anak Indonesia memiliki akses pada pendidikan, terlebih lagi akses terhadap pendidikan yang bermutu, sesuai dengan budaya dan lingkungan tempat anak tumbuh (kearifan lokal). Tantangan ini tentu juga terkait erat dengan bagaimana pemerintah membangun infrastruktur teknologi digital yang merata di seluruh tanah air. Pembangunan infrastruktur teknologi digital juga harus disertai kebijakan yang komprehensif literasi digital, agar masyarakat terutama khususnya para peserta didik mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan cerdas.

#### d. Penyiapan kompetensi sumber daya manusia menyambut bonus demografi Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018 (Statistik, 2018), pada tahun-tahun ke depan hingga tahun 2045 Indonesia diprediksi akan memiliki usia produktif yang jauh lebih besar dibandingkan dengan usia tidak produktif (Gambar 3). Di saat yang sama saat ini negara maju seperti Jepang, Eropa, dan Amerika persentase usia tidak produktif atau di atas 65 tahun semakin membesar (*ageing society*). Kondisi ini memiliki potensi dampak positif dan negatif. Jika Indonesia tidak mampu memanfaatkan bonus demografi ini maka Indonesia akan menjadi obyek atau *market* dalam ekonomi global.



**Gambar 3.**

Proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok usia

Salah satu dampak yang dirasakan dunia akibat RI 4.0 adalah melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi kapitalisme yang

semakin berkembang. Ekonomi dunia tumbuh namun di saat yang sama distribusi kapital tidak kepada pekerja karena semakin besar peran teknologi yang menggantikan peran manusia. Manyika and Chui (2014) membandingkan kota Detroit sebagai pusat industri di tahun 1990 memiliki kapital pasar dari tiga industri terbesar sebesar \$36 M dengan pendapatan \$250M dan 1.2 juta pekerja dibandingkan dengan Silicon Valley di tahun 2014 dimana tiga industry terbesarnya memiliki kapita market sebesar \$1.09 T dengan pendapatan \$247M, namun dengan pekerja yang hanya berjumlah 137,000 orang saja.

Bonus demografi Indonesia agar justeru tidak menjadi masalah sosial di masa depan, maka pemerintah harus mampu menjawab dua hal: (1) bagaimana usia produktif ini dapat disiapkan menjadi sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing global, dan (2) bagaimana menyediakan lapangan kerja. Tentu lapangan kerja yang bisa disediakan oleh pemerintah tidak akan mampu menyerap semua sumber daya manusia akibat bonus demografi. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional harus disiapkan secara sungguh-sungguh untuk mampu mencetak lulusan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di dunia kerja yang dinamis, namun juga diarahkan untuk mencetak para *entrepreneur* yang mampu menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru di masa depan untuk menyerap tenaga kerja.

## **2. Tantangan eksternal sistem pendidikan nasional di masa depan**

Revolusi Industri 4.0 dan globalisasi telah mendorong munculnya berbagai tantangan baru di dunia pendidikan Indonesia, antara lain: munculnya kebutuhan kompetensi baru di bidang teknologi dan informasi, perubahan sosial masyarakat dan dunia pasar kerja,

Selain itu, keduanya telah mendisrupsi bentuk maupun metode dalam proses pendidikan nasional.

a. Kebutuhan kompetensi baru

Aoun (2017) menegaskan bahwa ke depan orang tidak akan mampu bertahan hidup jika hanya mengandalkan kemahiran literasi baca, tulis dan hitung saja. Di dunia digital orang hidup dan bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan data (big data), konektivitas dan aliran informasi yang cepat yang diperoleh dari mengoperasikan berbagai perangkat digital. Konsekuensinya, setiap orang harus mampu untuk membaca, menganalisis dan memanfaatkan data dan informasi untuk berbagai aktivitas (literasi data), mampu mengerti prinsip dan cara kerja dari berbagai perangkat (literasi teknologi), dan mampu untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan berinteraksi sebagai manusia dalam dunia cyber (literasi manusia).

Selain itu, di era post-knowledge (Ehlers & Kellermann, 2020) saat ini, orang tidak lagi cukup untuk sekedar mendapatkan pengetahuan untuk mampu bekerja di masa mendatang, namun dari pengetahuan yang dimiliki harus mampu disintesis untuk menjadi pengetahuan baru. Secara kognitif, pengetahuan yang diperoleh harus mengarah pada higher order thinking skills (HOTS). Aoun (2017) menambahkan pentingnya kapasitas kognitif bagi setiap orang yang mencakup: (i) systems thinking, yakni kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara menyeluruh, memahami hubungan antar komponen dalam sistem secara integratif, (ii) entrepreneurship yakni memiliki pola pikir yang kreatif dalam lingkup ekonomi maupun sosial, dan (iii) cultural agility, yakni kemampuan setiap orang untuk bekerja cekatan dalam lingkungan global yang multi kultur serta mampu melihat situasi dari perperspektif budaya yang

berbeda atau bahkan bertentangan, dan (iv) critical thinking, yakni kemampuan untuk disiplin, melakukan analisis dan keputusan yang logis (*rational*).

Kompetensi baru (literasi teknologi, literasi data dan literasi manusia) dan pengembangan kapasitas kognitif anak harus ditanamkan dalam seluruh jenjang pendidikan (dasar, menengah dan tinggi). Konsekuensinya, kompetensi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan Indonesia, baik SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi, harus secara jelas dan terukur mengakomodasi penguasaan kompetensi baru di era digital tersebut.

b. Ketidakpastian pasar tenaga kerja

Pada era industri, institusi pendidikan berperan mencetak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan industri dalam rangka pertumbuhan ekonomi. *Link & match* dapat dilakukan antar-institusi pendidikan dengan lapangan kerja. Namun ke depan, hal ini menjadi semakin sulit untuk dilakukan karena dunia kerja menghadapi situasi ketidakpastian. Bahkan, bentuk pekerjaan bisa saja baru muncul pada saat anak didik lulus dari institusi pendidikan. Bisnis yang sudah berjalan mungkin saja dengan cepat melakukan perubahan orientasi bisnis untuk memenuhi permintaan pasar yang cepat berubah.

Merespons hal ini, institusi pendidikan di Indonesia perlu mengakomodasi fleksibilas kompetensi yang dihasilkan atau dengan kata lain harus mampu mencetak lulusan dengan berbagai kompetensi tambahan di luar kompetensi utamanya. Selain itu, anak didik juga harus memiliki keterampilan umum dan sikap positif dan adaptif, yang ditunjukkan antara lain dengan kemampuan: (i) learning agility, yakni kemampuan siswa untuk belajar secara cepat hal-hal yang baru dan



menerapkannya sesuai tuntutan situasi, (ii) resilience, yakni kemampuan untuk selalu bangkit dari berbagai kegagalan, dan (iii) optimism, yakni kemampuan untuk berpikir optimis dan selalu mencari hikmah dibalik semua situasi yang dihadapi.

c. Perubahan kultur sosial dan individu

Di masa depan, interaksi orang dengan perangkat digital terhubung jaringan internet semakin intensif baik untuk interaksi sosial maupun untuk menunjang pekerjaan. Akibatnya, secara individu maupun sosial, dalam masyarakat berpotensi terjadi perubahan-perubahan berikut:

Berkurangnya kemampuan untuk berempati dan bersosialisasi dalam masyarakat. Padahal dalam lingkungan global ke depan, kehidupan masyarakat Indonesia akan semakin kompleks dan penuh disrupsi sehingga kemampuan daya tahan sosial secara kolektif harus selalu dipupuk.

Potensi kecemburuan sosial karena kesenjangan yang lebar dalam ekonomi karena kapitalisme yang timbul sebagai dampak pertumbuhan teknologi yang sangat cepat. Rasa ketidakadilan sosial karena hal ini dapat dengan mudah menumbuhkan ekstrimisme.

Gesekan nilai/norma/budaya dalam masyarakat global karena hilangnya batasan sekat wilayah/negara dalam berinteraksi sosial. Kedewasaan berpikir dengan berbagai sudut pandang sosial diperlukan untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Secara individu, setiap orang dituntut melakukan pekerjaan *multi-tasking* dengan bantuan teknologi digital dengan berbagai pilihan jalur karir sesuai dengan pilihan dari orang tersebut.

Akibatnya, kematangan personal di masa depan yang antara lain ditandai dengan: (i) kemampuan mengambil keputusan secara rasional, (ii) kemampuan mengelola waktu, (iii) kemampuan menyeimbangkan pola hidup sehat, dan (iv) kemampuan untuk melakukan refleksi sangat penting untuk mendukung keberhasilan dalam karir.

Untuk mengantisipasi berbagai perubahan kultur sosial dan masyarakat di era global ke depan di atas, pendidikan di Indonesia perlu memperhatikan kompetensi siswa dalam hal berikut: (i) berinteraksi sosial dengan masyarakat lintas negara, (ii) berempati terhadap lingkungan masyarakat, (iii) bekerja sama dalam tim dengan latar belakang yang berbeda, (iv) memiliki keuletan diri (personal resilient) dalam menghadapi perubahan, dan (v) kemampuan untuk mengelola waktu (time management) dan menjaga keseimbangan pola hidup.

d. Pergeseran nilai *added-value* dari berbasis sumber daya alam ke informasi

Sumber daya alam ke depan menjadi sangat terbatas dan masyarakat dunia menjadi semakin memperhatikan aspek lingkungan untuk menjaga keseimbangan alam. Peningkatan nilai tambah dalam ekonomi tidak lagi didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam, justru sebaliknya isu lingkungan akan menjadi pembatas. Nilai tambah di masa depan diperoleh dari pengolahan data dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk mampu menghasilkan *added value* di masyarakat.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pergeseran andalan sumber daya alam ke bidang ekonomi, ditandai oleh tuntutan

kemampuan sumberdaya manusia yang unggul. Sumber daya manusia demikian, mampu memanfaatkan peranti-peranti teknologi digital dan kecerdasan buatan, bagi pengembangan kreativitas dan inovasi yang berdampak nyata bagi perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi digital misalnya, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sumberdaya manusia mampu mengelolanya dengan baik, dan masyarakat pun telah memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, termasuk dalam beraktivitas ekonomi.

e. Perubahan pola pendidikan

Tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi membawa perubahan dalam pola interaksi masyarakat dalam mendapatkan ilmu dan kompetensi. Tuntutan dunia kerja yang berbasis kompetensi menyebabkan masyarakat ke depan punya pilihan yang luas akan cara untuk mendapatkan kompetensi ini. Pendidikan non-formal maupun informal (tanpa gelar tanpa institusi) dengan berbantuan teknologi yang mampu menghasilkan kompetensi yang diinginkan oleh pengguna akan banyak diminati oleh masyarakat, termasuk mode pendidikan jarak jauh yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Rekognisi institusi pendidikan formal untuk semua jenjang pendidikan menjadi tantangan pendidikan ke depan.

## **D. Isu-Isu Global**

### **1. Hak Asasi Manusia**

Di tengah kondisi global yang terus berubahm isu hak asasi manusia (HAM) masih akan terus relevan. Termasuk dalam isu ini ialah hak seluruh warga negara untuk dapat mengakses

penyelenggaraan pendidikan yang layak, kesetaraan gender dalam pendidikan, pemahaman dan aktualisasi dalam implementasi hak-hak sipil dan politik di sebuah negara yang demokratis, serta aktualisasi implementasi hak-hak asasi dalam bidang ekonomi, dan sosial-budaya. Era digital dewasa ini, juga semakin menyadarkan pada kita semua, pentingnya perlindungan data pribadi. Itu semua ranahnya adalah perlindungan HAM.

Kualitas penyelenggaraan HAM suatu negara, akan tetap menjadi isu abadi, dan menjadi bahan evaluasi semua negara untuk mengembangkan interaksi, hubungan diplomatik antar-negara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Karenanya isu HAM masih akan menjadi salah satu isu yang berdampak pada kepercayaan suatu negara atau komunitas terhadap negara atau komunitas lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian, sehingga tidak menjadi penghambat dalam kolaborasi antar-negara. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian dalam setiap proses dan tingkatan pendidikan. Hal ini dapat segera dipahami mengingat penyelenggaraan pendidikan juga bermakna peningkatan kesadaran dan literasi atas penghormatan dan perlindungan HAM.

## **2. Eksplorasi Sumberdaya Alam berlebihan**

Keseimbangan ekosistem dunia menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bersama umat manusia seluruh dunia. Pengetahuan yang memadai terkait dengan ekplorasi sumber daya alam yang berlebihan yang berdampak pada berkurangnya pasokan sangat penting menjadi perhatian sejak usia sekolah.

Eksplorasi sumberdaya alam yang berlebihan (eksesif) telah pula memicu kecenderungan perubahan iklim secara global, yang mengancam masa depan kehidupan. Isu perubahan iklim telah menjadi perhatian global dewasa ini, ditandai antara lain meningkatnya suhu global, yang berdampak pada mencairnya es di kutub Utara dan Selatan. Ini semua memicu naiknya permukaan air laut, yang bisa berdampak menenggelamkan pulau-pulau kecil dan mempersempit daratan.

Kekurangpahaman masyarakat tentang apa itu perubahan iklim, penyebab dan dampaknya, tentu memerlukan kerja-kerja pendidikan dan sosialisasi yang intensif melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

### **3. Isu Kerusakan Lingkungan Hidup**

Melanjutkan poin sebelumnya, keberlangsungan kehidupan sangat tergantung pada daya dukung alam dan lingkungan hidup. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang mendukung kehidupan yang baik, perlu menjadi perhatian setiap orang. Lingkungan hidup yang tetap baik meskipun dieksplorasi untuk kebutuhan manusia, sangatlah penting untuk dipahami dan dilaksanakan bersama.

Kerusakan lingkungan hidup, semakin kita rasakan dampaknya, terutama ketika berbagai macam bencana alam terjadi. Bencana alam banjir dan tanah longsor di beberapa tempat di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari salah satu penyebab utamanya yakni penebangan hutan atau deforestasi yang semakin meluas. Sebagai negara rawan bencana, mengingat Indonesia berada di wilayah geografis "*ring of fire*" atau yang dilingkari cincin api, semua pihak selalu dituntut

waspada, dan tidak justru menambah beban dengan melakukan hal-hal yang dapat memicu bencana alam akibat tindakan merusak lingkungan hidup.

#### **4. Isu keamanan produk**

Saat ini produk dapat dihasilkan diberbagai negara dan didistribusikan ke banyak negara lainnya. Tingkat kepercayaan terhadap keamanan produk menjadi bagian penting dalam rantai pasokan produk antar-negara. Masyarakat Indonesia tentu perlu dilindungi dari hadirnya produk-produk (terutama makanan dan obat-obatan) yang membahayakan. Pemerintah telah mencanangkan jaminan produk halal, dan tentu saja hal ini harus disambut baik oleh masyarakat.

Di era digital ini, tentu saja isu keamanan produk atas berbagai komoditas strategis dalam perdagangan global menjadi sensitif. Manakala ditemukan produk komoditas tertentu yang tidak memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan, termasuk keamanan produk, maka tindakan penolakan akan terjadi secara cepat.

Kesadaran terkait dengan keamanan produk perlu dipupuk sejak dini. Sehingga, masyarakat tetap kritis dan objektif dalam memilih dan memilah produk yang berkualitas.

#### **5. Isu tentang konektivitas**

Kemudahan dalam komunikasi, koneksi dan mendapatkan informasi menjadi salah satu hal penting yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan Pendidikan di semua tingkatan Pendidikan. Hal ini tentu berdampak positif dalam



pengembangan SDM yang unggul. Namun demikian, masih banyak daerah atau orang yang belum dapat menikmati konektivitas ini. Diperlukan usaha yang keras, sehingga konektivitas ini tidak lagi menjadi isu yang selalu menjadi bahasan dalam berbagai pertemuan lokal dan nasional.

Kesenjangan digital itu harus segera diatasi. Pemerintah harus mampu menggerakkan segenap pemangku kepentingan, sehingga konektivitas digital di Indonesia, semakin baik dan kendala-kendala yang hadir dalam pembelajaran daring dapat diatasi. Konektivitas yang baik menjamin proses komunikasi digital, termasuk dalam pembelajaran daring, semakin baik dan berkualitas. Indonesia juga harus belajar dengan cara perbandingan antar-negara dalam hal konektivitas internet mereka, sehingga tingkat konektivitas internet di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.

## **6. Isu tentang kolaborasi**

Saat ini, tidak ada satupun organisasi atau orang yang tidak membangun kolaborasi. Kolaborasi menjadi salah satu kata kunci dalam pengembangan berbagai usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua, bagaimana guru, dosen, siswa dan mahasiswa terus dapat membangun komunikasi yang intens dan dilanjutkan dengan kolaborasi untuk berbagai bidang dalam kehidupan ini.

Pentingnya kolaborasi sekaligus menunjukkan bahwa kita hidup tidak sendirian, tetapi dengan elemen-elemen penting lain dalam masyarakat. Kemampuan untuk membangun komunikasi yang baik dan saling terbuka untuk melakukan kerjasama

untuk mengembangkan diri menjadi sangat penting. Berbagai industri berbasis digital, tidak dapat berkembang secara signifikan tanpa memahami dan mempraktikkan kolaborasi dengan yang lain. Pengembangan dunia pendidikan, juga memerlukan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), untuk memperoleh kemanfaatan yang maksimal peserta didik.

#### **E. Penutup**

Berbagai tantangan yang telah dijelaskan dalam bagian ini membawa implikasi pada bagaimana pendidikan Indonesia perlu melakukan reposisi. Orientasi pendidikan pada kompetensi global dari anak didik menjadi keharusan. Berbagai tuntutan kompetensi yang telah dijelaskan dalam bagian ini perlu disusun standarisasi untuk setiap jenjang pendidikan. Denukuan halnya dalam proses pendidikan, anak didik sejak awal harus mulai disediakan akses ke perangkat digital dengan konektivitasnya, diberikan berbagai materi penguatan keterampilan digital, dilatih untuk menggali pengetahuan dan diajari untuk selalu berfikir kritis. Dan tentu untuk mewujudkan hal ini pemerintah perlu melibatkan semua stakeholders untuk mendukung sarana dan prasarana pendidikan serta kompetensi pendidiknya.

## **BAB IV PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)**

Menyambung bab sebelumnya, Bab IV ini lebih memfokuskan pembahasannya pada problematika implementasi standar nasional pendidikan (SNP). Selain memanfaatkan berbagai literatur yang relevan, bab ini mengeksplorasi pendapat Tim Ahli dan responden pakar yang terlibat dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT/FGD), sehingga terpotret permasalahan-permasalahan yang mengemuka dalam implementasi SNP selama ini. Merumuskan problematika SNP tentu memerlukan ketelitian, mengingat satu pendapat dengan pendapat lain, seringkali tumpang tindih, sehingga perlu perumusan ulang yang lebih jelas narasinya. Dalam konteks inilah, bab ini berikhtiar untuk merumuskan berbagai problematika implementasi SNP tersebut.

### **A. Metode Perumusan Problematika**

Merumuskan problem implementasi atau pelaksanaan kebijakan dengan baik, terkait erat dengan program monitoring dan evaluasi. Karenanya, metode perumusan masalah dalam konteks bab ini adalah terkait dengan monitoring dan evaluasi kebijakan. Program monitoring dan evaluasi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik, melalui riset misalnya akan memberikan umpan balik terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sebuah kebijakan. Keperkasaan evaluasi dan monitoring berbasis-hasil sebagai perangkat manajemen publik dideskripsikan dengan jelas oleh Osborne & Osborne and Gaebler (1995) sebagai: (1) jika hasil tidak diukur, kesuksesan atau kegagalan tidak dapat diceritakan; (2) jika kesuksesan tidak diukur,

penghargaan tidak dapat diukur; (3) jika kesuksesan tidak diapresiasi, kegagalan barangkali yang diapresiasi; (4) jika kesuksesan tidak terlihat, tidak dapat belajar darinya; (5) jika kegagalan tidak dikenali, tidak dapat membetulkannya; dan (6) jika tidak dapat mendemonstrasikan hasil, kita tidak dapat mempertanggungjawabkan pada publik.

Dalam konteks ini, kegiatan diskusi kelompok terpumpun (DKT/FGD) terhadap para pemangku kepentingan dapat menjadi salah satu sarana monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sebuah kebijakan, meskipun diperlukan data-data dari sumber lain untuk memperkaya dan melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil DKT. Adapun hasil DKT yang telah dilakukan kelompok Kajian Standar Pendidikan Masa Depan dengan berbagai narasumber menghasilkan informasi yang berguna untuk merumuskan problem dalam pelaksanaan standar Pendidikan yang telah berjalan selama dua dekade sejak tahun 2000-an, sebagai pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003. Melalui kegiatan DKT tersebut, para narasumber mengemukakan masalah-masalah dan alternatif solusi atas kendala pelaksanaan standar pendidikan selama ini, sebagaimana diuraikan melalui sub-bab di bawah ini.

## **B. Lapisan dan Kelompok yang Terlibat dalam Implementasi SNP**

Sebagaimana sudah dipaparkan di sub-bab sebelumnya tentang definisi dan pentingnya sebuah standar pendidikan (Standar Nasional Pendidikan/SNP), sub-bab ini akan menguraikan beberapa kendala, problem serta tantangan yang dihadapi oleh SNP yang berlaku saat ini. Diskusi tentang masalah, kendala dan tantangan implementasi SNP yang berlaku saat ini mengacu, sebagaimana dikemukakan di atas, kepada hasil DKT dan Laporan

pemantauan beberapa SNP yang dilakukan Tim yang dibentuk BSNP tahun 2004 dan 2005.

Permasalahan pertama yang mengemuka dalam DKT, terkait persepsi dan pandangan pemangku kepentingan terhadap naskah SNP. Ketika ditanyakan kepada mereka bagaimana pandangan terhadap SNP yang berlaku sekarang, jawaban responden pakar bervariasi. Meskipun demikian, tidak seorangpun responden pakar menganggap naskah SNP sekarang sudah memadai (DKT I dan II).

Selain pandangan terhadap naskah SNP, pada bagian ini juga akan diuraikan problem, kendala, dan tantangan implementasi SNP yang lain: seperti masalah yang berkaitan dengan berbagai lembaga dan sistem tata kelola yang terlibat dalam implementasi SNP ini seperti direktorat teknis, pengembang kurikulum, BAN SM, LPTK, di satu lapisan. Pada lapisan lainnya, terdapat yayasan, ormas, orangtua, siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Merujuk konstitusi, sebenarnya alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah dengan gamblang menjelaskan tentang salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia yaitu untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan “mencerdaskan kehidupan bangsa” mengandung makna yang dalam dan memiliki spektrum yang luas, yakni mengembangkan semua aspek dari potensi kemanusiaan anak bangsa, meliputi: kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual dan yang lainnya. Karenanya, menjadi jelas bahwa yang menjadi target dari SNP adalah seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali (DKT I).

Jika kita berbicara anak bangsa, pada kenyataannya, mereka tersebar di wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merouke, dengan tingkat kehidupan sosial, budaya dan ekonomi yang sangat

beragam. Bahkan, terkadang tingkat kemajuan daerahnya yang juga sangat jauh, di satu pihak mereka yang tinggal di kota besar dengan berbagai fasilitas modern dan canggih, tetapi di pihak lain mereka yang tinggal di daerah yang sangat terpencil yang untuk sampai ke sekolah saja harus berjalan kaki puluhan km bahkan harus menyebrangi sungai yang tidak ada jembatannya.

Dengan mempertimbangkan yang menjadi target SNP, betapa tidak mudah untuk mengimplementasikan SNP secara adil dan merata. Belum lagi jika dikaitkan berbagai sikap mental yang kurang terpuji pada sebagian para pemangku kepentingan yang terkait dengan SNP ini. Sikap mental kurang terpuji ini seperti terjadi ketika masih diberlakukan Ujian Nasional (UN). Tidak sedikit para pemangku kepentingan memberi contoh ketidak-jujuran mulai dari menginstruksikan sekolah untuk membantu siswanya yang mengikuti UN, sampai pada para pendidik yang sengaja mendiktekan jawaban pada siswanya yang sedang menempuh UN. Sikap tidak jujur seperti ini menurut narasumber DKT “sangat kontraproduktif dengan tujuan pendidikan dalam menciptakan manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia, dan menyebabkan anak Indonesia yang menjadi target SNP ini kehilangan *role model* yang bisa mereka ikuti”.

Amanat konstitusi di atas, kita bisa temukan penjabarannya dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), khususnya pada Pasal 35 yang mengatur tentang perlunya Standar Nasional Pendidikan atau SNP. (UU Sisdiknas, 2003). Dijelaskan dalam UU Sisdiknas tersebut bahwa SNP yang dimaksud terdiri atas: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar



sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap delapan standar pendidikan tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa aspek-aspek yang distandarkan semuanya berkaitan dengan aspek-aspek yang diperlukan untuk terciptanya sebuah pendidikan yang berkualitas (DKT.I). Selanjutnya, dalam konteks operasionalisasinya, standar-standar ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Untuk melihat sejauhmana standar-standar ini efektif, dalam Pasal 35 UU Sisdiknas diatur juga bahwa pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Secara lebih terperinci tentang standar ini diamanatkan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Dua tahun kemudian terbit Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP sebagai pemenuhan amanat Pasal 35.

### **C. Tata Kelola dalam Implementasi SNP**

SNP sebagai sebuah dokumen tentu memuat substansi nilai-nilai pendidikan yang positif dan ideal. Namun demikian, semua nilai kebaikan ini tidak sertamerta menjadi positif dalam implementasinya. Banyak pihak yang terlibat dalam perjalanan implementasi SNP untuk sampai pada sasaran berupa kualitas pendidikan yang baik sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi lulusan. Tata kelola implementasi SNP ini terdiri dari dua lapisan dengan 18 tahapan serta para pihak yang terlibat dalam setiap tahapannya. SNP sebagai sebuah dokumen sebenarnya bermakna netral, tergantung bagaimana pihak yang terlibat

memaknai dan mengimplementasikannya. Aspek lapisan tata kelola pertama yang bersentuhan langsung dengan SNP adalah Direktorat Teknis yang membawahi Pendidikan Dasar dan Menengah. Masing-masing Direktorat ini membentuk Tim Pengembang Kurikulum yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan kurikulum.

Sejauh mana pihak pengembang kurikulum ini memahami, menghayati, dan menerjemahkan standar pendidikan serta mensosialisasikan kurikulumnya sangat berpengaruh pada berhasil tidaknya SNP di lapangan. Meskipun dalam DKT tidak ada narasumber yang secara khusus menyoroti masalah ini, namun dalam diskusi Tim Ahli hal ini kerap muncul. Pernyataan yang secara langsung mengomentari peran Badan Pengembang Kurikulum ini berupa kritikan terhadap Tim Pengembang Kurikulum yang belum sepenuhnya dapat menyerap makna standar yang diacu, serta kurangnya sosialisasi kurikulum kepada para kepala sekolah dan pendidik. Hal ini dapat dipahami sebagai masalah pengembang kurikulum yang belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kebijakan tentang kurikulum berkaitan dengan tahapan berikutnya, yaitu kebijakan pembelajaran serta kebijakan asesmen. Sejauh mana semua kebijakan ini efektif. Di lapangan, masih terdapat banyak sekolah yang belum dapat memahami sepenuhnya implementasi kurikulum yang berlaku. Masalah tersebut dapat mengakibatkan kebijakan pembelajaran dan asesmen menjadi terkendala.

Masalah pada kebijakan kurikulum, pembelajaran dan asesmen tidak berhenti sampai di situ. Tahap berikutnya adalah tahap dimana pihak BAN SM menerjemahkan standar ini ke dalam instrumen penilaiannya. Ketika satuan pendidikan tidak mampu menerjemahkan SNP dalam praktik pendidikannya karena sosialisai kurikulum tidak sampai pada mereka, maka hasil

penilaian BAN SM-nya menjadi tidak sesuai standar. Peran BAN SM dalam melakukan proses asesmen juga mendapat sorotan dari para narasumber DKT dan tim Ahli. BAN SM yang seharusnya mengarahkan asesmen dengan membimbing satuan pendidikan menjadi sekolah berkualitas melalui masukan yang konstruktif, malah tidak sedikit asesornya yang mencari kesalahan saja (DKT I dan II).

Pihak yang ada dalam tahap selanjutnya adalah LPTK. Masalah LPTK banyak mengemuka dalam DKT terkait kualitas guru yang dihasilkannya. Guru sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam implementasi standar pendidikan banyak mendapat sorotan. Salah satunya karena kualitas LPTK yang kurang memadai. Komentar miring terutama diarahkan pada LPTK yang bertujuan mencetak guru sebanyak-banyaknya, namun tidak disertai dengan kualitas pendidikannya. Bahkan ada seorang narasumber DKT yang mengkritik LPTK sebagai lembaga yang tidak sepenuhnya membekali mahasiswanya dengan keilmuan terkait pendidikan seperti Didaktik dan Paedagogik, melainkan hanya mencetak mahasiswanya jadi fasilitator saja (DKT I).

Setelah lapisan tata kelola, lapisan selanjutnya yang terkait langsung dengan SNP adalah lapisan sosialisasi dan implementasi pada level satuan pendidikan. Perlu diketahui, lapisan satuan pendidikan ini adalah objek sekaligus subjek dari SNP. Banyak pihak yang terlibat dalam level satuan pendidikan, di antaranya pihak sekolah sendiri, guru, siswa, orang tua siswa, yayasan, sampai organisasi massa tertentu. Semua pihak di sini ikut berperan dalam menentukan sukses tidaknya implementasi SNP pada satuan pendidikan.

Di antara para pihak tersebut, yang paling banyak menjadi sorotan peserta DKT adalah guru. Guru dipandang oleh para narasumber DKT dan tim ahli sebagai salah satu penentu kualitas pendidikan yang diterima siswa. Keluhan tentang guru yang kurang memahami metode maupun konten yang diajarkannya merata di setiap DKT. Bahkan tim ahli dari kalangan praktisi pendidikan daerah pun berulang kali menggarisbawahi masalah ini. Intinya, kualitas pendidik alias guru sangat mendesak untuk diperbaiki. Problem kualitas pendidik ini pula yang dianggap berkontribusi terhadap tidak terlaksananya SNP di lapangan dengan baik (DKT I dan II). Pihak lain seperti Yayasan, Ormas dan Pemda banyak disorot terkait dengan tanggung jawabnya dalam menyediakan sarana dan prasarana serta pembiayaan pendidikan. Standar-standar yang disebut terakhir juga dipandang cukup parah implementasinya di lapangan. Sementara sekolah yang direpresentasikan oleh kepala sekolahnya mendapat sorotan karena kurang kreatif dalam memecahkan masalah satuan pendidikan yang dipimpinnya, termasuk dalam mengatasi masalah pembiayaan (DKT I dan II).

#### **D. Problem lain terkait Implementasi SNP**

Meskipun sebagian besar responden beranggapan bahwa SNP yang berlaku sekarang sudah baik, mereka mengakui masih ditemukan banyak kesulitan dalam implementasinya. Salah seorang responden bahkan beranggapan 8 standar nasional pendidikan wajib dikonstruksi ulang karena bahasa yang digunakan sulit dipahami (DKT II). Menurut salah seorang dari mereka, SNP sebaiknya fokus, tajam, mendasar, dan sederhana sehingga mudah digunakan oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi, tidak seperti SNP sekarang yang uraiannya bertele-tele (DKT

II). Bahasa SNP dirasa sulit dipahami dan memiliki indikator kerja terlalu banyak. SNP yang ada sekarang itu sulit untuk dilaksanakan karena standar terlalu melebar dan tidak setara satu sama lain. Jika terlalu melebar, maka menjadi kurang fokus. Bahasa standar perlu diturunkan ke bahasa yang mudah dipahami. Bahasa standar sulit dipahami pelaksana, terlalu kompleks, luas, generik, dan kurang substantif (DKT II).

Permasalahan bahasa dalam naskah SNP ini muncul juga dalam hasil Pemantauan Implementasi SKL dan SI di Sekolah Dasar dan Menengah tahun 2015. Secara lengkap hasil pemantauan tersebut, sebagai berikut: (a) SKL dan SI sudah tercapai baik, namun masih perlu dilakukan peningkatan secara optimal mengenai kompetensi sikap dan dimensi metakognisi; (b) Ketercapaian SKL atau kelulusan tidak hanya ditentukan oleh nilai UN, melainkan perlu uji kompetensi siswa untuk mengetahui pencapaian SKL dan SI; (c) Bahasa SKL dan SI terlalu umum sehingga perlu dirumuskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami (Hasil Pemantauan SKL dan SI, 2015). Poin c pada ketercapaian SKL dan SI tersebut menunjukkan masalah terkait bahasa yang digunakan dalam naskah SNP.

Di samping permasalahan bahasa, SNP yang berlaku sekarang juga mengandung masalah lain seperti implementasi standar yang belum nampak atau merata seluruhnya. Masih ditemukan rendahnya layanan pendidikan serta krisis moral dan karakter. Siapa mengerjakan apa belum berjalan dengan baik. Bahkan ada kecenderungan di mana yang harus baik hanya siswanya sebagai sasaran standar, tapi tidak diberi contoh bagaimana menjadi baik. Tidak ada *role model*, yang ada malah keadaan kontraproduktif (DKT II). Menanggapi sulitnya satuan pendidikan dalam mengimplementasikan standar, seorang responden

menyarankan bahwa standar tidak perlu diberlakukan sekaligus jika sulit, namun bisa bertahap dalam jangka 5 tahun. Begitu pula jika ada daerah yang karena satu dan lain hal belum bisa menerapkan ini, maka daerah bisa membuat atau mengusahakan pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kesenjangan yang terjadi antara dokumen dengan realitas ini sangat bergantung pada kesiapan SDM, sarana prasarana, pembiayaan, dan lain sebagainya (DKT II).

Masalah lain mengenai implementasi SNP adalah terkait disparitas. Kondisi negara Indonesia yang memiliki tingkat disparitas sangat tinggi menjadi tantangan tersendiri. Masalah disparitas ini membentang mulai dari masalah SDM, sarana prasarana, SKL, standar isi, proses, bahkan sampai penilaian. Salah satu contohnya, SKL itu sudah ideal, tapi yang terjadi di lapangan sebaliknya. Di satu pihak, kompetensi inti terkait sikap, tata nilai, dan karakter sudah sangat ideal. Namun, orang yang mengimplementasikannya tidak berkarakter (DKT I).

Meskipun di atas disebutkan bahwa naskah SNP-nya sendiri bermasalah, tetapi problem terbesar ada pada implementasinya. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinergi antar lembaga, tidak ada pembagian kewenangan antara pusat, daerah, dan satuan pendidikan, serta tidak adanya konsistensi antara standar (sikap) yang ingin diciptakan dengan perilaku para pihak yang punya otoritas. Contoh konkret: Ketidakjujuran yang terjadi dalam pelaksanaan UAN dikarenakan *conflict of interest* dari pemegang otoritas sendiri (DKT I). Mempertegas permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan terkait pelaksanaan SNP, banyak kesulitan yang dihadapi satuan pendidikan, mulai dari pemahaman SNP yang tidak sederhana, sampai pada ketidakersediaan input (sarana



prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, biaya, dan lain-lain) yang sangat menghambat implementasi SNP.

Sementara, sebenarnya semua itu (*input*) bukan menjadi tanggung jawab dan wewenangnya. Apalagi adanya keterpisahan antar-penanggungjawab setiap aspek, seperti penanggungjawab kurikulum dan asesmen yang semestinya menjadi satu kesatuan lembaga profesional (DKT II). Permasalahan lain yang ditemukan ketika satuan pendidikan berusaha melaksanakan SNP, antara lain kondisi daerah yang sangat variatif dalam hal kesiapan sarana prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, juga pembiayaan. Rumusan standar pendidik belum selaras dengan peraturan lain, misalnya tupoksi pengawas sekolah. Rumusan standar pembiayaan juga belum jelas, seperti unit *cost* tidak dihitung sehingga saat Pilkada rawan dipolitisasi (DKT II).

Terkait variasi kemampuan daerah ini hendaknya difasilitasi pemerintah dengan kebijakan yang lebih adil agar standar tidak menjadi beban. Variasi kemampuan daerah atau lembaga tersebut perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, hendaknya ada kebijakan di masing-masing wilayah untuk mengukur kemampuannya sehingga tidak segan menurunkan standar untuk wilayah tertentu. SNP hendaknya secara substansi terjaga, tetapi implementasinya fleksibel. Oleh karena itu, indikator-indikatornya dibuat tidak terlalu kaku agar bisa menjadi inspirasi untuk pendidikan yang lebih baik (DKT II).

Selain permasalahan yang sifatnya umum di atas, pada tahun 2014 pernah dibentuk tim yang melakukan evaluasi pencapaian SNP untuk standar pendidik, sarana prasarana dan pembiayaan. Hasil dari evaluasi tersebut dipaparkan pada uraian di bawah ini

(Hasil Pemantauan SKL dan SI, 2015). Hasil evaluasi terhadap pencapaian standar kompetensi pendidik menunjukkan bahwa ada kompetensi esensial pedagogik dan kompetensi profesional yang sebagian sudah tercapai dan belum tercapai. Pada kompetensi pedagogik, kompetensi esensial yang belum tercapai adalah penggunaan TIK dan media dalam pembelajaran. Tidak tercapainya standar dalam penggunaan TIK dan media pembelajaran diduga karena rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan TIK atau kurangnya fasilitas yang dimiliki sekolah. Pada kompetensi profesional, kompetensi esensial yang paling rendah tingkat pencapaiannya adalah pelaksanaan penelitian tindakan kelas, penguasaan kurikulum yang berlaku (khususnya kurikulum 2013) dan pengembangan bahan ajar. Rendahnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas diperkirakan karena standarnya terlalu tinggi atau ketentuan Dinas Pendidikan yang terlampaui sulit. Sementara untuk kompetensi kepribadian dan sosial umumnya telah tercapai.

Hasil evaluasi pencapaian sarana prasarana menunjukkan pemenuhan standar sarana berupa ruang kelas yang berada pada kategori sangat kurang adalah aspek kepemilikan satu meja per siswa, lemari, dan rak hasil karya peserta didik. Sedangkan yang berada pada kategori kurang adalah kepemilikan satu kursi per siswa dan papan pajang. Pemenuhan standar sarana ruang kelas oleh satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA relatif berbeda pada aspek kepemilikan: satu kursi per siswa, satu meja per siswa, dan papan pajang. Kemudian, pemenuhan standar sarana ruang perpustakaan yang berada pada kategori sangat kurang adalah aspek kepemilikan semua buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, dan buku pengayaan. Sementara yang berada pada kategori kurang adalah aspek kepemilikan komputer dan

akses internet. Pemenuhan standar sarana ruang laboratorium bahasa SMA/MA berada pada kategori kurang untuk semua aspek. Sementara pemenuhan standar sarana tempat bermain yang berada pada kategori sangat kurang adalah aspek ketersediaan alat berolahraga, sedangkan yang berada pada kategori kurang adalah aspek ketersediaan peralatan seni budaya dan keterampilan.

Terkait pemenuhan standar sarana tempat bermain/berolahraga oleh satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA relatif tidak berbeda. Pencapaian standar sarana dan prasarana berbeda menurut jenis, akreditasi, dan status sekolah. Pada jenjang SD/MI, perbedaan pemenuhan aspek standar sarana pada kategori akreditasi sekolah paling besar dibandingkan dengan kategori jenis dan status sekolah. Pemenuhan aspek standar sarana dan prasarana relatif tidak berbeda antara sekolah dan madrasah serta antara sekolah/madrasah negeri dan swasta. Namun perbedaan ditemukan jika dikaitkan dengan tingkat akreditasi yang diperolehnya. Secara umum, pencapaian sarana prasarana untuk satuan pendidikan yang sudah terakreditasi A lebih baik dari yang belum A.

Kemudian untuk ketercapaian standar pembiayaan hasilnya adalah lebih dari separuh SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Prodi IPS dan Prodi IPA telah mampu memenuhi dan berada di atas standar nilai nominal atau besaran jumlah biaya operasional non personalia sesuai standar Permendiknas Nomor 69 tahun 2009. Hanya SMA/MA Prodi Bahasa yang lebih dari separuh tidak dapat memenuhi standar. Satuan pendidikan SD/MI lebih dari separuhnya telah mampu memenuhi dan berada di atas standar nilai nominal atau besaran jumlah biaya operasional non personalia sesuai standar Permendiknas Nomor 69 tahun 2009. Namun,

capaian ini hanya diraih oleh SD/MI yang status akreditasinya A. Sementara yang terakreditasi B dan C lebih dari separuh masih belum mampu memenuhi standar.

Satuan pendidikan SMP/MTs lebih dari separuhnya telah mampu memenuhi dan berada di atas standar nilai nominal atau besaran jumlah biaya operasional non personalia sesuai standar Permendiknas Nomor 69 tahun 2009. Sebagaimana di tingkat dasar, apabila dilihat dari nilai status akreditasinya, baru SMP/MTs terakreditasi A dan B yang lebih dari separuhnya telah mampu memenuhi dan berada di atas standar, sedangkan lebih separuh yang terakreditasi C masih berada di bawah standar. Satuan pendidikan SMA/MA Prodi Bahasa separuhnya belum mampu memenuhi standar nilai nominal atau besaran jumlah biaya operasional non personalia sesuai standar yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 69 tahun 2009. Apabila dilihat dari status akreditasinya, baru separuh SMA/MA Prodi Bahasa terakreditasi A yang mampu memenuhi dan berada di atas standar. Sedangkan lebih dari separuh yang terakreditasi B dan C masih berada di bawah standar.

Satuan pendidikan SMA/MA Prodi IPS lebih dari separuhnya telah mampu memenuhi dan berada di atas standar nilai nominal atau besaran jumlah biaya operasional non personalia sesuai standar Permendiknas Nomor 69 tahun 2009. Apabila dilihat dari nilai status akreditasinya, lebih dari separuh SMA/MA Prodi IPS terakreditasi A telah mampu memenuhi dan berada di atas standar. Sementara yang terakreditasi B dan C lebih separuhnya masih berada di bawah standar. Pada satuan pendidikan SMA/MA Prodi IPA, lebih dari separuhnya telah mampu memenuhi dan berada di atas standar nilai nominal atau besaran jumlah biaya operasional non personalia sesuai standar Permendiknas Nomor 69 tahun

2009. Apabila dilihat dari status akreditasinya, baru SMA/MA Prodi IPA terakreditasi A yang lebih separuhnya telah mampu memenuhi dan berada di atas standar, sedangkan yang terakreditasi B dan C masih lebih separuh berada di bawah standar. Dibanding tahun 2012, penerapan standar biaya tahun 2014 terdapat peningkatan yang cukup berarti dalam pemenuhan jumlah biaya operasional non personalia sesuai Permendiknas Nomor 69 tahun 2009. Hal ini diikuti dengan peningkatan pemenuhan standar biaya yang sangat berarti untuk sekolah terakreditasi A dan peningkatan yang beragam untuk yang terakreditasi.

Masih terkait dengan problem sarana prasarana dan pembiayaan ini, diperoleh data dari Tim Ahli yang menjadi praktisi pendidikan sebagai berikut: Kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam UU Sisdiknas Bab IV pasal 11 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun

Kewajiban pemerintah daerah dipertegas dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan desentralisasi pendidikan merupakan salah satu bagian dalam implementasi desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan azas desentralisasi sedangkan bidang pendidikan adalah salah

satu urusan wajib yang harus dilaksanakan di daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desentralisasi pendidikan dalam pelaksanaannya lebih ditekankan dalam hal pendanaan atas pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBD yang ditetapkan setiap tahunnya. Ketetapan ini merupakan komitmen politik dari pemerintah (negara) agar pemerintah daerah berusaha optimal untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun dalam implementasinya hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia belum mampu memenuhi amanah UU tersebut karena ketidakmampuan sumber keuangan daerah (PAD). Oleh karenanya, desentralisasi pendidikan di Indonesia tidak mampu diselenggarakan dengan mengandalkan kemampuan APBD. Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kabupaten/kota terkait penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, terutama kesiapan alokasi pendanaan dalam APBD yang mengharuskan memenuhi angka 20%. Dengan demikian, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Berbagai masalah dan tantangan implementasi SNP masa kini terkait peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat antara lain: kewenangan pemenuhan 4 standar, antara lain : (a) standar pembiayaan : 1. Amanat UU keharusan 20% alokasi dana untuk pendidikan belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah daerah; 2. Dihapusnya BOS Daerah; (b) standar sarana dan prasarana: 1.



Terdapat tumpang tindih pemberian bantuan pemenuhan sarana dan prasarana baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 2. Belum maksimalnya kontribusi pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana prasarana di satuan pendidikan; 3. Belum meratanya pemberian bantuan pemenuhan sarana dan prasarana di Pendidikan; 4. Kurangnya pengawasan terhadap aset satuan pendidikan khususnya di satuan pendidikan negeri; 5. Belum ada Tim Analisis kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan sehingga pemberian bantuan banyak yang tumpang tindih.

Selanjutnya, (c) pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan : 1. Pengangkatan kepala sekolah belum memenuhi standar dari pemerintah pusat sehingga berdampak pada satuan pendidikan; 2. Belum ada kebijakan pemerataan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; 3. Kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Berbagai permasalahan pembiayaan di atas masih diperparah dengan masih banyaknya pendidik baik di Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah yang belum mendapatkan gaji yang memadai. Bahkan apa yang mereka peroleh perbulannya masih di kisaran 20 US dolar. Sungguh satu nominal yang jauh dari pantas untuk suatu tugas mulia mencerdaskan anak bangsa.

Implementasi Standar Pendidikan Masa Kini dapat terselenggara secara maksimal jika semua pihak pemangku kepentingan dapat menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Semua masalah dan tantangan dapat teratasi jika semua pihak memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban serta mampu bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan

pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang serta visi dan misi pendidikan nasional.

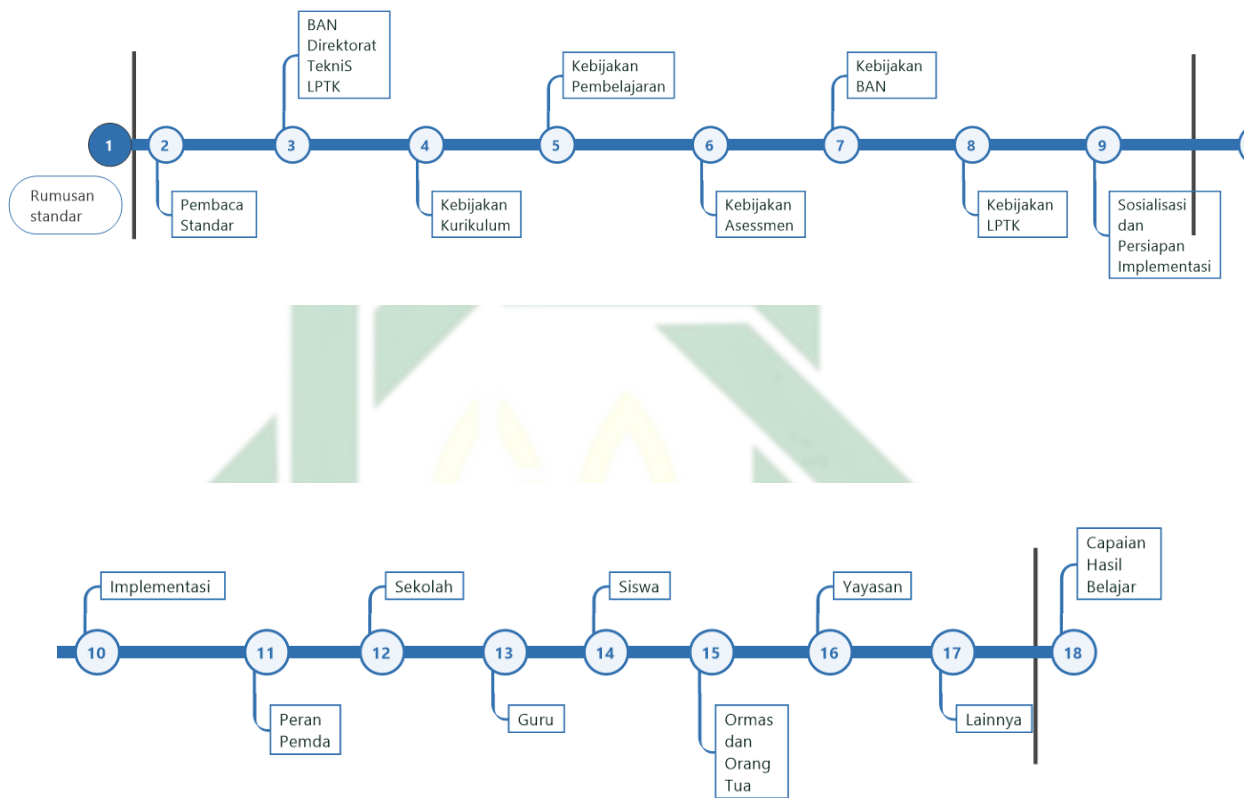
#### **E. Bagan Arus (*Flow Chart*) Implementasi SNP**

Membangun ketersinambungan sebuah program setelah intervensi berakhir dapat menjadi sebagai proses politik dibandingkan proses teknis (Kusek & Rist, 2004) dalam Cooper et al. (2004). Jika standar dapat dianalogikan sebagai sebuah intervensi kebijakan bagi peningkatan kualitas Pendidikan, rumusan standar yang ditetapkan akan ditindaklanjuti melalui tata kelola pelaksanaan berupa pilihan-pilihan kebijakan yang banyak dipengaruhi berbagai faktor, termasuk berbagai perspektif yang dianut pemerintah saat kepemimpinannya.

Sebagai contoh, pelaksanaan standar pendidikan sebagai amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah banyak diterbitkan berbagai peraturannya. Untuk standar nasional, Peraturan Pemerintah yang terbit adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah; (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penerapan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Gambar di bawah ini menunjukkan garis besar pembaca pertama terjadinya interaksi antara standar pendidikan dan implementator yang akan merumuskan standar menjadi kebijakan-kebijakan teknis. Tata kelola pada tingkat ini menjadi penentu

pertama arah standar pendidikan yang dimaknai dalam sistem pendidikan.



**Gambar 4.**

Tata Kelola Sistem Pendidikan

Jika dilihat dari gambar di atas, unit yang paling berinteraksi langsung pada rumusan standar sebetulnya berada pada level kesatu, mulai dari nomor 3 sampai dengan nomor 8. Pada unit-unit tersebut, rumusan standar diolah dan diinterpretasi berdasarkan berbagai perspektif dan kepentingan pengambil keputusan saat itu, termasuk aspek-aspek perspektif pengambil kebijakan yang banyak dipengaruhi oleh kecenderungan aliran sistem pendidikan, praktik keberhasilan negara lain, politik, dan sosial, bahkan budaya dan

keagamaan. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan istilah “ganti menteri ganti kurikulum”. Pada titik inilah rumusan standar berada pada perumusan kebijakan yang bersifat teknis implementatif dan menemukan justifikasi yang menguatkan pemilihan model implementasi standar pendidikan. Pada tingkatan ini, sistem pendidikan merumuskan standar yang akan menjadi kebijakan, sementara sistem pendidikan yang akan mengimplementasikan secara tersentralisasi, terdesentralisasi, atau gabungan keduanya (termasuk ketebalan dan keluasan materi standar sebagai pilihan-pilihan kebijakan). Pengambilan kebijakan pada tataran ini menjadi penentu arah dan model implementasi dari rumusan standar.

#### **F. Tantangan Implementasi Standar Pendidikan**

Empat kerangka konseptual dalam rangka memahami keberhasilan implementasi kebijakan dalam Pendidikan: dimensi normatif, dimensi struktural, dimensi konstitutif, dan dimensi teknis, dimana etika dan keadilan sosial perlu mendapatkan tempatnya Cooper et al. (2004). Jika keempat dimensi tersebut terpenuhi dengan baik, niscaya implementasi kebijakan Pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan goal yang ingin dicapai. Berbagai hasil penelitian berikut menjelaskan tentang kegagalan implementasi sebuah kebijakan yang meliputi berbagai aspek. Hasil kajian dan penelitian yang dikutip dari Cooper et al. (2004) menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi proses implementasi kebijakan pendidikan yang dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*), termasuk kebijakan standar pendidikan.

Implementasi kebijakan terhadap inisiatif baru (standar) menjadi titik kritis dalam ekosistem pendidikan. Beberapa cendekiawan telah menunjukkan kesulitan menyusun kebijakan

pendidikan yang koheren di tingkat daerah dan nasional dalam sistem, di mana kekuasaan dan otoritas didesentralisasikan. Smith dan O'Day menegaskan bahwa "hambatan mendasar untuk mengembangkan dan mempertahankan sekolah yang sukses adalah sistem kebijakan pendidikan yang terfragmentasi, kompleks, dan berlapis-lapis" (Cooper et al., 2004). Aturan dilanggar di sekolah, tetapi sering tidak terdeteksi karena sekolah merupakan bentuk organisasi yang longgar terhadap sistem *monitoring* dan evaluasi, apalagi sering terjadi implementasi kebijakan yang tidak merata (Meyer & Rowan, 1977). Pekerjaan guru dan administrator "secara intrinsik tidak diperiksa dan tidak dievaluasi. Jika dievaluasi pun, hal itu jarang dilakukan atau dengan cara yang asal-asalan" (Weick, 1976).

Terlalu sering pembuat kebijakan berasumsi bahwa tujuan dan sasaran suatu kebijakan telah diketahui oleh semua orang, di mana setiap orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta bahwa implementasi hanyalah masalah pelaksanaan mandat administratif. Namun, seperti yang ditemukan Madsen dalam studinya tentang implementasi reformasi pendidikan di tingkat negara bagian, tenaga kependidikan jarang memahami dan sering meremehkan peran penting yang dimainkan administrator lokal dalam implementasi kebijakan. Masalah ini terjadi di semua tingkat pemerintahan. Sebagaimana dibuktikan oleh terputusnya hubungan dan kesalahpahaman antara administrator lokal (situs) dan administrator distrik, pelaksana negara bagian dan lokal, serta administrator federal, negara bagian, dan lokal. Seperti yang ditunjukkan oleh Madsen, ketidakpercayaan dan kecurigaan sering berkembang di antara administrator di berbagai tingkat pemerintahan yang bertanggungjawab atas implementasi

kebijakan, terutama ketika administrator lokal menjadi frustrasi dengan kurangnya arahan yang diberikan oleh pejabat negara (Cooper et al., 2004).

Seperti yang disimpulkan McLaughlin, "sangat sulit bagi kebijakan untuk mengubah praktik, terutama di seluruh tingkat pemerintahan", terutama ketika berbagai aktor tidak sepenuhnya berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan. Di lain pihak, ada kecenderungan di antara peneliti dan praktisi untuk memperlakukan pelaksana lokal sebagai kelompok yang monolitik dan bersatu. Padahal pada kenyataannya terdapat perbedaan yang signifikan di antara pelaksana di tingkat lokal. Madsen menyebutkan ketidaksepakatan antara administrator di tingkat kabupaten sebagai penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan (Cooper et al., 2004).

### **G. Implementasi Kebijakan yang Berhasil**

Implementasi kebijakan yang berhasil menjadi tantangan setiap inisiatif kebijakan baru (termasuk standar pendidikan). Keseriusan dalam mengidentifikasi aspek penting yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan akan menentukan tingkat keberhasilan inisiatif pembaruan, termasuk implementasi kebijakan standar Pendidikan. *Pertama*, dimensi normatif. Tujuan dan kebijakan program harus jelas dan disetujui oleh semua kelompok pemangku kepentingan utama. Idealnya, konsensus nilai harus dicapai oleh semua pemangku kepentingan utama meliputi mereka yang menyusun kebijakan dan mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya.

Menurut Madsen dan Pressman & Wildavsky, mencapai konsensus pada tujuan program mungkin memakan waktu



beberapa tahun. Pengambil keputusan lokal perlu memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Mereka harus mewujudkannya dan bekerja sama dengan peserta lain untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik yang mungkin ada. Larsen menyebutnya sebagai pembenaran normatif. Agar suatu program atau kebijakan menjadi efektif, baik mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan maupun mereka yang terkena dampak harus sepakat dengan tujuan program (Cooper et al., 2004).

*Kedua*, dimensi struktural. Masalah yang ingin diatasi oleh program atau kebijakan harus dapat dipecahkan. Sabatier dan Mazmanian mengingatkan bahwa "ketika benar-benar terlepas dari kesulitan yang secara universal terkait dengan pelaksanaan program-program pemerintah, beberapa masalah sosial jauh lebih mudah untuk ditangani daripada yang lain" (Randall et al., 2004). Seperti yang diamati (Bandach, 1977), "Setiap program sosial yang layak memiliki kebijakan pemerintah mungkin akan menjadi masalah yang serius dan rumit, oleh karena itu tidak dapat diselesaikan dengan mudah atau diperbaiki". Tantangan yang bisa dikategorikan dimensi struktural dalam konteks Indonesia mengemuka dalam DKT I, dimana salah seorang narasumber berpendapat bahwa menurutnya "SNP yang ada selama ini belum mendarat pada eksekutor di lapangan dan banyak kendala, salah satunya budaya struktural masih membelenggu teman-teman regulator baik ditingkat Pusat dan Daerah".

*Ketiga*, dimensi konstituen. McLaughlin dalam mengamati, "implementasi yang efektif membutuhkan keseimbangan strategis antara tekanan dan dukungan". *Pressure* membantu memusatkan perhatian pada inisiatif kebijakan baru, memberikan legitimasi pada upaya reformasi, dan menawarkan perlindungan melalui

aturan dan mandat. Dukungan yang memadai sangat penting untuk keberhasilan implementasi (Cooper et al. (2004).

*Keempat*, dimensi Teknis. Pembuat keputusan lokal harus memiliki kapasitas untuk melaksanakan inisiatif kebijakan baru yang diusulkan. Ini termasuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan profesional yang memadai, ditambah dengan pendanaan, materi, sumberdaya, dan pengaturan organisasi yang sesuai yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif pembaruan (standar).

#### **H. Tantangan Implementasi SNP di Indonesia**

Terdapat berbagai pendapat yang mengemuka dalam DKT maupun diskusi Tim Ahli tentang tantangan implementasi SNP yang berlaku sekarang ini. Tantangan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai aspek geografis, sosial ekonomi, politik, budaya, agama, hingga daerah bencana.

Aspek geografis yang paling utama adalah terkait aksesibilitas dari pendidikan. Indonesia merupakan negara kepulauan (maritim) terbesar di dunia memiliki ribuan pulau, baik pulau besar maupun kecil dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua). Realitas geografis ini, merupakan tantangan tersendiri dalam implementasi SNP. Penduduk yang tinggal menyebar di berbagai pulau tersebut bukan hal yang mudah untuk bisa dijangkau layanan pendidikan. Dalam konteks tantangan aksesibilitas ini, masalah daya tampung satuan pendidikan masih menjadi masalah serius (DKT II). Meski sudah ada usaha-usaha dan intervensi pemerintah untuk mendirikan sekolah dan pengirim pendidik ke daerah-daerah yang terpencil dengan berbagai kompensasinya (seperti tunjangan khusus dan yang lain), tetap saja belum bisa melayani secara merata seluruh

penduduk yang membutuhkan pendidikan. Hal ini diperparah lagi dengan masih sangat langkanya sarana transportasi menuju pulau-pulau terluar. Tantangan aksesibilitas ini mencuat juga dalam DKT, di mana seorang narasumber mengatakan, “Yang paling penting anak Indonesia dapat menggunakan haknya, diterima dalam sistem pendidikan. Haknya adalah mendapatkan pendidikan yang terbaik.”

Fakta lain terkait fenomena menganggurnya sarjana pendidikan di berbagai daerah karena pola rekrutmen yang belum transparan dan akuntabel serta belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini antara lain terkait dengan masih mengemukanya politisasi pendidikan di daerah pasca-pilkada. Isu pendidikan memang mengemuka pada kampanye-kampanye pilkada, biasanya dikaitkan dengan “pendidikan gratis”. Namun, pada praktiknya, pasca-pilkada yang mengemuka adalah politisasi pendidikan, termasuk dalam konteks mutasi pejabat dan rekrutmen kepegawaian dalam bidang pendidikan, di mana mereka yang menjadi tim sukses atau pendukung pasangan terpilih mendapat prioritas utama.

Aspek selanjutnya yang menjadi tantangan implementasi SNP adalah aspek sosial ekonomi. Sebagaimana kita pahami, disparitas sosial ekonomi di Indonesia masih sangat lebar. Kesenjangan sosial ekonomi yang masih cukup besar berdampak pada kesenjangan akses pendidikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua warga negara sebagaimana yang diamanatkan konstitusi menjadi terabaikan, karena pemerintah daerah maupun pusat tidak dapat menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan, berjalan dengan baik.

Pemerintah pusat dan daerah sebagai penanggung jawab pengadaan sarana-prasarana pendidikan juga belum dapat

melaksanakan kewajibannya dengan baik. Akibatnya, selain pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil anak Indonesia. Sementara sebagian besar lainnya hanya dapat mengikuti pendidikan dengan kualitas yang jauh di bawah standar, dikarenakan kekurangan berbagai aspek penunjangnya. Meskipun secara statistik angka partisipasi anak Indonesia yang mendapatkan pendidikan sudah meningkat dibanding masa setelah kemerdekaan, namun secara kualitas, pendidikan yang diperoleh masih jauh dari memadai (DKT I dan II).

Aspek selanjutnya adalah aspek politik. Sebagaimana disinggung sebelumnya, peristiwa pemilu atau pilkada masih menjadikan masalah pendidikan sebagai isu kampanye yang cukup menawan. Janji sekolah bebas biaya (pendidikan gratis) merupakan fenomena yang sangat lazim dikemukakan oleh kontestan pemilu maupun pilkada. Meski demikian, janji-janji kampanye tersebut tidak pernah terbukti dapat dipenuhi alias hanya harapan palsu. Namun, sekolah sudah terlanjur terlibat dalam praktik dukung mendukung kontestan pemilu atau pilkada yang berjanji akan memberi fasilitas tersebut. Akibatnya, setelahnya sering timbul sikap pro-kontra, baik secara internal maupun eksternal sekolah. Hal ini tentu kontraproduktif manakala dikaitkan dengan usaha-usaha peningkatan kualitas pendidikan sendiri.

Aspek lain adalah aspek budaya. Indonesia sebagai negara yang luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan bervariasi dalam kehidupan budayanya. Di samping budaya lokal yang beragam, dari segi kemajuannya pun luas variasinya. Bahkan, tidak sedikit ditemukan kesenjangan yang dalam antara kelompok budaya yang sudah maju dan makmur dengan kelompok budaya yang masih terbelakang dan serba kekurangan. Pendidikan sebagai salah satu alat dan sarana untuk memajukan budaya bangsa tidak

berfungsi, karena ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Dalam masa-masa sulit seperti masa pandemi Covid-19, tantangan budaya menjadi semakin tajam. Pendidikan jarak jauh yang menjadi pilihan strategi belajar seringkali terkendala oleh belum meratanya sarana-prasarana penunjang teknologi digital. Sebagai konsekuensinya, banyak anak Indonesia yang tidak dapat mengikuti pendidikan jarak jauh secara efektif, sehingga dikhawatirkan akan mengalami *learning loss*.

Aspek yang tidak kalah menantang adalah aspek agama. Sebagaimana kita ketahui, di samping agama resmi yang diakui keberadaannya oleh pemerintah yaitu sebanyak 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu, masih banyak agama-agama yang tidak resmi seperti Yahudi, Bahai, Sikh serta berbagai agama lokal. Agama-agama yang tidak secara resmi diakui pemerintah tersebut sering terabaikan, bahkan seperti dianggap tidak ada. Kelompok agama yang tidak diakui resmi ini masih diperluas lagi dengan berbagai aliran kepercayaan dan kelompok masyarakat adat. Hak-hak mereka rentan terabaikan, tidak terkecuali haknya untuk mendapatkan pendidikan, khususnya lagi pendidikan yang terkait agama dan kepercayaannya.

Aspek terakhir yang tidak kalah berpengaruh sebagai tantangan terhadap SNP adalah aspek daerah rentan bencana. Beberapa bencana besar, baik bencana alam maupun sosial pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa bencana ini selain menghancurkan dan meluluhlantakkan sarana-prasarana pendidikan (termasuk berbagai dokumen penunjang pendidikan), juga meninggalkan dampak psikologis berupa trauma yang cukup dalam. Keadaan seperti ini sejatinya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk memperbaiki kembali pendidikannya.

Namun, yang terjadi mereka berjuang sendiri menghadapi berbagai rintangan untuk dapat bangkit kembali dan melaksanakan tugas pendidikannya seperti semula. Bahkan dalam upaya akreditasi, mereka sama sekali tidak mendapatkan perkecualian dan diperlakukan sama dengan sekolah atau perguruan tinggi yang tidak pernah mengalami bencana. Akibatnya, mereka merasa kecewa karena peringkat akreditasi sekolah atau perguruan tingginya turun. Padahal penyebab turunnya performa pendidikannya adalah karena musibah yang mereka sendiri tidak kehendaki. Maka wajar bila mereka menuntut keadilan atas perlakuan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB V**

### **KONSEP DAN BENTUK STANDAR NASIONAL MASA DEPAN**

Melanjutkan bab sebelumnya, Bab V ini menjelaskan tentang konsep dan bentuk standar nasional masa depan. Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan tentang pentingnya SNP, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta ragam problematika implementasi SNP di Indonesia. Bab ini memberikan gagasan tentang konsep dan bentuk SNP masa depan. Selain memanfaatkan berbagai literatur yang relevan, elaborasi pada bab ini dilakukan dengan memanfaatkan pandangan para ahli dan responden pakar yang terlibat dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT/FGD).

#### **A. Pendidikan yang Berorientasi Masa Depan**

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan di manapun mereka berada. Pendidikan sangat penting artinya bagi kehidupan, tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Tujuan pendidikan kita adalah, “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan

kehidupan, cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi, demokratis, dan toleran dengan mengutamakan persatuan bangsa dan bukannya perpecahan.

Masa depan merupakan gambaran tentang kehidupan beberapa kurun waktu ke depan. Setiap orang memiliki rencana atau mempunyai *planning* tentang bagaimana kehidupannya di masa yang akan datang. Dalam masalah pendidikan, semua orang juga memiliki rencana bagaimana pendidikannya di masa yang akan datang menjadi lebih baik, agar dapat melewati semua tantangan yang dapat menghambat proses perkembangan pendidikan.

Dalam rangka mempersiapkan konsep pendidikan yang berorientasi pada masa depan, Mudyahardjo (2016) memandang perlunya diperhatikan pilar pendidikan perspektif UNESCO sebagaimana berikut: 1. Belajar untuk mengetahui (*Learning to know*). Belajar berarti memperoleh keuntungan dari kesempatan pendidikan yang tersedia di dalam hidup; 2. Belajar untuk berbuat (*Learning to do*). Tidak hanya tertuju pada penguasaan suatu keterampilan bekerja, tetapi juga secara lebih luas berkenaan dengan kompetisi atau kemampuan yang berhubungan dengan banyak situasi dan bekerja dalam tim; 3. Belajar untuk menjadi diri sendiri (*Learning to be*): mengembangkan kepribadian dirinya sendiri dan mampu berbuat dengan kemandirian yang lebih besar dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab; 4. Belajar untuk hidup bersama (*Learning to life together*). Dilakukan melalui perkembangan suatu pemahaman tentang orang lain dan suatu penghargaan terhadap saling ketergantungan antar sesama.

UNESCO memberikan penekanan terhadap empat pilar pendidikan di atas dalam sebuah laporan menyongsong tahun 2050, bertajuk "*Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract*

*for Education*". Catatan penting dalam tulisan ini adalah pilar ke empat ditekankan pada guru yang harus bekerja secara kolaboratif dan bekerja berbasis tim. Tentu pilar ke empat ini tidak hanya berkaitan dengan guru tetapi juga berkaitan dengan para peserta didik mulai tingkat pendidikan paling awal sampai tingkat paling tinggi.

Hasil laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) 2018 (Cooperation & Development, 2018) memaparkan beberapa kapabilitas yang perlu dikokohkan ke personal anak-anak. *Pertama*, rasa ingin tahu, imajinasi, daya tahan, dan kemampuan mengatur diri secara mandiri. *Kedua*, kemampuan menghormati, menghargai gagasan, perspektif, dan nilai-nilai orang lain. *Ketiga*, kemampuan mengatasi kegagalan dan penolakan. *Keempat*, kemampuan bergerak maju untuk menghadapi beragam kesulitan.

Kemampuan-kemampuan tersebut harus dapat diaplikasikan oleh siswa dalam berbagai situasi dan kondisi. Kapabilitas tersebut perlu diinternalisasikan sehingga menjadi inheren dalam diri anak-anak bangsa. Meskipun demikian, berbagai kapabilitas yang coba diinternalisasikan di ruang pendidikan tersebut juga perlu diimbangi dengan semangat pendidikan yang responsif terhadap lokalitas kultural dan alam Nusantara yang sangat kaya.

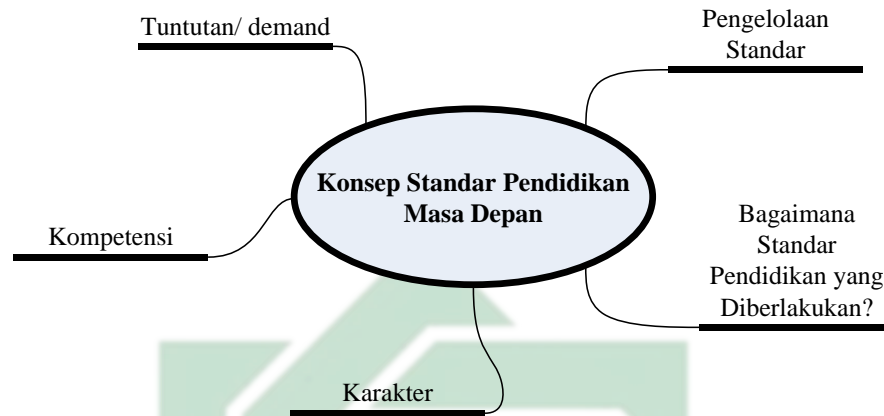
Perubahan paradigma dalam pembangunan pendidikan di negeri ini menjadi hal yang niscaya. Apalagi masih lazim kita temui di berbagai tempat yang masih memosisikan anak sebagai objek bukan sebagai subjek pendidikan. Menempatkan mereka sebagai gelas kosong yang harus diisi pengetahuan sebanyak-banyaknya tanpa melihat realitas faktual di sekitarnya. Lembaga pendidikan

baik formal, non-formal, dan informal harus mengubah cara pandang.

## **B. Konsep Standar Nasional Pendidikan Masa Depan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara kewilayahan terdiri dari banyak pulau dan kepulauan, banyak etnis, dengan jumlah penduduk 272.229.372 pada Juni tahun 2021. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan perundang-undangan bidang pendidikan mengamanatkan agar hak pendidikan diperoleh oleh masyarakat. Sejarah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan kita berproses dari sebagian kecil yang mendapatkan hak pendidikan (terutama pada era kolonial) dan setelah kemerdekaan, mereka yang terlibat dalam proses pendidikan terus bertambah, hingga ke angka idealnya, 100%. Pemerintah melaksanakan amanat tersebut melalui adanya pendidikan formal dan non formal dimana pendidikan formal terdiri dari pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/SMK dan MA), dan pendidikan tinggi (PT). Dalam upaya menjamin pendidikan berjalan dengan baik dengan variasi etnis maupun budaya, UU Sisdiknas Tahun 2003 telah mengamanatkan adanya standar pendidikan yang dirumuskan untuk level nasional.

Pada bagian ini, terdapat empat hal yang bersinggungan dengan “Konsep Standar Nasional Masa Depan” sebagai rekomendasi penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan Indonesia ke depan. *Pertama* yang berkaitan dengan *demand/tuntutan*, *kedua* berkaitan dengan kompetensi, *ketiga* berkaitan dengan pemberlakuan Standar Nasional Pendidikan, *keempat* berkaitan dengan pengelolaan Standar Nasional Pendidikan.



**Gambar 5.**

Bagan struktur Konsep Standar Pendidikan Masa Depan

### 1. Demand/Tuntutan

Abad 21 merupakan abad digital yang ditandai dengan 6 kecenderungan utama yaitu (a) berlangsungnya revolusi digital yang semakin luar biasa yang mengubah sendi-sendi kehidupan kebudayaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, (b) terjadinya integrasi belahan-belahan dunia yang semakin intensif akibat internasionalisasi, globalisasi, hubungan multilateral, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi, (c) berlangsungnya pendataran dunia (*the world is flat*) akibat berbagai perubahan mendasar dimensi-dimensi kehidupan manusia terutama akibatnya mengglobalnya Negara, korporasi, dan individu, (d) sangat cepatnya perubahan dunia yang mengakibatkan dunia tampak berlari tunggang langgang yang tampak menyempit, waktu terasa ringkas, dan keusangan sesuatu cepat terjadi, (e) semakin tumbuhnya masyarakat padat pengetahuan (*knowledge society*), masyarakat informasi (*information society*), dan masyarakat jaringan (*network society*), yang membuat

pengetahuan, informasi, dan jaringan menjadi modal yang sangat penting, dan (f) makin tegasnya fenomena abad kreatif yang menempatkan kreatifitas dan inovasi sebagai modal penting bagi individu, perusahaan, dan masyarakat (Tim PPK; Kemendikbud, 2017).

Enam kecenderungan ini merupakan fenomena baru yang memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru yang harus ditanggapi oleh dunia pendidikan nasional dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan baru ini tentu saja tidak menghilangkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya *long life* berlaku sepanjang masa. Diantara kebutuhan yang menjadi tuntutan dan menjadi kewajiban dunia pendidikan betul-betul merespon adalah tuntutan terciptanya masyarakat berperadaban, masyarakat berbudaya, masyarakat yang memiliki kecakapan (skill), dan tuntutan dunia kerja.

#### a. Tuntunan Masyarakat Berbudaya

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus dilakukan untuk membangun masyarakat berbudaya (Pendidikan & Indonesia, 2017) sebagai bagian bagaimana masyarakat mampu berinteraksi secara apik dan sehat. Manakala secara nyata terjadi interaksi serupa yaitu apik dan sehat pada semua lapisan masyarakat bisa dikatakan bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat berbudaya. Terdapat kunci utama masyarakat itu dikatakan berbudaya yaitu manakala saling menghargai, saling menghormati, dan saling memahami eksis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana keindahan ini bisa dicapai?

Dalam pandangan Durkheim and Ginting (1990), masyarakat berbudaya bisa tercipta dilandasi adanya nilai-



nilai yang eksis dalam kehidupan masyarakat terdiri dari nilai keadilan dan nilai kedisiplinan. Adil dan disiplin merupakan kunci dari berkembangnya masyarakat berbudaya karena karakter-karakter lain akan tumbuh dengan baik. Dalam pandangan Russel (1956) dalam bukunya “*On Education*” masyarakat berbudaya bisa terwujud dengan eksistensi beberapa nilai utama dalam kehidupan masyarakat yaitu cinta, sehat, bahagia, adil dan jujur.

Di Indonesia, melalui peraturan presiden RI nomer 87 tahun 2017 dan permendikbud RI nomor 20 tahun 2018 ditetapkan terdapat 18 nilai-nilai karakter yang harus menjadi kepribadian peserta didik yang dirumuskan menjadi nilai-nilai utama yaitu religious, nasionalis, gotong royong, kemandirian, dan integritas. Nilai-nilai ini diterjemahkan menjadi sumber budaya sekolah. Nilai-nilai yang ditetapkan ini merujuk pada pendidikan yang telah digagas menteri Pendidikan Nasional pertama Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai karakter ini *embodied* dalam proses pendidikan yang melibatkan olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olah raga yang maknanya melibatkan komponen pikir, komponen, kalbu, komponen rasa dan komponen raga. Dan ini maknanya pendidikan Nasional mengarah pada keseimbangan dan membentuk serta mengembangkan masyarakat berbudaya.

Semua kitab suci agama-agama dunia menetapkan bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia. Masyarakat berbudaya adalah masyarakat yang meraih kebahagiaan dalam hidup. Yakni memiliki ilmu, bertatakrama, bersinergi, ber keadilan, berbasis cinta kasih, dan sehat lahir batin, serta berkecukupan. Kenapa kitab suci menjadi bagian yang harus

dilihat? Indonesia adalah Negara berdasar Pancasila dimana sila keTuhanan Yang Maha Esa mewarnai seluruh sila-sila lainnya, dan beragama menjadi bagian penting dalam berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini masyarakat berbudaya adalah masyarakat yang mengamalkan ajaran agama sehingga menjadi manusia yang berbudi luhur dan menjadi masyarakat yang berkepribadian utama.

Pendidikan sebagai sebuah aktifitas bermakna menurut Justin W. Cook dalam *Learning at the Edge of History* harus diarahkan pada tercapainya “*strong intellect, good life, each one has been judged correct by some body*”. Ilmu pengetahuan dan karakter menjadi bagian amat penting yang menghasilkan terciptanya masyarakat yang saling menghargai, saling menghormati dan saling memahami (Cook, 2019).

Hadirnya dan berkembangnya masyarakat berbudaya berpengaruh terhadap kekokohan kepribadian dan eksistensi masyarakat menghadapi masa depan yang cenderung mengglobal dan yang terus berubah. Standar Nasional Pendidikan Masa Depan wajib mempertimbangkan tuntutan ini.

Konsep dasar Pendidikan Masa Depan penting untuk secara berkelanjutan berbasis pada nilai-nilai universal dalam peradaban manusia, khususnya Indonesia. Nilai-nilai universal yang dimaksud adalah kesadaran manusiawi akan ketuhanan dalam berbagai perwujudan dan refleksinya, kesetaraan melampaui batasan primordial, keadilan yang menyeluruh, keseimbangan antara berbagai dualitas maupun multiplitas jati diri, dan kemajuan yang melingkupi nilai-nilai

sebelumnya. Kristalisasi nilai universal bangsa Indonesia tercantum dalam Pancasila.

Penjabaran konsep Pendidikan Masa Depan layak memperlihatkan optimalisasi ciri khas bangsa yang majemuk dan dalam kemajemukan itu dapat bergerak maju secara berkesatuan. Pola ini (nama lainnya adalah Bhineka Tunggal Ika) adalah blue print yang menjamin mutu pendidikan yang menopang masyarakat dalam kancah budaya lokal, regional maupun global. Kepercayaan terhadap hal ini imperatif bagi paradigma Pendidikan Masa Depan.

Diskusi kelompok terpumpun 2, membahas mengenai masyarakat berbudaya yang menjadi salah satu bidikan pengaturan standar nasional. Kekhawatiran terhadap arus budaya asing yang terus-menerus masuk, akan mempengaruhi eksistensi *local culture* yang ada di Indonesia.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 (Indonesia, 2003), pada dasarnya pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan dalam perspektif ajaran Ki Hadjar Dewantara (UST, 2020), *pertama*: pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri; *kedua*: membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun dengan tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional; *ketiga*: membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir- pelopor; dan *keempat*: mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi Korat Alamnya masing-masing siswa.

Kata "Budaya" berasal dari Bahasa Sansekerta "Buddhayah", yakni bentuk jamak dari "Budhi" (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti "budi dan daya" atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Indonesia, 2008; Kbbi, 2016) budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda secara budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

Konsepsi Pembinaan Kebudayaan Nasional menurut KHD dikenal dengan Trikon (kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi). Dasar kontinuitas berarti bahwa budaya, kebudayaan atau garis hidup bangsa itu sifatnya continue, bersambung tak putus-putus. Dengan perkembangan dan kemajuan kebudayaan, garis hidup bangsa terus menerima pengaruh nilai-nilai baru, garis kemajuan suatu bangsa ditarik terus. Dasar konsentris berarti bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersikap terbuka, namun kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar kita. Hanya unsur-unsur yang dapat memperkaya dan mempertinggi mutu kebudayaan saja yang dapat diambil dan diterima, setelah dicerna dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Dasar konvergensi, mempunyai arti bahwa dalam membina karakter bangsa, bersama-sama bangsa lain diusahakan terbinanya karakter dunia sebagai

kebudayaan kesatuan umat sedunia (konvergen), tanpa mengorbankan kepribadian atau identitas bangsa masing-masing. Kekhususan kebudayaan bangsa Indonesia tidak harus ditiadakan, demi membangun kebudayaan dunia.

“Sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan daerah sebagai modal utama bagi terwujudnya kebudayaan nasional”. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengembangkan karakter dan membina kebudayaan bangsa harus merupakan kelanjutan dari budaya sendiri (kontinuitas) menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia (konvergensi), dan tetap terus memiliki dan membina sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia (konsentrisitas).

#### b. Tuntutan Masyarakat Berkecakapan

Kemandirian hidup merupakan penopang utama dalam meraih kehidupan sejahtera (*human well-being*). Kemandirian hidup merupakan penopang utama dalam meraih kehidupan sejahtera (*human well-being*). Kehidupan sejahtera sebagai kebutuhan masyarakat mensyaratkan ketercapaian kematangan kepribadian dan dimilikinya kecakapan. Istilah lain dari kecakapan adalah *skill*. Kecakapan yang dibutuhkan ini adalah kecakapan hidup/*life skill*. Salah satu nilai utama yang wajib dikembangkan di dunia pendidikan Indonesia adalah nilai kemandirian yang membutuhkan kecakapan hidup.

Kecakapan hidup terdiri dari *general life skill* yang berisi nilai-nilai karakter atau *soft skill* dan *hard skill*. *General life skill* dibutuhkan oleh masyarakat dimulai saat anak



berkembang dimana dalam dunia pendidikan dimulai pada jenjang pendidikan anak usia dini dan berangsur-angsur berkurang pada saat memasuki jenjang yang lebih tinggi. Kala seorang berkembang menjadi dewasa maka pendidikan pada aspek *soft skill* ini mulai berkurang karena diperkirakan yang bersangkutan sudah matang pada aspek kepribadian.

*Specific life/hard skill* di dunia pendidikan dikenal dengan istilah akademik dan vokasioanl. Pada aspek inilah *intellectual* dan *vocational* dikembangkan dimana dalam dunia pendidikan mulai dikembangkan saat anak memasuki jenjang pendidikan dasar. *Hard skill* ini berangsur-angsur semakin dikembangkan seiring dengan bertambahnya usia anak dan naiknya jenjang pendidikan anak sampai level tertinggi strata tiga (S3). Berbekal *general life skill* dan *specific life skill* tuntutan terwujudnya masyarakat berkecakapan bisa dicapai yang berdampak pada kehidupan sejahtera.

Ekspektasi kemampuan dari masyarakat dinamis dalam dialektika interaksi dan akumulasi perubahan-perubahan. Serapannya bagi Pendidikan Masa Depan merupakan kebutuhan yang esensial. Keterampilan-keterampilan merupakan proses dan hasil pendidikan yang dapat dilihat kemanfaatannya seiring dengan kesadaran dan kemampuan mengelola diri maupun komunitas sehingga pergaulan masyarakat lokal, regional maupun global berjalan dengan kondisi yang saling menyeimbangi, saling melengkapi.

#### c. Tuntutan Dunia Kerja

Pada satu sisi, dunia kerja turut membentuk profil Pendidikan. Pada sisi yang lain, pendidikan Masa Depan

menempatkan dunia kerja sebagai arena fungsionalisasi para *output*. Dengan demikian *output* dari Pendidikan Masa Depan yang dipersiapkan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja pada waktunya akan membentuk dunia secara luas dan memberi input baru bagi Pendidikan Masa Depan.

Profil *output* diperlengkapi dengan kesadaran mengenai tuntutan dunia kerja. Selanjutnya, Pendidikan Masa Depan menuntut internal komunitas pendidikan merancang bangun komponen pendidikan yang tanggap terhadap hal ini. Rancangan itu melibatkan pemetaan secara global dalam konstalasi masyarakat berjaringan (*networking society*). Betapapun kondisi wilayah Indonesia bervariasi namun tuntutan dunia kerja ini memberi sinyal yang sangat jelas bahwa standar penyiapan profil lulusan perlu setara antar wilayah di Indonesia.

Dunia kerja mensyaratkan lulusan dunia pendidikan memiliki tiga hal yaitu (a) kompetensi terdiri dari pengetahuan dan keterampilan, (b) sikap/kepribadian (*attitude*), dan (c) *melek* teknologi. Para lulusan pendidikan juga memerlukan pekerjaan. Dua pihak antara angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan dan tuntutan dunia kerja yang membutuhkan tenaga yang bagus merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pendidikan memerlukan standar yang mengarah pada terpenuhinya pribadi yang bisa diterima dibanyak kesempatan dunia kerja. Selain itu pendidikan juga memerlukan standar yang mampu mengarahkan para siswa memiliki kepribadian utama sehingga mampu menjadi pegawai (pekerja) atau wirausaha (*enterpreneurship*) sebagai

pencipta lapangan pekerjaan. Pada level jenjang pendidikan tertentu, diharapkan mampu mengantarkan lulusannya melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan pada level lainnya, diharapkan memiliki strategi agar lulusannya mampu bergelut dengan dunia kerja. Sebagai contoh Lulusan SMK, perlu dilihat secara utuh dalam konteks bekerja tidak hanya dengan indikator “mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya” tetapi perlu dilihat pula bagaimana lulusan mampu bekerja, berwirausaha, menciptakan pekerjaan, dan melanjutkan kuliah.

d. *Spirituality Demand* dalam Kehidupan Masyarakat

John Lock meyakini anak lahir bagaikan kertas putih tergantung sekitarnya apakah orang tua atau guru atau lainnya yang mewarnai. Imam al Ghazali maupun Ibn Sina (filosof Muslim) meyakini bahwa anak lahir dengan bekal spiritual ke-Tuhan-an. Fazlurahman, seorang professor dari Chicago, meyakini anak lahir membawa insting ingat akan Tuhan. John P Miller, tokoh pendidikan holistik dari Amerika Utara, meyakini bahwa anak lahir dengan dibekali *spirituality* dan *talent*. Bahkan John P. Miller merumuskan prinsip *spirituality* mendasari seluruh prinsip dalam pendidikan dimana menurutnya pendidikan berinteraksi dengan dua aspek *spirituality* dan *humanity*. Falsafah perenial meyakini bahwa manusia membutuhkan *spirituality*. Indonesia dengan dasar negara “Pancasila” membawa konsekuensi logis bahwa *spirituality* adalah hal penting yang harus *embodied* dalam kehidupan masyarakat.

*Spirituality* merupakan kebutuhan jiwa manusia dimana dalam konsep Ki Hajar Dewantara dibahasakan “rohani”. John P Miller membagi kebutuhan jiwa yang disebut dengan *spirituality* ini terdiri dari empat hal yaitu *spirituality* yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Sang Maha Luhur, *interconnectedness*, *human wholness*, dan *earth literacy*.

Pendidikan sebagai gerakan membahagiakan masyarakat sudah selayaknya menempatkan *spirituality* sebagai *core* pendidikan. Ke depan dengan era digital, masyarakat tetap perlu mendapatkan porsi kajian dan implementasi *spirituality* yang diwujudkan dalam religiusitas seseorang maupun kehalusan budi seseorang.

SNP masa depan harus memberikan porsi berkaitan dengan kebutuhan tumbuh kembangnya *spirituality* dalam kehidupan para peserta didik maupun seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama satuan pendidikan.

e. Pemenuhan hak Siswa

Hak siswa adalah kewajiban para stakeholder, seperti Negara, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan Masa Depan mensyaratkan optimalisasi kewajiban para stakeholder melintas batas wilayah, agama, afiliasi politik dan status ekonomi.

Pemenuhan ini berwujud dalam beberapa hal: 1. Paradigma pembelajaran; 2. Substansi pendidikan yang mengutamakan orientasi yang ramah anak; 3. Proses pembelajaran yang berpihak pada tumbuh kembang anak secara sehat dalam lingkungan pendidikan; 4. Kurikulum

Pembelajaran yang melibatkan agensi anak sejak perencanaan sampai pada evaluasinya; 5. Pengembangan *spirituality* dan *talent* secara utuh; 6. Pengembangan *spirituality* dan *humanity* secara seimbang; 7. Pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh.

Elanjutnya: 8. Pengembangan enam potensi siswa secara utuh, yaitu potensi *spirituality*, intelektual, sosial, emosional, estetika, fisik; 9. Pendidikan berorientasi pada *educate the whole children and educate the children as whole*; 10. Mengembangkan nilai-nilai beragama, sehat, bahagia, cinta, adil, dan disiplin sebagai nilai-nilai karakter utama yang menjadi kepribadian peserta didik; dan 11. Tersedianya sarana dan prasarana serta lingkungan yang aman, bersih, indah, sehat, dan nyaman.

Dari diskusi kelompok terpumpun, pemenuhan hak anak ini disuarakan oleh banyak responden pakar dengan penuh penekanan. Hak anak menjadi payung reorientasi yang membentuk Pendidikan Masa Depan yang mengedepankan kemanusiaan (*humanity*) diantara perkembangan teknologi yang berpotensi pada proses dan hasil dehumanisasi. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan nasional sejati membentuk insan yang berjiwa merdeka, merdeka lahir dan batin, serta merdeka pemikirannya.

## 2. Kompetensi

Abad ke-21 yang disebut dengan *digital era* membawa dampak perubahan yang luar biasa, sampai-sampai di sebut dengan *disruptive era* atau masa kekacauan. Pada era serupa kompetensi menjadi tuntutan dalam kehidupan global, kompetitif dan

terbuka untuk bisa *survive*, bisa berprestasi, bahkan bisa berkompetisi. Kompetensi dalam konteks abad 21 terdapat hubungan dengan kecakapan abad 21. Kecakapan yang dimaksud terdiri dari kualitas karakter, literasi, dan kompetensi abad ke-21.

Kualitas karakter mengacu pada nilai-nilai karakter yang harus diajarkan, dilatihkan, dipraktekkan, dibiasakan dan akhirnya menjadi kepribadian serta menjadi budaya. Dunia pendidikan wajib memasukkan bagian ini, yaitu kualitas karakter, dalam standar pendidikan. Literasi yang terdiri dari literasi baca tulis, numerasi, literasi sains, teknologi, finansial dan kewargaan merupakan bagian kecakapan abad 21 sebagai tuntutan penting. Sedangkan kompetensi abad 21 telah dirumuskan terdiri dari empat K yaitu kreatif, kritis, kompetensi komunikasi, dan kompetensi kolaborasi.

Kompetensi abad 21 ini harus dilatihkan dan diimplementasikan untuk semua jenjang pada pendidikan formal. Sehingga di tengah *disruptive situation* generasi Indonesia menjadi pribadi yang tidak bingung sebaliknya pribadi yang mampu mengambil keputusan, misalnya apakah mau bekerja, berwira usaha, atau menciptakan pekerjaan. Menyikapi era tersebut, Pendidikan Masa Depan, setelah membaca peta masa kini maupun ekspektasi, maka perlu mendeskripsikan apa itu yang disebut dengan kompetensi kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini selanjutnya dijabarkan menjadi panduan pengembangan satuan pendidikan serta mengakomodir dinamika yang ada.

Berikut ini adalah rangkaian kompetensi dasar diusulkan sebagai bagian Standar Pendidikan Nasional Masa Depan:



Pertama, kompetensi peserta didik : a. kreatif, berfikir kritis, komunikatif, kolaboratif; b. penguasaan ilmu pengetahuan; c. Berkarakter; d. Terampil dalam IT; e. penguasaan bahasa nasional dan internasional; dan f. kewirausahaan. *Kedua*, kompetensi guru/dosen, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan: a. kompetensi profesional; b. kompetensi esensial.

### 3. Karakter

Pesatnya teknologi di era saat ini dan di masa yang akan datang, dapat memunculkan krisis-krisis yang mampu merusak sebuah tatanan pendidikan masa depan. Hal tersebut akan sangat mengkhawatirkan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Melalui standar pendidikan, diharapkan kompetensi-kompetensi yang akan dirumuskan ini menjadi pertimbangan utama dalam menyusun sebuah standar pendidikan dan memperbaiki pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Melalui Diskusi Kelompok terpumpun tahap I dan II, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran beberapa karakter yang dirasa perlu untuk diatur dalam sebuah standar pendidikan.

Pengaturan itu dimaksudkan agar lebih fokus dalam pengembangan karakter peserta didik. Kualitas karakter peserta didik akan menjadi ukuran keberhasilan sebuah proses belajar yang dilakukan. Setidaknya terdapat lima karakter yang menjadi acuan, yaitu *religiosity* dan *integrity (morality)*, mandiri, berkebangsaan, *agility*, dan *resilience*.

a. *Religiosity dan Integrity (Morality)*

Isu mengenai *religiosity and Integrity*-yang merupakan bagian dari kecerdasan moralitas (Santrock, 2018) muncul pada saat Diskusi Kelompok Terpumpun tahap pertama. Para tim ahli dan responden pakar sepakat bahwa aspek ini menjadi salah satu bagian dari standar pendidikan, hal ini dikarenakan terdapat temuan terjadinya krisis moralitas.

Religiusitas berasal dari bahasa latin *relegare* yang berarti mengikat secara erat atau ikatan kebersamaan. Religiusitas adalah sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual. Religius merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu didalam hati, getaran hati nurani dan sikap personal. Religiusitas adalah peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai sesuatu ghaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Religiusitas berasal dari bahasa Latin *religio* yang akar katanya adalah *religare* yang berarti mengikat. Ini mengandung makna bahwa dalam religi pada umumnya memiliki aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya yang semua itu berfungsi untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya. Dalam khazanah bahasa Indonesia, religi ini diterjemahkan dengan agama.

Dalam arti bahasa “Integritas” atau “*integrity*” berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Secara etimologi, kata integritas

berasal dari bahasa latin yaitu integer (keseluruhan atau lengkap) yang berarti utuh, bulat, penuh suci atau bersih.

Apabila kita merujuk pada teori Lennick and Kiel (2007) Ketika seseorang berbuat dengan integritas ia bisa menyelaraskan perilaku agar sesuai dengan prinsip universal manusia. Seseorang bisa melakukan hal yang menurutnya baik; perbuatannya tetap berada dijalur yang benar dengan didasarkan prinsip dan keyakinan yang dianutnya. Terdapat beberapa karakter yang dapat dijadikan rujukan dalam membangun konstruksi sebuah standar pendidikan, antara lain adalah: 1. Berbuat dengan konsisten pada prinsip, nilai dan keyakinan (*acting consistently with principles, values and beliefs*); 2. Berkata yang sebenarnya (*telling the truth*); 3. Berpegang teguh pada kebenaran (*standing up for what is right*); dan 4. Memenuhi janji (*keeping promises*).

Kualitas karakter (Religiusitas dan integritas) dirasa menjadi modal utama dalam penguasaan kompetensi lainnya. Diharapkan dengan memilikinya, elemen pendidikan yang terlibat dalam pelaksanaan SNP mampu menghadapi perubahan lingkungan (dalam konteks ruang dan waktu) yang dinamis.

#### b. Mandiri

Mandiri merupakan salah satu karakter yang juga muncul sebagai isu dalam kelompok diskusi terpumpun. Hal tersebut dikaitkan dalam kemandirian untuk terus belajar, dalam artian-peserta didik diharapkan memiliki inisiatif sendiri untuk terus belajar. Sehingga, mampu menguasai atau

mengembangkan suatu kompetensi sesuai dengan minatnya atas kemampuan sendiri.

Menurut (Watson, 2002) kemandirian berarti kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih dalam usaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Kemandirian belajar merupakan kesadaran diri, digerakkan oleh diri sendiri, kemampuan belajar untuk mencapai tujuannya (Brookfield, 2009). Kemandirian merupakan adanya indikasi unsur-unsur tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, memiliki motivasi yang kuat untuk maju, demi kebaikan dirinya, mantap mengambil keputusan sendiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, memiliki hasrat untuk berkompetisi dengan orang lain, mampu mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih dalam usaha, mampu mengatur kebutuhannya sendiri, dan tegas dalam bertindak serta menguasai tugas yang diembannya.

#### c. Berkebangsaan

Kebudayaan dan kebangsaan menjadi dasar-dasar pendidikan dalam ajaran Ki Hajar Dewantara atau Pancadharma (UST, 2020). Pada era Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi, isu kebangsaan terus menerus digulirkan. Tantangan pada era globalisasi yang terjadi sejak Orde Baru di antaranya tentang kebangsaan. Karenanya, pendidikan Indonesia tetap membangun jiwa kebangsaan dan *sense of belonging* terhadap Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks menanamkan nilai-nilai kebangsaan, pendidikan harus tetap menyentuh persoalan kebangsaan dengan ilmu pengetahuan yang luas sehingga peserta didik bisa bersikap dengan baik dan benar. Salah satu responden pakar diskusi kelompok terpumpun menyatakan cinta Indonesia didahulukan sebelum peserta didik masuk pada dunia Internasional/global. Para orang tua yang tinggal di negara lain, perlu tetap mengajak putra putrinya sejak dini berbahasa Indonesia. Begitu juga para orang tua yang tinggal di negara sendiri Indonesia, tetap perlu membangun komunikasi dengan bahasa Ibu, yaitu bahasa Indonesia.

d. Agility

Dalam dunia yang cepat berubah, transisi dan perkembangan menjadi hal yang menantang karena individu menghadapi situasi yang tidak diketahui yang mana rutinitas dan kepemimpinan saat ini menjadi tidak sesuai untuk menghadapi perubahan. Individu yang tidak dapat melepaskan pola-pola perilaku lama dan mengenal perbedaan-perbedaan cenderung akan gagal (De Meuse et al., 2010). Generasi milenial perlu memiliki kemampuan *learning agility* agar dapat memenuhi tuntutan organisasi akan SDM yang *agile*.

*Learning agility* didefinisikan sebagai kesediaan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, kemudian menerapkan apa yang telah dipelajari untuk memperoleh kesuksesan di situasi yang baru (Lombardo & Eichinger, 2000). *Agility* berhubungan dengan menghadapi kesulitan

dengan memiliki fleksibilitas, kelincahan untuk melihat solusi-solusi yang ada.

Orang-orang dengan *agility* yang tinggi mengambil pelajaran yang tepat dari pengalaman mereka dan menerapkan pelajaran tersebut di situasi-situasi baru, mereka cenderung akan mencari tantangan-tantangan baru terus menerus, aktif mencari *feedback* dari orang lain dengan tujuan untuk bertumbuh dan berkembang, cenderung merefleksi diri, dan mengevaluasi pengalaman dan menarik kesimpulan (De Meuse et al., 2010).

*Learning agility* terbagi dalam empat dimensi (DeRue et al., 2012), yaitu: 1. *People agility*: sejauh mana seseorang mengetahui dirinya dengan baik, belajar dari pengalaman, memperlakukan orang lain secara konstruktif dan resilien dalam tekanan perubahan; 2. *Results agility*: sejauh mana seseorang yang mendapatkan hasil di bawah kondisi yang sulit, menginspirasi orang lain, dan membangun kepercayaan diri orang lain dengan kehadirannya.

Selanjutnya, 3. *Mental agility*: sejauh mana individu berpikir tentang suatu masalah dari sudut pandang yang baru dan merasa nyaman dengan ambiguitas, kompleksitas dan menjelaskan pemikiran mereka kepada orang lain; dan 4. *Change agility*: tingkat yang mana individu ingin tahu, memiliki gairah atas ide-ide dan terlibat dalam aktivitas pengembangan keterampilan.

Mitchinson and Morris (2014) menjelaskan lima aspek *learning agility* yang mencakup: 1. *Innovating*: tidak takut untuk menantang status quo; 2. *Performing*: Tetap tenang dalam menghadapi kesulitan; 3. *Reflecting*: Mengambil waktu



untuk merefleksikan pengalaman; 4. *Risking*: Dengan sengaja menempatkan dirinya dalam situasi yang menantang; dan 5. *Defending*. Mampu belajar secara terbuka dan menahan diri dari keinginan menolak adanya keragaman.

e. Resilience

Menurut Reivich and Shatté (2002), Resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi ketika menghadapi kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Selain itu Grotberg juga mengartikan Resiliensi sebagai kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. Wolin and Wolin (2010) dalam penelitian terdahulu mengartikan “mengatasi” ini sebagai bentuk ketahanan dan mendefinisikannya sebagai “*process of persisting in the face of adversity*”, yang berarti proses bertahan dalam menghadapi kesulitan (Sixbey, 2005).

Cassen et al. (2009), menjelaskan ketahanan atau *resilience* sebagai adaptasi positif dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah proses yang menggambarkan cara di mana beberapa individu mencapai hasil yang baik, meskipun secara fakta bahwa mereka berada pada risiko tinggi. Connor and Davidson (2003) mengatakan bahwa “*Resilience embodies the personal qualities that enable one to thrive in the face of adversity.*” Yang berarti bahwa resiliensi adalah kualitas pribadi yang memungkinkan individu untuk berkembang dalam menghadapi kesulitan.

#### **4. Pemberlakuan Standar Pendidikan**

Standar Pendidikan dianggap berlaku bagi pengelolaan yang bertanggung jawab, merdeka dan berkelanjutan. Standar itu memiliki posisi, fungsi dan peran yang ditentukan bersama demi kualitas pendidikan Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Standar itu dianggap tidak menjadi standar bagi dirinya sendiri jika posisi, fungsi dan peranannya tidak mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terdapat perdebatan tentang perlu tidaknya standar pendidikan selama proses diskusi kelompok terpumpun yang melibatkan 26 (dua puluh enam) responden pakar. Diantara sekian responden pakar yang hadir hanya satu orang yang menganggap bahwa standar pendidikan tidak diperlukan. Selebihnya menyatakan bahwa standar pendidikan wajib adanya, bahkan terdapat responden pakar yang ekstrim mengatakan bahwa jika pendidikan tidak menggunakan standar maka seakan pemerintah Indonesia tidak ada. Terutama bagi pendidikan formal mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tanpa standar, pendidikan formal sudah berganti menjadi pendidikan non formal.

Standar pendidikan yang diberlakukan perlu mempertimbangkan keberagaman kondisi daerah di Indonesia, sehingga standar yang diberlakukan memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional atau bahkan melampaui. Ini artinya bahwa terdapat standar pendidikan minimal yang wajib dicapai oleh satuan pendidikan, dan terdapat standar yang posisinya tidak wajib dicapai. Dengan demikian satuan pendidikan yang berada di daerah khusus misalnya, tidak harus mencapai standar pendidikan yang sama

sebagaimana satuan pendidikan yang berada di pusat perkotaan.

Dari hasil diskusi kelompok terpumpun diperoleh gambaran perlunya standar yang wajib dicapai yaitu standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar guru. Namun demikian masih ada pula yang berpendapat delapan (8) standar yang sudah ada perlu dipertahankan, tetapi bahasanya perlu disederhanakan.

## **5. Pengelolaan Standar**

Pengelolaan standar yang penting adalah menjadi rambu bagi pencerdasan kehidupan bangsa. Prinsip ini perlu ditempatkan pada bagian awal sebelum pengelolaan standar. Dalam kerangka itu, pengelolaan standar dapat dihasilkan dengan memastikan bahwa hal itu menjamin kecerdasan bangsa, tanpa ada kesenjangan.

Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memberdayakan komunitas pendidikan Indonesia bergerak dan kebersamaan yang saling membangun dan berkualitas. Pemerintah pusat memainkan beberapa peranan yang memfasilitasi langsung ke daerah maupun memonitoring pengelolaan daerah dari waktu ke waktu.

Isu pengelolaan pelaksana standar dimunculkan oleh tim ahli dan responden pakar. Terdapat standar-standar yang dirasa menjadi wewenang pemerintah daerah ataupun pusat, dan juga terdapat standar yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kemampuan pengelolaan pelaksanaan standar oleh satuan pendidikan sangat menentukan kualitas pendidikan, namun hal ini juga tidak terlepas dari sinergi keterlibatan.

Penambahan adanya standar orang tua dan standar pemerintah juga dikemukakan pada saat diskusi kelompok terpumpun. Pengaturan sedemikian rupa untuk mendukung keberhasilan proses belajar peserta didik.

Standar-standar yang terkait dengan pelaksanaan proses pendidikan secara langsung, akan dikelola penuh oleh satuan pendidikan. Sedangkan standar yang sifatnya *given* (pembiayaan keuangan, sarana prasarana, dan SDM) maka akan dikelola oleh pemerintah (sinergi antara pemerintah pusat dan daerah).

### **C. BENTUK STANDAR NASIONAL MASA DEPAN**

Bentuk standar nasional pendidikan masa depan merupakan *core* yang menjadi patokan seperti apa standar ini dirumuskan. Terdapat tiga hal yang harus dikedepankan, yaitu prinsip, isi dan kriteria.

#### **1. Prinsip Standar Nasional Masa depan**

Bentuk standar pendidikan adalah pengembangan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Standar mengatur prinsip-prinsip saja dalam pengertian bahwa prinsip-prinsip yang ditekankan dijelaskan sebaik mungkin sehingga semua satuan pendidikan memiliki persepsi yang sama mengenai prinsip tertentu demi pencerdasan bangsa secara holistik.
- b. Pembagian peran dalam pola pengelolaan berdasarkan pada kesepakatan secara nasional dan terimplementasi pada level lokal dengan memperhitungkan keadilan akses

dan kontrol stakeholder untuk pendidikan yang bermutu dalam semangat ke-Indonesia-an.

- c. Struktur pengelolaan pendidikan masa depan menekankan aspek kesetaraan dan kemajuan secara seimbang. Tindakan afirmasi bagi wilayah 3T berjalan dalam kontrol dan transparansi yang tinggi oleh pemerintah demi percepatan. Sementara itu, wilayah-wilayah dengan standar pendidikan yang baik dan unggul didampingi untuk peningkatannya oleh pemerintah, sambil memberi dampak terhadap wilayah yang memerlukan peningkatan menuju kesetaraan Pendidikan.

## **2. Isi Standar Nasional Pendidikan Masa Depan**

SNP masa depan merupakan pedoman dan patokan bagaimana *design* pendidikan pada tataran satuan pendidikan disiapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan diperbaiki. Pasal 35 UU Sisdiknas tahun 2003 memberikan pedoman sebagai berikut:

Ayat (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Ayat (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Berangkat dari isi dua ayat UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut dan berdasarkan perkembangan kehidupan yang

serba *digital*, standar pendidikan perlu mempertimbangkan 7 hal berikut: 1. Tetap adanya kompetensi lulusan yang mengedepankan *soft skill* lebih tinggi dibandingkan lainnya; 2. Isi dan proses serta penilaian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan; 3. Kompetensi, kualifikasi, komitmen, integritas, dan mencintai pekerjaan merupakan bagian penting terkait dengan sumber daya manusia didalamnya; 4. Sarana dan prasarana tidak harus diatur secara kaku agar tercapai tujuan utama pembelajaran dan pendidikan; 5. *Core Values* dan *school values* dirumuskan oleh satuan pendidikan sebagai pusat inspirasi dan ditulis dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan; 6. Pembiayaan dirumuskan lebih sederhana namun memegang prinsip akuntabilitas, karena satuan pendidikan negeri dan swasta memiliki kebutuhan dan alokasi yang sedikit berbeda; dan 7. Pembiayaan perlu mempertimbangkan penerimaan guru sebagai bagian penting dalam menjaga mutu, terutama pada satuan pendidikan paud, dasar menengah dan perguruan tinggi swasta.

Berapapun jumlah rumusan standar pendidikan, tujuh hal penting di atas menjadi ruh perumusan standar nasional pendidikan masa depan.

### **3. Kriteria Standar Nasional Pendidikan Masa Depan**

Standar Nasional Pendidikan Masa Depan merupakan pedoman, patokan implementasi pendidikan yang capaiannya pada tingkat satuan pendidikan masuk kategori malampauai, memenuhi, dan kurang memenuhi. Kategori capaian ini menunjukkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Masa Depan bersifat memberikan



kemudahan dalam optimalisasi mengembangkan satuan pendidikan bermutu yang mampu dicapai oleh semua satuan pendidikan diberbagai daerah.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun antara tim ahli dan responden pakar kriteria standar nasional pendidikan masa depan Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bahasa yang digunakan benar dan mudah dipahami; 2. Rumusan standar mudah dipahami oleh satuan pendidikan; 3. Rumusan standar mudah dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan; 4. Standar pendidikan yang dirumuskan, memberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan keunggulan masing-masing.

Selanjutnya, 5. Standar pendidikan yang dirumuskan memberikan semangat kepada satuan pendidikan menciptakan suasana yang membahagiakan; 6. Standar pendidikan yang dirumuskan memberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk mengubah potensi murid menjadi prestasi murid; 7. Memberikan ruang kepada *leader* satuan pendidikan mengembangkan model pendidikan yang inovatif; 8. Memberikan ruang kepada guru melakukan kreativitas dan produktifitas, bukan mengikat pada kegiatan administrasi yang menyita tenaga dan waktu; dan 9. Untuk perguruan tinggi, budaya menulis dosen dan melakukan *sharing ideas* dengan masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat (berbasis kebutuhan masyarakat) mendapatkan porsi.

#### **4. Format Standar Masa Depan**

Standar nasional pendidikan masa depan dapat dirumuskan dengan beberapa pilihan format. Dari diskusi kelompok

terpumpun tergambar empat jenis format standar nasional pendidikan masa depan yaitu: a) standar nasional pendidikan masa depan dengan satu format; b) standar nasional pendidikan dengan dua format; c) standar nasional pendidikan masa depan dengan empat format; d) standar nasional pendidikan masa depan dengan delapan format.

a. Standar Nasional Pendidikan Masa Depan dengan Satu Format

Yang dimaksudkan dengan SNP MD satu format adalah adanya standar kompetensi lulusan yang meringkai berbagai komponen utama pendidikan. Hal ini berbeda dengan kedudukan “kompetensi lulusan” dalam format standar sebelumnya. Pemaknaan tentang titik simpul standar pada Kompetensi Lulusan, mengarahkan paradigma, proses dan prospektif pendidikan pada peserta didik itu sendiri.

Pada dasarnya, hasil setiap proses Pendidikan adalah perubahan *mindset* atau wawasan dari kondisi awal menjadi kondisi baru, yang ditandai dengan adanya perubahan atau penambahan menjadi lebih baik. Perubahan yang diharapkan terjadi meliputi tiga hal utama yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif. Dalam Bahasa lain, diharapkan terjadi perubahan untuk menjadi lebih baik dari sisi *knowledge*, *skill* dan *attitude*. Tiga hal pokok ini menjadi tuntutan bagi setiap lulusan untuk melangkah pada jenjang yang lebih tinggi maupun untuk memasuki dunia profesi dan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Setiap lulusan dari suatu proses pendidikan baik formal maupun non formal, diharapkan dapat memperoleh peningkatan dalam tiga hal pokok tersebut di atas, sementara hal-hal lain yang diperlukan dapat ditambahkan.

Standar Kompetensi Lulusan harus mampu menjawab tantangan kebutuhan di dunia industri, dunia profesi, belajar pada program lanjutan dan belajar sepanjang hayat. Dalam hal ini, penetapan SKL menjadi standar utama dalam SNP Masa Depan. Dengan pilihan satu standar ini, perkembangan yang begitu cepat dalam kehidupan di masyarakat baik nasional maupun internasional diantisipasi. SKL sebagai standar juga memberi ruang adanya inovasi dan penyesuaian secara cepat merespon perubahan yang ada dalam waktu yang singkat. SKL seharusnya fleksibel dan dinamis mengikuti tuntutan perubahan yang cepat.

Dengan hanya satu standar yang diatur (SKL) maka pengelola pendidikan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Yayasan Pendidikan dan Lembaga Sekolah dapat mempersiapkan Sumber Daya yang mendukung, sesuai dengan keunggulan yang ingin dibangun dan dicapai. Pemersatu semua keunggulan itu adalah Pancasila dan UUD 1945. Potensi Daerah dan potensi yang dimiliki satuan pendidikan, benar-benar dapat digunakan untuk menghasilkan kualitas Pendidikan sesuai SKL yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, dapat dihasilkan lulusan dengan keunggulan yang sangat bervariasi sesuai kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

b. Standar Nasional Pendidikan Masa Depan dengan Dua Format

Yang dimaksudkan dengan SNP MD dua format adalah standar kompetensi lulusan dan standar SDM guru/dosen/tenaga kependidikan. Fokus pada dua standar ini mengembalikan sumber daya manusia pendidikan yang

diarahkan pada membangun manusia yang merupakan penggerak pendidikan.

Jika dikehendaki ada 2 standar dalam SNP Masa Depan, maka standar ke-2 yang diperlukan adalah Standar SDM Guru/Dosen/tenaga kependidikan. Standar SDM ini terfokus pada bagaimana kualifikasi, kompetensi dan pengalaman guru/dosen/tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses pendidikan. Pendidikan guru/dosen/tenaga kependidikan sangat penting dipertimbangkan dalam rangka memperoleh SDM yang berkualitas. Selain kualifikasi pendidikan, guru/dosen/tenaga kependidikan harus memiliki *mindset* sebagai fasilitator, agen pemicu perubahan, penyemangat, mitra berdiskusi, bercerita, bertanya dan memberikan solusi terhadap persoalan pembelajaran. Dalam ini, kemampuan komunikasi, menyampaikan materi, mencari solusi dan melakukan inovasi dalam berbagai proses pendidikan, sangat diperlukan. Guru/Dosen/tenaga kependidikan harus mumpuni dari sisi IPTEKS dan mau melayani peserta didik dengan totalitas. Guru/dosen/tenaga kependidikan harus mampu menjadi panutan dan *role model*, dari sisi *knowledge*, *skill* dan *attitude* sehingga dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang dalam IPTEKS dan peradaban/budaya.

Dengan tuntutan yang begitu besar ini, pemerintah melalui SNP Masa Depan, harus memberikan perhatian yang sangat besar kepada Guru/Dosen/tenaga kependidikan sebagai agen-agen perubahan. Perhatian yang dimaksud adalah pada sisi kualifikasi, kompetensi, *link* ke industri, bisnis dan dunia profesional. Disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan mengurangi sebesar mungkin kegiatan administrasi yang

sangat memberatkan Guru/Dosen. Guru/Dosen harus diberi perhatian khusus sebagai Pendidik profesional yang diberi tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam tujuan negara Republik Indonesia di pembukaan UUD 1945.

Untuk mendukung hal ini, tentu saja perlu diatur bagaimana proses seleksi dan pendidikan untuk menjadi seorang Guru/Dosen profesional yang berakhlak mulia dan bermartabat, sehingga dapat menghasilkan lulusan berkuliatas dan berbudaya, sesuai dengan cita-cita manusia Indonesia seutuhnya yang mampu berkontribusi positif dalam pergaulan dunia.

c. Standar Nasional Pendidikan Masa Depan dengan Empat Format

Yang dimaksudkan dengan SNP masa depan dengan empat format mencakup standar kompetensi lulusan, standar SDM guru/dosen/tenaga kependidikan, standar proses, dan standar penilaian.

Standar proses bersifat panduan atau pedoman bagaimana melaksanakan proses Pendidikan di setiap tingkatan Pendidikan. Tidak perlu diatur secara rigid, tetapi ada pilihan-pilihan yang dapat dirujuk oleh satuan Pendidikan atau guru/dosen/tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses pendidikan. Pada standar ini, lebih banyak pilihan cara yang dapat dilakukan dan bukan menjadi kegiatan administrasi yang sangat ketat dan mengikat, sehingga menjadi penghambat proses Pendidikan. Fleksibilitas sangat perlu diberikan, mengingat perubahan dan dinamika proses

Pendidikan yang berubah sangat cepat, perlu diantisipasi dan disesuaikan dengan cepat pula.

Standar penilaian ini berupa pilihan-pilihan penilaian secara kreatif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dimana penilaian lebih banyak berbasis kinerja, inovasi dan kreativitas, selain penilaian konvensional. Belakangan ini, sistem penilaian hasil proses Pendidikan semakin terbuka, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Hal tersebut membuat guru/dosen dan peserta didik lebih mudah dalam memahami proses penilaian dan hasilnya. Standar penilaian berorientasi mengeksplorasi kemampuan guru/dosen dan peserta didik, bukan yang bersifat menghakimi. Proses penilaian lebih banyak melihat potensi dan keunggulan, bukan untuk menjustifikasi ketidakkulusan. Hal ini sangat penting mengingat setiap individu pasti mempunyai potensi dan talenta yang diberikan Tuhan dan terus dapat dikembangkan menjadi makin berkembang, bermanfaat dan menjadi unggulan setiap peserta didik atau murid.

Rublik penilaian dibuat secara transparan dan akuntabel. Proses penilaian mendukung dihasilkannya lulusan yang mempunyai *knowledge*, *skill* dan *attitude* yang baik dan unggul sesuai potensi individu. Dalam hal ini, setiap peserta didik dapat dinilai berbeda-beda cara, namun satu tujuan menggali potensi dan mengembangkannya menjadi kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.



d. Standar Nasional Pendidikan Masa Depan dengan Delapan Format

Yang dimaksudkan dengan SNP masa depan delapan format adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standard proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar sarana prasarana. Dengan tetapnya pemberlakuan delapan standar, hal-hal yang menjadi catatan DKT diantaranya: 1) Bahasa yang mudah dipahami, 2) Indikator kerja yang jelas, 3) pembahasan yang tidak rumit, 4) Fokus tajam, mendasar dan sederhana. Empat catatan ini penting sekali dipertimbangkan agar pengelola pendidikan memiliki persepsi yang sama.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

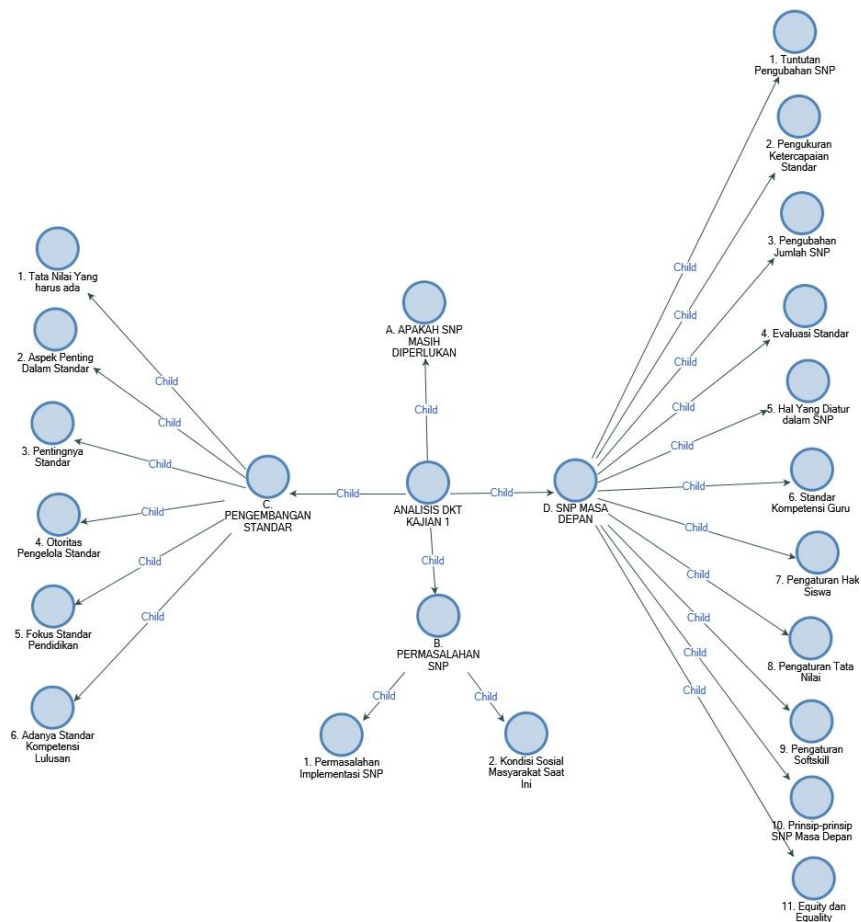
## **BAB VI**

### **REKOMENDASI**

Tim Ahli kajian 1 mengungkap beberapa hal melalui kajian kualitatif data DKT 1 dan 2, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diperkuat menggunakan hasil analisis *software Nvivo*. Hasil DKT memunculkan berbagai bentuk rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi tersebut merupakan hasil pensarian DKT 1 dan 2, sekiranya hasil rekomendasi akan menjadikan suatu rujukan pengembangan Standar Nasional Pendidikan Masa Depan. Rekomendasi tersebut difokuskan beberapa hal, antara lain adalah:

#### **A. Keberadaan Standar Pendidikan**

Diskusi kelompok terpumpun memunculkan bahwa semua sepakat atas pentingnya keberadaan sebuah standar pendidikan yang mengatur secara nasional. Standar pendidikan yang berlaku secara nasional namun tetap memuat *local content* yang mampu mengeksplorasi dan menguatkan keunggulan satuan pendidikan daerah satu dengan yang lain. Hasil DKT yang telah dirangkum sebelumnya, diperkuat menggunakan analisis hasil software NVIVO berikut.



**Gambar 6.**

Bagan hasil analisis menggunakan Nvivo

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **B. Arti Pentingnya Standar Nasional Pendidikan**

1. Standar Pendidikan Nasional sangat diperlukan, sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan di semua tingkatan.
2. Standar yang disusun memberikan kesempatan bagi satuan Pendidikan mengeksplorasi diri untuk mencapai keunggulan sesuai visi misi yang diemban

3. Standar Pendidikan tidak boleh menjadi alat untuk mengekang kemajuan dan keunggulan yang ingin dicapai.
4. Pelaksanaan standar tidak bersifat memaksa satuan Pendidikan, namun menjadi salah satu rujukan utama dalam pelaksanaan Pendidikan sesuai tingkatan masing-masing.
5. Standar nasional Pendidikan hanya memuat hal-hal pokok saja yang diperlukan oleh satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas proses Pendidikan dan kualitas lulusan yang handal dan berdaya saing tinggi.
6. Standar nasional Pendidikan mendorong peningkatan literasi dan belajar sepanjang hayat.

### **C. Permasalahan SNP**

Permasalahan yang muncul antara lain adalah:

1. Permasalahan implementasi terkait SNP. Pertama, bahasa kurang operasional. Standar nasional pendidikan seharusnya memiliki bahasa yang jelas dan operasional, sehingga tidak bersifat multi-tafsir. Kedua, pemahaman mengenai SNP tidak menyeluruh mulai dari pengambil kebijakan sampai pelaksana.
2. Permasalahan kondisi sosial masyarakat. Keadaan Indonesia yang sangat beragam, mengkondisikan berbagai “jenis kesanggupan” dalam memenuhi SNP.

Permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, menjadi dasar perlunya dilakukan pengembangan standar dan perancangan Standar Nasional Pendidikan di masa depan.

Pemerintah sebagai pemegang mandat konstitusi mengembangkan sinergi lintas sektor dalam merumuskan Standar

Nasional Pendidikan Masa Depan. Standar Nasional Pendidikan Masa Depan dirumuskan dan dikembangkan dengan mengacu pada kebutuhan abad 21, dan memberikan keleluasan pada penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan untuk berkreativitas dan berinovasi dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

SNP masa depan dirumuskan dengan mempertimbangkan *equity* dan *equality* serta sedapat mungkin dicapai oleh semua satuan pendidikan, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan bahkan di daerah terpencil sekalipun. Dengan demikian akan membawa dampak pada kemampuan seluruh satuan pendidikan untuk memenuhi dan bahkan mampu melampaui standar.

#### **D. Pengembangan Standar**

Dalam mengembangkan Standar Pendidikan aspek *urgensi* dan fokus pengembangan sebuah standar pendidikan harus menjadi pertimbangan utama. Tata nilai dan aspek penting sebuah standar pendidikan, dan *outcome* atau SKL juga menjadi beberapa hal yang harus dirumuskan dalam proses pengembangan sebuah standar. Otorisasi/kewenangan pengelolaan dan pelaksana standar juga menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting terkait dengan implementasi standar, sehingga tidak semuanya menjadi beban satuan pendidikan.

Tujuan SNP: 1. Menjadi acuan pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan; 2. Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan dan *outcome* Pendidikan; 3. Memberi kesempatan tumbuhnya kreativitas dan inovasi Pendidikan; dan 4. Memberi ruang

pengembangan keunggulan dan potensi daerah dan unit penyelenggaran Pendidikan

### **E. SNP Masa Depan**

Terdapat beberapa hal yang menjadi titik-titik krusial yang perlu diperhatikan ketika mengembangkan SNP masa depan, antara lain: demand/tuntutan perubahan SNP, pengukuran ketercapaian standar, perubahan jumlah SNP, adanya hasil Evaluasi pelaksanaan standar nasional saat ini, kriteria dan beberapa hal yang harus diatur dalam standar nasional pendidikan masa depan, standar kompetensi guru, pengaturan hak siswa, pengaturan tata nilai, pengaturan *softskills*, pengaturan prinsip-prinsip, dan kesetaraan (*equity*) dan kualitas (*quality*) pendidikan di masa yang akan datang.

Dalam menyusun dan menetapkan standar pendidikan di masa depan, **pendekatan pertama** yang dapat dilakukan adalah melakukan pengelolaan terpusat seperti yang sudah dilakukan sekarang (*Top Down*). Dengan tetapnya pemberlakuan delapan standar, hal-hal yang menjadi catatan DKT diantaranya:

- a. Bahasa yang mudah dipahami,
- b. Indikator kerja yang jelas,
- c. pembahasan yang tidak rumit,
- d. Fokus tajam, mendasar dan sederhana.

Empat catatan ini penting sekali dipertimbangkan agar pengelola pendidikan memiliki persepsi yang sama.

**Pendekatan kedua** yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down* dalam pengertian pemerintah pusat mengatur hal-hal mendasar yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan *bottom-up* dalam



pengertian pemerintah daerah dan masyarakat diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan mengedepankan nasionalisme dan menggali kearifan lokal yang dimiliki.

Hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah salah satunya mengenai kewenangan pengelolaan pendidikan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat tanpa mengabaikan aspek-aspek.

1. Aspek pengelolaan
2. Aspek kearifan lokal
3. Aspek peran serta masyarakat
4. Aspek jenjang pendidikan



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu disusun dengan baik mengikuti perkembangan dan kebutuhan semua pemangku kepentingan. SNP harus mampu menjawab tantangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), serta pergaulan masyarakat dunia. SNP masa depan, perlu disusun dengan mempertimbangkan fleksibilitas dalam implementasinya, terutama agar mampu mengakomodasi dinamika di tengah masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Ruang kreativitas dan inovasi perlu diberikan porsi yang memadai dalam rangka mendorong dan memfasilitasi pengembangan keunggulan dan potensi daerah serta unit penyelenggara pendidikan.

Pendidikan Masa Depan membutuhkan standar yang mampu menjadi acuan bagi transformasi pendidikan di Indonesia. Konsep Standar Nasional Pendidikan Masa Depan harus disusun berdasarkan *demand*, kompetensi, karakter, Pemberlakuan Standar Pendidikan dan Pengelolaan Standar. Bentuk Standar Nasional Pendidikan Masa Depan dikembangkan berdasarkan prinsip, isi, kriteria yang memperhatikan pengembangan kepribadian peserta didik. Bentuk SNP Masa Depan ini dikemas dalam beberapa Format yang bisa dipilih oleh pengambil kebijakan.

Pancasila dan Kebhinnekaan menjadi landasan bagi pengembangan keunggulan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Daerah diberi ruang untuk mengembangkan standar sesuai kebutuhan dan keunggulan daerah, dalam kerangka

pengembangan dan pembangunan nasional. Unit pelaksana Pendidikan diberi ruang untuk mengembangkan standar sesuai keunggulan yang ingin dicapai dalam kerangka kontribusi bagi kemajuan bangsa.

SNP masa depan, disusun dengan lebih sederhana namun fokus pada beberapa hal mendasar yang perlu dibuat dalam bentuk standar. SNP masa depan dibuat dalam bahasa yang mudah dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga menghasilkan output dan outcome yang tinggi sesuai dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal-hal yang sangat bersifat administrasi yang rumit dan tidak mudah untuk dikerjakan, perlu dikurangi bahkan dihilangkan. Fokus pada keunggulan yang ingin dibangun dan hasilkan, mengurangi kerumitan dan energi yang terbuang pada kegiatan administrasi. Sebagai panduan umum, SNP masa depan diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi satuan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berjiwa Pancasila, cinta tanah air, berbudaya, toleran, berkarakter kuat, tangguh, tidak mudah menyerah dan selalu berbuat kebaikan bagi sesama.

SNP masa depan diharapkan dapat menghasilkan *outcomes*:  
1. Manusia Indonesia yang berbudaya; 2. Manusia Indonesia yang cinta tanah air, cinta keberagaman, berjiwa religius dan toleransi;  
3. Manusia Indonesia yang berintegritas, professional dan berdaya juang tinggi; 4. Manusia Indonesia yang mampu mengembangkan IPTEKS dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan bersama; dan 5. Manusia Indonesia yang mampu masuk di pergaulan dunia dalam kesetaraan dan kontribusi nyata untuk kemajuan bersama.

Semoga semua upaya untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berbudaya, dapat terwujud dengan SNP masa depan yang lebih sederhana, mudah dipahami, fokus dan sesuai dengan perkembangan saat ini dan masa mendatang. Standar Nasional Pendidikan telah dilaksanakan. Perbaikan dan perubahan krusial perlu dilakukan. Kajian konsep dan bentuk standar nasional pendidikan masa depan memberikan satu sudut pandang berbeda mengenai rekomendasi-rekomendasi yang dapat dipertimbangan dalam menyusun SNP Masa Depan.

Semoga Naskah ini senantiasa membawa manfaat, untuk pengembang kebijakan, pelaksana kebijakan, evaluator, dan akademisi sebagai sumber rujukan referensi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Alismail, H. A., & McGuire, P. (2015). 21st century standards and curriculum: Current research and practice. *Journal of Education and Practice*, 6(6), 150-154.
- APEC. (2020). *Informal Consultation on the 7th APEC Education: APEC Education Strategy 2016-2030*. APEC.
- Bennis, W., & Nanus, B. (1985). The strategies for taking charge. *Leaders, New York: Harper. Row*, 41.
- Bloom, B. S., Krathwohl, D. R., & Masia, B. B. (1984). Bloom taxonomy of educational objectives. In *Allyn and Bacon*. Pearson Education.
- BongHee, J., Peterson, M., Sangcheol, K., Jonghyuk, K., Eui-Han, L., Chi-Young, J., Park, Y., Mee-Ryang, J., & Woojin, L. Educational Thought, Systems and Content.
- Brookfield, S. D. (2009). Self-directed learning. In *International handbook of education for the changing world of work* (pp. 2615-2627). Springer.
- Cassen, R., Feinstein, L., & Graham, P. (2009). Educational outcomes: Adversity and resilience. *Social Policy and Society*, 8(1), 73-85.
- Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). *Depression and anxiety*, 18(2), 76-82.
- Cook, J. W. (2019). Learning at the Edge of History. In *Sustainability, human well-being, and the future of education* (pp. 1-29). Palgrave Macmillan, Cham.

- Cooper, B. S., Fusarelli, L. D., & Randall, E. V. (2004). *Better policies, better schools: Theories and applications*. Pearson College Division.
- Cooperation, O. f. E., & Development. (2018). The future of education and skills: Education 2030. *OECD Education Working Papers*.
- Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., Magni, P., & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 3(1), 1-20.
- De Meuse, K. P., Dai, G., & Hallenbeck, G. S. (2010). Learning agility: A construct whose time has come. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 62(2), 119.
- DeRue, D. S., Ashford, S. J., & Myers, C. G. (2012). Learning agility: In search of conceptual clarity and theoretical grounding. *Industrial and Organizational Psychology*, 5(3), 258-279.
- Dictionary, C. (2018). Electronic resource. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slang>.
- Draine, C., & Hall, B. (2000). Culture shock: A guide to customs and etiquette. *Graphics Arts Center Publishing Company, Portland, OR*.
- Drucker, P. (2012). *Managing in the next society*. Routledge.
- Durkheim, E., & Ginting, L. (1990). Pendidikan moral: Suatu studi teori dan aplikasi sosiologi pendidikan.
- Ehlers, U.-D., & Kellermann, S. A. (2019). *Future skills: The future of learning and higher education*.
- Goodwin, T. (2018). *Digital Darwinism: Survival of the fittest in the age of business disruption*. Kogan Page Publishers.



Indonesia, K. B. B. (2008). Departemen Pendidikan Nasional. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*

[Record #638 is using a reference type undefined in this output style.]

Kbbi, K. B. B. I. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan dan Budaya.*

Kids, B. f. (2019). Framework for 21st century learning. *Partnership for 21st Century Learning.*

Latif, Y. (2020). *PENDIDIKAN YANG BERKEBUDAYAAN.* Gramedia Pustaka Utama.

Lennick, D., & Kiel, F. (2007). *Moral intelligence: Enhancing business performance and leadership success.* Pearson Prentice Hall.

Lombardo, M. M., & Eichinger, R. W. (2000). High potentials as high learners. *Human Resource Management, 39(4), 321-329.*

Manyika, J., & Chui, M. (2014). Digital era brings hyperscale challenges. *Financial Times, 13.*

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American journal of sociology, 83(2), 340-363.*

[Record #670 is using a reference type undefined in this output style.]

Mudyahardjo, R. (2016). *Pengantar pendidikan: sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia.* Rajawali Press.

Musthafa, B., Hamied, F. A., & Zein, S. (2018). Enhancing the quality of Indonesian teachers in the ELF era: 175Policy

- recommendations. In *Teacher Education for English as a Lingua Franca* (pp. 175-190). Routledge.
- Nishimura, S. (1995). The development of Pancasila moral education in Indonesia. *Japanese Journal of Southeast Asian Studies*, 33(3), 303-316.
- Oxborne, D., & Gaebler, T. (1995). Reinventing government. *Journal of Leisure Research*, 27(3), 302.
- Pendidikan, K., & Indonesia, K. R. (2017). Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. *Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Reivich, K., & Shatté, A. (2002). *The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. Broadway books.
- Russel, B. (1956). *Mysticism and logic and other essays*. London, UK: George Allen & Unwin.
- Santrock, J. W. (2018). *Educational psychology*. McGraw-Hill Education New York.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Currency.
- Sixbey, M. T. (2005). *Development of the family resilience assessment scale to identify family resilience constructs*. University of Florida.
- Spady, W. G. (1994). *Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers*. ERIC.
- Statistik, B. P. (2018). *Statistics Indonesia*. *Jakarta: Statistics Indonesia*.
- Strauss, V. (2013). Nelson Mandela on the power of education. *The Washington Post*, 4-13.

Tim PPK; Kemendikbud, P. S. (2017). Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter. *Jakarta: kemendikbud.*

UST, T. D. K. (2020). *Ketamansiswaan*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Watson, A. (2002). *The Limits of Independence*. Routledge.

[Record #637 is using a reference type undefined in this output style.]

Weick, K. E. (1976). Educational organizations as loosely coupled systems. *Administrative science quarterly*, 1-19.

Whiting, K. (2020). These are the top 10 job skills of tomorrow—and how long it takes to learn them. World Economic Forum,

Wolin, S. J., & Wolin, S. (2010). *The resilient self: How survivors of troubled families rise above adversity*. Villard.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## LAMPIRAN

### 1. DKT 1 (Hasil)

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
1. Sebagai sebuah standar nasional di bidang pendidikan, sejauhmana Ibu/Bapak memahami SNP yang sekarang berlaku?	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SNP merupakan suatu hal yang diperlukan untuk memberi acuan yang sah kepada semua satuan pendidikan.</li> <li>✓ SNP juga dijadikan sebagai pemersatu satuan pendidikan.</li> <li>✓ Standar sangat diperlukan karena itu yang harus dicapai.</li> <li>✓ Standar adalah sesuatu yang ingin dicapai</li> <li>✓ Adanya standar melalui UU Sisdiknas tidak menuntut keseragaman</li> <li>✓ Standar hanya merupakan kriteria minimal yang harus dituju oleh masing-masing satuan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar masih diperlukan sebagai rujukan penyelenggaraan pendidikan</li> <li>• 8 SNP wajib dikonstruksi ulang. SNPnya baik tapi sulit dalam implementasinya.</li> <li>• Bahasa dalam SNP sulit untuk dipahami dengan mudah</li> <li>• Ada keinginan untuk tidak menggunakan standar yang disebabkan oleh krisis kepercayaan terhadap sekolah. Seorang siswa ingin belajar seperti apa yang diinginkan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya disparitas di Indonesia. Sehingga masih diperlukan adanya standar.</li> <li>2. Implementasi/internalisasi standar belum sangat nampak. Namun belum seluruhnya merata. Masih ditemukan rendahnya layanan pendidikan, krisis moral dan karakter.</li> <li>3. Standar yang berlaku sekarang, secara konsep tidak ada masalah (sudah baik). Tapi yang jadi masalah di implementasinya. Siapa menerjakan apa belum berjalan dengan baik. Bahkan ada kecenderungan, yang diminta agar baik hanya siswanya, tapi tidak diberi contoh bagaimana menjadi baik. Tidak ada Role Model, malah yang ada keadaan yang kontra produktif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SNP merupakan suatu hal yang diperlukan untuk memberi acuan yang sah kepada semua satuan pendidikan. Dikarenakan adanya disparitas di Indonesia, sehingga pelaksanaan belum menunjukkan peningkatan mutu secara merata.</li> <li>b. Masih ditemukan rendahnya layanan pendidikan, krisis moral dan karakter.</li> </ol>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
2. Dari pengalaman Ibu/Bapak, apakah implementasi SNP yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan PT merupakan suatu hal yang dengan mudah dapat dilakukan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan</li> <li>✓ Kondisi pendidikan di daerah yang begitu beragam</li> <li>✓ Standar tidak perlu diberlakukan secara sekaligus, tapi bertahap (dalam jangka waktu 5 tahun)</li> <li>✓ Jika ada daerah yang belum bisa menerapkan standar ini, maka Daerah bisa membuat/ mengusahakan SPM (standar pelayanan minimal) shg bisa mencapai atau bahkan melampaui SNP yg ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNP yang ada sekarang sudah sangat lengkap, namun implementasi standar di lapangan sangat sulit</li> <li>• SNP sebaiknya fokus, tajam, mendasar dan sederhana sehingga mudah digunakan oleh satuan pendidikan/PT.</li> <li>• SNP yang ada sekarang itu bertele-tele sulit untuk dilaksanakan.</li> <li>• Konteks penerapan standar terhadap guru dan murid tidak mudah dilakukan, ada SKL, Standar Isi/Proses/Penilaian dan juga UU Guru&amp;Dosen yang perlu diperhatikan dengan baik.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesenjangan antara <b>dokumen dan realitas</b>. Implementasi sangat tergantung dengan kesiapan SDM, Sarpras, dll.</li> <li>2. Urutan disparitas: SDM, Sarpras berpengaruh terhadap Proses, isi, SKL, diperparah oleh penilaian.</li> <li>3. Idealitas standar penilaian sangat ideal. Namun posisi lapangan sangat jauh dari dokumen.</li> <li>4. Kompetensi inti terkait dengan sikap tata nilai dan karakter. Dokumen sudah bagus, namun orang yang mengimplementasikan belum berkarakter.</li> <li>5. Perubahan kebijakan dirasa sangat menyulitkan. Kondisi negara indonesia yg memiliki tingkat kesenjangan/disparitas, menjadi tantangan implementasi tersendiri.</li> <li>6. Pertama SNP yang berlaku sekarang tidak sederhana (kompleks?, tidak semua orang dapat dengan mudah memahaminya. Mungkin perlu disederhanakan.(Sutrisno).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kesenjangan antara <b>dokumen dan realitas</b>. Implementasi sangat tergantung dengan kesiapan SDM, Sarpras, dll.</li> <li>b. Dikarenakan disparitas sehingga, banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan.</li> <li>c. Problem paling besar ada di Implementasinya. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinergi antar lembaga, tidak ada pembagian kewenangan antara pusat, daerah juga satuan pendidikan, dan yang paling parah tidak adanya konsistensi antara standar (sikap) yang ingin diciptakan dengan perilaku para pihak yang punya otoritas.</li> </ol>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
			<p>Problem paling besar ada di Implementasinya. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinergi antar lembaga, tidak ada pembagian kewenangan antara pusat, daerah juga satuan pendidikan, dan yang paling parah tidak adanya konsistensi antara standar (sikap) yang ingin diciptakan dengan perilaku para pihak yang punya otoritas. Contoh kongkrit: Ketidak jujuran yang terjadi dalam pelaksanaan UAN, dikarenakan Conflict of interest dari pemegang otoritas sendiri.</p>	
<p>3. Adakah permasalahan yang Ibu/Bapak temukan ketika satuan pendidikan berusaha melaksanakan SNP?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi pendidikan di daerah yang begitu beragam.</li> <li>• Beragamnya gap yang ada baik di daerah maju atau terdepan.</li> <li>• Standar kita terlalu melebar, ada 8 standar yang tidak setara satu sama lain. Jika terlalu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahasa standar perlu diturunkan ke bahasa yang mudah dipahami</li> <li>- Ada standar yang tidak bisa diukur dalam melihat hasil implementasinya sehingga tidak ada mekanisme untuk mendapatkan umpan balik ketercapaiannya.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kita harus melihat SNP yang bukan hanya matang secara konseptual – namun tantangannya ada ditahap Implementasi.</li> <li>2. PJJ membuka fakta yang tidak mengejutkan-kita masih punya masalah di standar sarpras.</li> <li>3. Dari sisi standar isi-kita harus akui, aspek sains matematik, literasi kita masih jauh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar yang ada perlu di ukur, kemudian petakan mana yang tercapai dan mana yang belum tercapai, kemudian kita analisis umpan balik terhadap sekolah dan guru mana yang harus diperbaiki</li> <li>b. Ada keterpisahan antara penanggung</li> </ol>



Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>melebar maka kurang fokus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar yang ada perlu di ukur, kemudian petakan mana yang tercapai dan mana yang belum tercapai, kemudian kita analisis untuk membentuk umpan balik terhadap sekolah dan guru mana yang harus diperbaiki</li> <li>• Ada keterpisahan antara penanggung jawab setiap aspek seperti penanggungjawab kurikulum, assesmen, hendaknya menjadi satu kesatuan lembaga yang profesional.</li> </ul>		<p>Apakah ini berkaitan dengan evaluasi standar isi kita.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Standar Biaya-kecenderungan KS menjadi apatis.</li> <li>5. Banyak kesulitan yang dihadapi Satuan Pendidikan, mulai dari pemahaman SNPnya yang tidak sederhana, sampai pada ketidak sediaan input (Sarpras, Pendididk n Tendik, Biaya) yang sangat menghambat pelaksanaan atau implementasi SNP. Sementara semua itu (Input) bukan menjadi tanggung jawab dan wewenangnya.</li> </ol>	<p>jawab setiap aspek seperti penanggungjawab kurikulum, assesmen, hendaknya menjadi satu kesatuan lembaga yang profesional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Bahasa Standar yang sulit dipahami pelaksana.</li> <li>d. Kita harus melihat SNP yang bukan hanya matang secara konseptual – namun tantangannya ada ditahap Implementasi.</li> </ol>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
4. Menurut Ibu/Bapak, adakah aspek yang <b>dirasa sangat penting untuk diatur dalam sebuah standar</b> , namun belum ada pengaturan aspek tersebut dalam standar yang diberlakukan saat ini?	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi guru</li> <li>✓ <i>Updating</i> dan sistemnya, BSNP tidak perlu membuat standar, namun dibuat oleh satuan pendidikan, BSNP cukup membuat <i>guideline</i> saja</li> <li>✓ Buat sistem yang bisa diakses oleh semua pihak misalkan sistem pelaporan pelaksanaan dan lain sebagainya.</li> <li>✓ Harus terlebih dahulu memastikan hal yang perlu diprediksi terkait keseimbangan baru tentang perubahan masa depan, seperti Pendekatan teknologi, Membangun budaya inovasi, memberikan fasilitas proses belajar yang sangat</li> </ul>	<p>Standar dengan fokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehat nalar</li> <li>• Sikap pribadi yang unggul</li> <li>• Melek teknologi digital</li> <li>• Menjadi warga Indonesia dulu baru menjadi dunia</li> </ul> <p>Pengaturan tentang peran orang tua dan peran pemerintah daerah perlu dibuatkan sehingga pendidikan bisa berjalan secara utuh.</p>	<p>a. Akan lebih baik-standar nasional diambil dari KHD (tokoh pendidikan asli Indonesia). Pendidikan untuk semua.</p> <p>b. Terkait dengan SNP masa depan yang memiliki dimana komunikasi dan informasi semakin terbuka, dan perubahan yang sangat cepat, maka sngat penting bagi siswa untuk dibekali kompetensi berfikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Agar mereka tidak hanyut dalam perubahan yang tidak menentu, maka disamping kompetensi tersebut, perlu juga untuk ditanamkan kepribadian Indonesia (Pancasila). Salah satunya dengan mengembangkan pendikan ala KHD yang selain sangat lekat dengan budaya bangsa juga sangat intrusive sebagaimana halnya model pendidikan yang sesuai tuntutan jaman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi guru</li> <li>✓ Standar dengan fokus pada: Sehat nalar, Sikap pribadi yang unggul, Melek teknologi digital, Menjadi warga Indonesia dulu baru menjadi dunia.</li> <li>✓ Akan lebih baik-standar nasional diambil dari KHD (tokoh pendidikan asli Indonesia). <b>Pendidikan untuk semua.</b></li> <li>✓ Fokus standar kompetensi dan reporting sistem, mengembangkan, menyusun, mengukur, memetakan, menganalisis, memberikan umpan balik dan upgrade standar.</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>nyaman di tengah keberagaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hal-hal yang jelas-jelas diatur dalam konstitusi, atau <i>legal standing</i>.</li> <li>✓ Perlu ada pemusatan atau konsentrasi standar mana yang paling penting.</li> <li>✓ Fokus standar kompetensi dan reporting sistem, mengembangkan, menyusun, mengukur, memetakan, menganalisis, memberikan umpan balik dan upgrade standar.</li> </ul>			
5. Prinsip-prinsip apa saja yang perlu diperhatikan dan dibutuhkan dalam penyusunan dan penerapan SNP masa depan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kondisi Indonesia majemuk, perlu diperhatikan penentuan standar minimal dengan memperhatikan kondisi tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu memerhatikan bahwa SNP ditujukan untuk membentuk perilaku Sehat nalar, sikap pribadi unggul, melek teknologi digital, dan menjadi warga dunia</li> <li>• SNP perlu memerhatikan cara belajar abad 21 (WEF 2020)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pentingnya landasan</b>, agar tidak menjadi technical. Apabila dilihat dari research yang ada sekarang-standar dirasa penting dikarenakan sering dihubungkan dengan akreditasi dan Bingung siapa yang menentukan standard. Ada program, ada institusinya,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlunya landasan (filosofis) standar yang jelas, eksplisit diuraikan bahkan dibuat SOPnya. Salah satu nilai yang sangat penting untuk dijadikan landasan bagi kita bangsa yang sangat majemuk ini adalah</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar jangan membelenggu</li> <li>• Harus dapat dikembangkan sesuai potensi dan keunggulan daerah serta tuntutan perkembangan yang ada</li> <li>• Peran Pemerintah untuk memfasilitasi dalam penerapan standar, namun dalam situasi sekarang masih ada hal-hal yang Pemerintah masih perlu ikut mengatur.</li> </ul>	<p>dan ada standar<sup>2</sup> yang dirasa sangat teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya landasan (filosofis) standar yang jelas, eksplisit diuraikan bahkan dibuat SOPnya. Salah satu nilai yang sangat penting untuk dijadikan landasan bagi kita bangsa yang sangat majemuk ini adalah nilai Equity dan Equality. Dari sini berangkatnya untuk menuju Quality bagi semua anak Indonesia.</li> </ul>	<p>nilai <b>Equity dan Equality</b>.</p> <p><b>b.</b> Harus dapat dikembangkan sesuai potensi dan keunggulan daerah serta tuntutan perkembangan yang ada</p>
6. Apakah diperlukan ada <b>pengaturan tentang tata nilai</b> yang dibunyikan sebagai bagian dari standar dalam SNP masa depan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perlu ada standar yang menyangkut pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap</li> <li>✓ Perlu juga memperhatikan Kompetensi transformatif yang mengarah pada kemampuan memperbaharui sesuatu yang akan menghasilkan <i>critical</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku peserta didik (karakter)</li> <li>• Mengejar kualitas lulusan</li> <li>• Aktualisasi diri siswa dan mahasiswa</li> <li>• Membangun tradisi Pendidikan bermutu</li> <li>• Perlu diperhatikan bahwa pengaturan SNP mengedepankan menjadi Manusia Indonesia Dahulu, baru menjadi Warga Dunia.</li> <li>• Dalam UU Sisdiknas, SNP sudah dengan jelas</li> </ul>	<p>Sangat perlu dan harus eksplisit. Alasannya supaya kita tidak terjebak dg hal<sup>2</sup> yang hanya mengukur performance (tanpa Landasan moral) serta hal yg hanya bersifat teknis.</p>	<p>Perlu juga memperhatikan:</p> <p>a. Kompetensi transformatif yang mengarah pada kemampuan memperbaharui sesuatu yang akan menghasilkan critical thinking atau 4c (kompetensi abad 21)</p> <p>b. Perilaku peserta didik (karakter)</p> <p>c. Mengejar kualitas lulusan</p> <p>d. Aktualisasi diri siswa dan mahasiswa</p>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<i>thinking</i> atau 4c (kompetensi abad 21)	mengemukakan aspek tata nilai, namun masih belum nampak pada hasil peserta didik. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agama mestinya dikemas dalam konteks pembentukan perilaku.</li> </ul>		e. Membangun tradisi Pendidikan bermutu
7. Apakah <b>landasan tujuan pendidikan nasional</b> perlu dijabarkan lagi dalam SNP masa depan?	Perlu, perlu di update sesuai kebutuhan dan perlu melihat keseimbangan baru tentang perubahan masa depan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dijabarkan dalam tata nilai: nalar dan logic yang dapat diukur.</li> <li>• Masih dapat mengacu pada apa yang tertulis dalam UU Sisdiknas</li> </ul>	Landasan dirasa sangat tepat, krn mengacu kepada UUD-sehingga mengacu kepada target-target (bukan standar) yang bersesuaian dengan UDD. Hubungan dengan demokrasi ( <b>equity</b> ), apakah memang rancangan pendidikan kita sudah betul-betul menjawab tentang equity. Secara eksplisit harus dijabarkan. Kemampuan daya tampung juga akan membatasi-hak untuk memperoleh pendidikan yg sama. Menggunakan Haknya (UUD memberikan hak yang sama bagi semua rakyat), diterima dalam sistem pendidikan dan memperoleh pendidikan yang terbaik. Tantangannya: Latar belakang demografi sangat berbeda-beda. Perbedaan latar belakang kebudayaan	<b>Perlu</b>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
			(pertimbangan cultural), <b>Quality, dan Demografi.</b>	
8. Apakah SNP masa depan memang diperlukan sebagai salah satu tolok ukur untuk pengakuan suatu sistem pendidikan sebuah negara?	Ya, kita bisa melihat di Australia ada ACARA ( <i>Australian curriculum asesmen and reporting authority</i> ) Bahkan untuk aspek pengetahuan kita dapat mengadopsi dari negara maju, karena esensi pengetahuan pada hakikatnya sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNP masih diperlukan</li> <li>• SNP perlu disesuaikan</li> <li>• Budaya struktural/hirarkis diubah menjadi budaya fungsional berbasis kompetensi</li> </ul>	(Tidak ada bahasan eksplisit tentang ini). Namun adanya model standarisasi untuk menjamin mutu pendidikan masih diperlukan, apapun nama badannya. Keempat pakar menyatakan “PERLU”, namun fleksibilitas dalam penyebutan “standar”, “etik”, “dimensi”, atau “ <b>target</b> ”. Standar dapat difungsikan untuk memastikan hak rakyat akan akses pendidikan dan hak untuk mendapatkan pendidikan terbaik dapat dipenuhi, termasuk hak bagi yang berkebutuhan khusus.	Semua peserta DKT menyatakan bahwa SNP masa depan <b>DIPERLUKAN</b>  fleksibilitas dalam penyebutan “standar”, “etik”, “dimensi”, atau “ <b>target</b> ”. Standar dapat difungsikan untuk memastikan hak rakyat akan akses pendidikan dan hak untuk mendapatkan pendidikan terbaik dapat dipenuhi, termasuk hak bagi yang berkebutuhan khusus.
9. Apa yang perlu diperhatikan dalam penerapan SNP masa depan dengan melihat fakta adanya variasi kemampuan daerah/satuan pendidikan?	Delapan standar terlalu banyak, yang perlu adalah adanya SKL, proses, pendidik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu diintegrasikan beberapa standar atau disederhanakan</li> <li>• Perlu ditambahkan standar yang dirasakan perlu yaitu standar terkait dengan peran orang tua dan peran pemerintah daerah</li> <li>• Hal-hal yang diinginkan diatur dalam sebuah standar</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem seperti apa yang mampu memenuhi tantangan di atas. AK 2045 (ajaran ki hajar dewantara).</li> <li>2. Penyesuaian pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan fisik dan psikologis, mental spiritual dari peserta didik.</li> <li>3. Pembagian tanggungjawab antara pusat dan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengurangan jumlah standar yang diatur dalam standar pendidikan.</li> <li>b. Standar berorientasi pada peserta didik.</li> <li>c. Ditambahkan standar yang mengatur peran orang tua.</li> </ol>



Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
		<p>mestinya memiliki konteks kedaerahan sehingga setiap daerah bisa menerapkannya dengan baik. Jangan menerapkan sebuah standar secara nasional tanpa memerhatikan konteks kedaerahan yang ada.</p>	<p>Apakah otonomi daerah menjamin kualitas? (adanya politisasi)</p> <p>4. Target bukan standar (namun standar akan diberlakukan kepada siapa). Rumuskan equity dan quality. Standar yang 8 ini, apabila dilaksanakan. “Dimensi Knowing” what, “Dimensi doing” how do you do what you know.</p> <p>5. Performance merunut pada outcome.</p> <p>6. Bagaimana kita merancang sistem yang mampu mendukung kualitas outcome.</p> <p>7. Harus mampu mengukur equity benar-benar menjamin kualitas.</p> <p>8. Dokumen disederhanakan. Ex dokumen karakter. Tidak usah</p> <p><b>8. Standar kompetensi sikap dan tata nilai, standar pengetahuan dan standar keterampilan.</b> Dijaga sustainability-nya (setiap 5 tahun dievaluasi).</p>	

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
10. Apakah pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik perlu diatur/dipertegas dalam SNP?	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ada pengaturan lain yang lebih kuat dari standar, misalnya undang-undang hak belajar.</li> <li>✓ Hendaknya bukan hanya kuantitas, tapi kualitas, pastikan hak belajar sudah terpenuhi dengan standar</li> <li>✓ Lebih baik konsentrasi ke standar yang berbentuk konten, bila perlu ke standar proses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dipertegas terkait dengan Perilaku peserta didik (karakter)</li> <li>• Aktualisasi diri siswa dan mahasiswa</li> <li>• Keberagaman</li> <li>• Menjamin, paling tidak, untuk pendidikan dasar menengah, seorang siswa dapat masuk/melanjutkan sekolah SD/SMP/SMA tanpa dibebani dengan persyaratan yang berlebihan.</li> </ul>	Bagaimana Supaya pemenuhan hak bisa dilakukan. Menjamin institusi menyadari adanya knowledge based society, angkatan kerja berbasis pengetahuan.	Terdapat pengaturan yang mempertegas pemenuhan hak belajar/hak peserta didik.
11. Seberapa penting pengaturan terkait aspek input dalam proses pendidikan tetap diberlakukan dalam SNP masa depan?	<p>Aspek sarpras dan pembiayaan sebaiknya tidak dibuat standar karena menjadi tanggungjawab diluar sistem pendidikan dan guru.</p> <p>Yang perlu distandarkan yang kaitannya dengan konten, SKL, guru, dan standar pembelajaran</p>	Aspek input perlu diatur yang pokok-pokok saja. Aspek input perlu memperhatikan keberagaman, keunikan dan potensi masing-masing daerah	<p>1. Proses penting dalam pendidikan-input tidak kalah penting. Perbedaan intake berbeda-beda di seluruh indonesia-apalagi dikaitkan dengan kebijakan zonasi.</p> <p>2. Guru-guru tidak ada dalam 1 payung: ada yang di pusat, ada yg didaerah, ada yang data di provinsi, ada yg dikabupaten/kota. BSNP-</p>	Aspek input perlu diatur yang pokok-pokok saja. Aspek input perlu memperhatikan keberagaman, keunikan dan potensi masing-masing daerah

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
			melakukan upaya pemenuhan standar.	
12. Apakah terdapat bagian dari aspek input yang perlu diatur sebagai standar yang merupakan kewenangan dari pemerintah dan/atau sebagai standar yang sepenuhnya merupakan otoritas satuan pendidikan?	<p>Menjadi Wewenang pusat (nasional) atau kementerian</p> <p>Sukar dibuat standar</p> <p>Perlu adanya pembagian tugas atau tanggungjawab dalam tiap jenjang</p> <p>Pembagian wewenang daerah hanya untuk sarpras</p> <p>Pusat: BNSP → tanggung jawab melengkapi aspek input agar wewenang daerah hanya utk sarpras</p> <p>Undang-undang pusat dan peraturan daerah perlu adanya keharmonisan.</p> <p>Distrik lebih banyak pada pemeliharaan sarpras dan BOS</p>	<p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calon siswa tidak perlu tes, cukup dengan batasan usia (pendidikan dasar dan menengah)</li> <li>• Perlu standar sarana prasarana PJJ</li> <li>• Pemerintah cukup memfasilitasi hal-hal yang terkait dengan aspek input dan serahkan kepada masyarakat untuk pelaksanaan. Namun dalam situasi sekarang Pemerintah nampaknya juga masih perlu diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang memang diperlukan.</li> </ul>	<p>Sinergitas BSNP, direktorat penjaminan mutu, dan BAN PT menjadi penting, agar tidak parsial. Dapodik dapat dipergunakan sebagai database.</p>	<p>Aspek input menjadi wewenang pusat/nasional dan kementerian, namun dengan menjalin sinergitas dengan instansi lain sehingga tidak bekerja secara parsial.</p>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>Propinsi tanggungjawabnya pada gaji guru, teknologi, infrastruktur.</p> <p>Pusat mengatur perimbangan yang lemah di daerah.</p> <p>BSNP perlu ada isu tugas dan pembagian tanggungjawab antara wewenang pusat dan daerah.</p> <p>Perlu ada perimbangan dari sisi anggaran agar standar dapat tercapai dengan baik</p> <p>Kinerja guru Etika guru → non-partisan</p> <p>Ada beberapa standar yg tidak pernah ada ukuran</p> <p>Ada 2 issue yang diatur dalam Konstitusi ✓ isu terkait usia prasekolah dan dikdasmen yang</p>			

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>belum tertampung oleh pendidikan, padahal pada Pasal 31 ayat 1: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Peserta didik), jumlah ini perlu dipertimbangkan</p> <p>- Pendidik: uji kompetensi pendidik yang sangat rendah</p>			
<p>13. Apakah hal-hal yang terkait dengan aspek pembiayaan, pendidik dan tendik, serta Sarpras masih perlu diberlakukan sebagai bagian dari aspek input dalam pengaturan standar dalam proses pendidikan? Mengapa aspek-aspek tersebut</p>	<p>Standar tendik dan kompetensi yang paling penting. Terkait pembiayaan, buat saja pengaturan menteri atau pengaturan dirjen atau diserahkan ke daerah. SNP bisa menjadi penekan kepada pemerintah untuk memenuhi komitmen konstitusi tentang pembiayaan. Pembiayaan dan sarpras, bisa disusun oleh lembaga lain bahkan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan ditanggung negara</li> <li>• Bantuan dana ke sekolah</li> <li>• Tenaga pendidik dan kependidikan</li> <li>• Sarpras</li> </ul> <p>Sarana dan pr.asarana tidak harus sama, tetapi sesuai dengan potensi dan kontekstual masing-masing daerah</p> <p>Pemerintah tidak perlu ikut campur secara teknis.</p>	<p>Menyederhanakan konsep standar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar tendik dan kompetensi yang paling penting.</li> <li>b. Sarana dan prasarana tidak harus sama, tetapi sesuai dengan potensi dan kontekstual masing-masing daerah</li> <li>c. Konsep standar perlu disederhanakan sehingga mampu dipahami dengan baik sampai ke pelaksana.</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
<p>masih perlu diberlakukan? Apakah ada aspek lain yang perlu ditambahkan atau ada aspek yang sekarang diberlakukan sebaiknya dihilangkan?</p>	<p>Bisa juga melalui UU, UU yang ada lebih baik mengatur bagaimana pengelolaan dana yang ada.</p> <p>Standar utama: standar kompetensi, proses, isi, penilaian; &amp; Standar pendukung (bisa disusun belakangan saat akan implementasi)</p> <p>Standar Kompetensi siswa &amp; guru</p> <p>Kompetensi Guru harus betul-betul distandarkan oleh BSNP Etika guru juga perlu diperhatikan</p>	<p>Aspek pembiayaan perlu diperhatikan, misalnya dalam konteks 20% alokasi pendidikan dari APBD murni. Standar ini perlu jelas implementasinya sehingga pendanaan yang diperlukan memang betul-betul tersedia.</p>		



Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
<p>14. Dalam SNP yang sekarang berlaku, aspek yang terkait dengan isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengelolaan merupakan hal-hal yang masih diatur sebagai bagian dari standar. Untuk SNP masa depan, apakah aspek-aspek tersebut (isi/proses/penilaian/pengelolaan) masih dianggap penting dan relevan untuk diatur dalam suatu standar? Apakah ada aspek yang perlu ditambah atau malah dihilangkan jika dilihat berdasarkan</p>	<p>Yang paling penting pemahaman kita terkait achievement dan kompetensi. Hendaknya lebih mengarah ke kompetensi. Di tingkat SD, konsentrasi saja ke basic literasi, yang diukur aspek membaca dan menyimak, menulis, menutur, literasi matematik, aplikasi literasi dalam lingkungan tematik. Nantinya akan berpengaruh pada skill yang lebih tinggi.</p>	<p>Aspek yang diperlukan 4 hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi</li> <li>• Isi</li> <li>• Proses</li> <li>• Evaluasi</li> </ul> <p>Tidak perlu dibuat sama untuk seluruh Indonesia, perlu melihat potensi dan kearifan lokal daerah masing-masing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solusi: 8 standar tidak dievaluasi kemudian tindak lanjut (berdasarkan dokumen evaluasi). Hasil akreditasi sudah menggambarkan ketercapaian 8 standar. BAN dan dapodik, bisa mencari startegi pemenuhan 8 standar tersebut. Standar sebagai sistem (berbicara mengenai nilai), ex: standar isi, SKL. Wujud konkrit nilai-nilai dilihat dari data sekolah inklusi. Keberhasilan sekolah inklusi menunjukkan adanya equity.</li> <li>• Kompetensi inti terkait dengan sikap tata nilai dan karakter. Dokumen sudah bagus, namun orang yang mengimplementasikan belum berkarakter.</li> <li>• Performance hanya mengukur luaran.</li> </ul>	<p>Aspek yang diperlukan 4 hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi</li> <li>• Isi</li> <li>• Proses</li> <li>• Evaluasi</li> </ul> <p>Kompetensi inti terkait dengan sikap tata nilai dan karakter. Dokumen sudah bagus, namun orang yang mengimplementasikan belum berkarakter.</p>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
konteks <i>teaching and learning</i> ?				
15. Dalam melihat pelaksanaan proses pendidikan di lapangan, apakah aspek-aspek yang terkait dengan proses (isi/proses/penilaian/pengelolaan) sebaiknya merupakan kewenangan dari pemerintah	✓ Terkait dengan proses merupakan kewenangan campuran antara pemerintah dan satuan pendidikan	Pemerintah tidak perlu ikut campur secara teknis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar nasional dipusat harus dibreakdown di daerah-daerah. Sehingga daerah memiliki tim untuk memanager pelaksanaan di daerah. Standar nasional pendidikan diturunkan di pemerintah daerah dan diimplementasikan sampai satuan pendidikan. Tidak hanya sekedar kebijakan, namun sampai ke perangkat/instrumen/assessment yang dipergunakan.</li> </ul>	Adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan.

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
untuk mengaturnya atau aspek-aspek tersebut dapat diberikan kewenangannya sebagai otoritas satuan pendidikan atau mungkin juga <b>kombinasi antara kewenangan pemerintah dan kewenangan satuan pendidikan?</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergi BSNP-melibatkan banyak unsur (pakar dan praktisi, kementerian, dan akademisi), mind set pemenuhannya. 8 standar tidak terpenuhi maka bukan salah BSNP-menjadi tanggungjawab bersama. LPTK/pemenuhan guru-pemerintah-kementerian pendidikan-satuan pendidikan.</li> </ul>	
16. Apakah kompetensi lulusan perlu diatur dalam sebuah Standar? <b>(Ya/Tidak)</b>	Ya	Perlu diatur Menyangkut masalah kemandirian, keberagaman, dan mampu menjalankan hasil proses pendidikan dalam kehidupan nyata.	Ya. Penekanan kompetensi komprehensif mencakup ranah sikap dan tata nilai, pengetahuan dan keterampilan.	Ya
17. Kompetensi lulusan seperti apakah yang diharapkan akan diatur dalam SNP masa depan dengan memerhatikan	Pengembangan literasi dan numerasi yang berbasis pada kompetensi di abad 21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi lulusan menjadi aspek pertama yang perlu diatur.</li> <li>• Kompetensi lulusan akan diperoleh jika isi dan proses dijalankan dengan baik</li> </ul>	lebih ke arah siswa suatu sikap yang adaptif (resilian) terhadap perubahan apapun. Kritis, kreatif, komunikatif, learning to do learning to live together. Untuk pendidikan dasar dan menengah perlu penekanan pada sikap dan tata nilai dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi lulusan menjadi aspek pertama yang perlu diatur.</li> <li>• Titik berat kepada literasi dan numerasi, sikap yang adaptif (resilian) terhadap perubahan apapun.</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
tantangan/kesempatan yang ada baik lokal/nasional/regional/global?			evaluasi yang tidak mengandalkan pada ujian tulis.	Kritis, kreatif, komunikatif, learning to do learning to live together.
18. Apakah diperlukan pengaturan kompetensi lulusan yang berlaku secara umum/nasional dan pengaturan kompetensi lulusan yang merefleksikan kebutuhan/keunggulan lokal?	Perlu, disesuaikan dengan daerah dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan agar bisa dicapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaiknya diberikan ruang di standar dalam rangka untuk menciptakan keunggulan lokal, menjadi value dalam kebhinekaan. Tidak semua sama.</li> <li>• Kompetensi lulusan memang ditetapkan dengan pendekatan yang memungkinkan dalam mengakomodasi keberagaman. Uniformitas yang berlebihan akan merugikan siswa dan kompetensi tidak semestinya diatur dengan pendekatan kekuasaan, mesti lebih melihat kebutuhan yang ada baik secara lokal/nasional.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Good School</b>-Sekolah bagus-sekolah standar-penyusunan SNP mengharapakan kualitas sekolah-sekolah kita bagus. Data akreditasi menunjukkan bahwa terdapat sekolah yang “tidak bagus”. Madrasah banyak yang belum terakreditasi. Masih jauh dari harapan. Kuantitas sekolah inklusi yang masih inheren dari SNP. Standar Digitalisasi sekolah- terlihat dari hasil-hasil riset kemdikbud, banyak sekolah yang belum tersambung dengan internet/sarpras pendukung literasi digital.</li> <li>2. <b>Lulusan yang bermutu</b>, dengan SNP-lahir lulusan-lulusan yang bermutu. Prestasi-prestasi internasional berdasarkan dukungan pribadi/mandiri, bukan satuan pendidikan. Dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu, namun diberikan ruang untuk mengeksplere keunggulan lokal yang menjadi value dalam kebhinekaan.</li> <li>b. Mewujudkan Good School dan Lulusan yang bermutu (non intrusif-tut wuri handayani, prinsip untuk mengembangkan potensi/kapasitas yang ada pada anak).</li> </ol>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
			konteks kekeluargaan-indonesia termasuk memiliki rasa empati yang tinggi. Namun penghargaan temuan/inovasi-komitmen pemerintah harus lebih besar. 3. Amanah negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sistem yang berlaku secara nasional adalah model yang dikembangkan adalah mengacu kepada ajaran KHD ( <b>non intrusif</b> -tut wuri handayani, prinsip untuk mengembangkan potensi/kapasitas yang ada pada anak).	
19. Dari sisi pengaturan sebuah standar, apakah diperlukan adanya <b>asesmen terhadap pemenuhan aspek softskills</b> yang dimiliki lulusan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ada standar yang menyangkut pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.</li> <li>• Bagaimana kita menghasilkan lulusan yang menghasilkan siswa yang diikuti dengan kompetensi belajar atau standar proses pembelajaran.</li> <li>• Proses pembelajaran yang benar akan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softskill sangat penting, terkait dengan kemandirian dan nilai-nilai.</li> <li>• Soft skill dirumuskan dalam porsi yang cukup</li> <li>• Soft skill yang sudah dirumuskan perlu ditambah karakter kebersahaan</li> <li>• Sebagian masyarakat atau orang tua belum memahami pentingnya softskill.</li> <li>• Perlu standar bagi orangtua</li> <li>• Basisnya adalah ke Indonesiaan dan pluralisme</li> </ul>	Output berupa angka-angka yang berupa pencapaian kuantitatif, bisa juga bersifat kualitatif. Standar penilaian yang ditetapkan oleh permendikbud seharusnya dibreakdown oleh daerah dan diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah instrumen. Outcome: output tidak semata-mata angka kuantitatif-maka akan mempermudah memperkirakan kualitas outcome.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softskill sangat penting, terkait dengan kemandirian dan nilai-nilai.</li> <li>• Soft skill dirumuskan dalam porsi yang cukup</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>membentuk proses penguatan kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019 mengembangkan <i>learning compased</i> yang bisa mencapai apa yang diinginkan seperti kemampuan memperbaharui sesuatu.</li> <li>• Perlu juga adanya Kompetensi transformatif yang mengarah pada kemampuan memperbaharui sesuatu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar dibuat untuk menciptakan keterampilan mental.</li> </ul>		
20. Apakah diperlukan adanya pengaturan terkait dengan aspek <i>outcome</i> dalam SNP masa depan?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya diperlukan. Tapi perlu dilihat yang mana saja dari 8 SNP yang ada sekarang yang perlu diatur outcomenya. <i>Outcome</i> yang ada juga merupakan campuran dari output 8 SNP yang ada.</li> <li>• Keterampilan dan berbagai ilmu yang diperoleh dari belajar di sekolah, setelah lulus harus benar-benar dapat diterapkan di masyarakat.</li> </ul>	Ada masukan bahwa indikasi outcome pendidikan antara lain: indeks kebahagiaan, indeks demokrasi, indeks korupsi, indeks toleransi, indeks donasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu diatur aspek outcome</li> <li>• Perlu dilihat dari 8 SNP yang ada sekarang, yang mana saja yang perlu diatur outcomenya.</li> <li>• Indikator yang ada perlu merefleksikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari belajar di sekolah dapat diterapkan di masyarakat.</li> </ul>



Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya indikator-indikator pelacakan outcome pendidikan antara lain: indeks kebahagiaan, indeks demokrasi, indeks korupsi, indeks toleransi, indeks donasi</li> </ul>
21. Jika <b>ya</b> , aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dan diatur sebagai bagian dari standar dalam sebuah SNP masa depan?	<p>Perlu ada standar isi yang dikembangkan, misalkan pengembangan literasi dan numerasi yang berbasis pada kompetensi di abad 21. Basic and digital literacy, subject mater based learning serta Applied literacy and Lifeskill program</p> <p>Standar yang dikembangkan perlu adaptif. Mampu memenuhi tuntutan dunia kerja (pemecahan masalah, pengelolaan diri, bekerja dengan orang banyak, penggunaan teknologi dan pengembangannya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek disiplin, keterampilan, kemandirian, logic mind (mindset)</li> <li>• Inovatif, kreatif, empati</li> <li>• Social literacy (melek sosial)</li> <li>• Muaranya adalah dunia kerja, maka pilihan-pilihan pelajaran dapat membentuk penalaran</li> <li>• Peran di dunia kerja dan masyarakat dijadikan salah satu referensi dalam mendefinisikan outcome</li> <li>• Agar outcome betul2 optimal, siswa dan mahasiswa tidak perlu belajar banyak mata pelajaran atau mata kuliah.</li> <li>• Perlu memerhatikan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat juga. Kalau kita menetapkan dan masyarakat sekitar tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outcome PT = kecilnya nilai generasi kita yang mau jd pengusaha/usaha sendiri. Kita belum berhasil dalam membentuk karakter lulusan/mengambil resiko.</li> <li>• Pengaturan dilakukan berbasis data/fakta hasil evaluasi pelaksanaan standar sebelumnya.</li> </ul>	<p><b>Ada beberapa masukan terkait aspek outcome yang perlu diatur dalam standar.</b></p>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>Perlu dikembangkan sikap Kreativitas, kepemimpinan dan pengaruh sosial, pemanfaatan teknologi, desain teknologi dan programing, pengelolaan stres dan fleksibilitas, pemikiran pemecahan masalah dan ide baru.</p> <p><b>Aspek Outcome:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga negara yg baik dan berkontribusi terhadap pembangunan dan demokrasi</li> <li>2. Melanjutkan ke jenjang pendidikan yg lebih tinggi dan belajar sepanjang hayat</li> <li>3. Kemampuan2 yg diperlukan saat bekerja yg harus dijadikan outcome, bukan ketrampilan kerja khusus jika bukan sebuah lembaga vokasi</li> </ol> <p><b>Aspek outcome yang perlu diperhatikan</b></p>	<p>mendukung, ya tidak akan memberikan hasil yang baik.</p>		

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p><b>dalam merespon dunia kerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Standar outcome-nya adalah menjadi warga negara yang baik, kemampuan akademik, kompetensi belajar, dan lebih diatur adalah kompetensi yang berupa soft skill, memiliki kemampuan belajar sesuatu yang baru, mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi.</li> <li>✓ Siswa harus mampu bergaul, disiplin, belajar sepanjang hayat baik vokasi maupun non vokasi.</li> <li>✓ Di tingkat pra sekolah dan dikdasmen: membangun karakter. Mampu mengintegrasikan individu dengan etika, estetika, dan kinestetika. Mampu membentuk manusia seutuhnya,</li> </ul>			

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	berbudaya, mandiri, kemampuan belajar yang rasional.			
22. Jika <b>tidak</b> , apakah ada aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dengan baik sehingga output dari proses pendidikan yang memberikan kompetensi kepada lulusan sudah dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan (masyarakat/pemerintah/dunia kerja)?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika standar isi dan proses dijalankan dengan baik, maka diperoleh outcomes yang baik.</li> <li>• Peran serta dari dunia kerja dan masyarakat pengguna dalam merumuskan standar atau dalam pelaksanaan standar.</li> </ul>		
1. [POSITIONING] Bagaimana kita menempatkan SNP masa depan dalam sistem pendidikan nasional kita?	SNP masa depan diposisikan sebagai acuan mutu dengan memperhatikan kondisi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNP masih diperlukan, namun harus memberi ruang untuk tumbuhnya keunggulan dan keunikan masing-masing daerah.</li> </ul>	SNP sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dalam pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.	Standar Pendidikan digunakan sebagai acuan mutu pendidikan, untuk mewujudkan keadilan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
Penting sebagai acuan MUTU? Penting sebagai pemersatu bangsa? Lainnya?	<p>RM → Sejauhmana kegiatan dan dampak benchmarking terhadap pengembangan standar dan mutu pendidikan</p> <p>BS: standar dikembangkan berdasarkan perkembangan mutakhir dan hasil benchmarking dari negara lain, dan melibatkan semua stakeholder (multidisipliner) – jangan hanya dirumuskan di level Pemerintah.</p> <p>✓ BS: Suatu keharusan melihat negara lain, tapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan negara kita. Dalam membuat standar harus didasarkan pada fakta yang ada dan harus melihat ke depan, jadi kita harus juga melihat apa yang dilakukan oleh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNP perlu untuk menjadi acuan mutu pendidikan</li> </ul>		

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>negara lain terkait standar, contohnya saja standar isi, kita dapat menganalisis standar isi pada suatu negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ace: bisa sepenuhnya mengadopsi, bisa dimodifikasi. 2 hal yang harus diperhitungkan: ada mata pelajaran yang dipertimbangkan secara nasional (seperti PKN, Pancasila, agama); ada juga yang standar universal seperti sains, dll.</li> <li>✓ ATM = adopsi, tiru, modifikasi.</li> <li>✓ Akreditasi harusnya menggigit</li> <li>✓ benchmarking harus dilakukan dalam rangka menempatkan posisi pendidikan di Indonesia di tingkat global. Aspek-aspek yang bersifat keindonesiaan</li> </ul>			



Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	menjadi standar nasional (juga menjadi rujukan bagi negara2 lain), sedangkan aspek-aspek yang bersifat universal, seperti sains, matematika, reading menjadi standar pendidikan untuk pencapaian kualitas lulusan yang berdaya saing secara global.			
2. <b>[ASPEK UTAMA]</b> Dengan melihat hal-hal yang ada dalam sistem pendidikan kita, aspek apakah yang paling penting harus muncul pengaturannya dalam SNP masa depan secara eksplisit sehingga semua pemangku kepentingan mau melaksanakannya	SKL dan keguruan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek penting yang perlu dimunculkan adalah aspek kemandirian, keberagaman dan pembelajaran kontekstual sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.</li> <li>• Menjadi manusia berbudaya dan beradab</li> <li>• Basisnya adalah softskill dan nilai-nilai</li> </ul>	<b>Hak anak memperoleh pendidikan yang terbaik.</b> Karena sangat dipengaruhi oleh benturan perspektif domestik. Bagaimana memperkecil/mempertemukan LOTS dan HOTS.	<p><b>a. Hak anak memperoleh pendidikan yang terbaik</b></p> <p><b>b. SKL dan Guru</b></p> <p><b>c. Softskills dan nilai-nilai dalam kehidupan</b></p>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
a sesuai dengan hak/tanggungjawabnya dalam menjaga MUTU PENDIDIKAN?				
3. [OTORITAS] Untuk SNP masa depan, siapa yang sebaiknya menetapkan SNP tersebut? Apakah pemerintah yang menetapkan seperti sekarang? Atau apakah pemerintah menetapkan hal-hal yang bersifat umum/nasional, lalu ada kewenangan daerah/satuan pendidikan untuk menetapkan hal-hal yang bersifat	<p>Badan spt BSNP yang seharusnya meng endors kewajiban-kewajiban daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Standar harusnya berlaku secara nasional, yang dibuat oleh badan independen</li> <li>✓ Bukan suatu kebijakan yang diberikan oleh seseorang, dan berlaku untuk semua diseluruh indonesia</li> <li>✓ Perlu membuat semacam standar pelayanan minimal yang dibuat sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah pusat</li> <li>• Pemerintah daerah</li> <li>• Satuan pendidikan</li> <li>• Perlu kolaborasi dengan masyarakat, dunia industri dan orang tua.</li> </ul>		Sinergi antara pemerintah (pusat/daerah), satuan pendidikan, kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan DUDI.

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
kekhasan/keunggulan lokal?	<p>kemampuan dan kondisi</p> <p>✓ Penyederhaan satndar diperlukan, yg meliputi: standar konten, standar penyampaian, dan standar kewenangan. Satndar konten berisi rumusan konsep umum ttg standar nasional dan standar universal. Standar penyampaian berisi rumusan konsep umum ttg penyampaian konten nasional dan universal yang membantu peningkatan kemampuan siswa terhadap konten. Selanjutnya, standar kewenangan berisi rumusan konsep umum pembagian ororitas</p>			

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	kewenangan antar struktur kelembagaan dalam rangka penyiapan guru yang berbasis kinerja dan output pembelajaran.			
4. <b>[PENGGUNA]</b> Dalam menyusun SNP masa depan, apakah pengaturan standar yang ada di dalam SNP tersebut akan diberlakukan untuk semua pemangku kepentingan (pemerintah/daerah/satuan pendidikan) atau apakah dapat diidentifikasi SNP tersebut akan diberlakukan untuk siapa saja?	Distrik lebih banyak pada pemeliharaan sarpras dan BOS Propinsi tanggungjawabnya pada gaji guru, teknologi, infrastruktur. Pusat mengatur perimbangan yang lemah di daerah. Standar fokus saja ke konten	Pengguna SNP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah pusat</li> <li>• Pemerintah daerah</li> <li>• Satuan pendidikan</li> <li>• Pengguna lulusan, baik dalam maupun luar negeri</li> </ul>		Pengguna SNP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah pusat</li> <li>• Pemerintah daerah</li> <li>• Satuan pendidikan</li> <li>• Pengguna lulusan, baik dalam maupun luar negeri</li> <li>• Peserta didik</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
5. <b>[EVALUASI]</b> Dalam konteks pelaksanaan SNP masa depan, siapa yang sebaiknya diberikan kewenangan mengevaluasi SNP tersebut dalam memonitor capaian MUTU yang diharapkan dalam sistem pendidikan kita? Pemerintah? Badan independen? Masyarakat?	Badan seperti ACARA ( <i>Australian curriculum asesmen and reporting authority</i> ) yang memiliki otoritas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutu perlu dijaga</li> <li>• Perlu diperjelas kewajiban masing-masing yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat.</li> <li>• Perlu lembaga independen</li> <li>• Evaluasi output oleh sekolah</li> <li>• Evaluasi masyarakat: terkait kepuasan berdasarkan hasil pendidikan di sekolah</li> <li>• Evaluasi terhadap hasil pendidikan: berbudaya dan beradab</li> </ul>		Evaluasi dilakukan oleh lembaga independen.
6. <b>[UKURAN MUTU]</b> Dalam menjamin MUTU pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, aspek apa saja yang perlu dan penting dievaluasi dalam pelaksanaan SNP masa depan?		Isi dan proses perlu ditekankan untuk menghasilkan lulusan dengan kemandirian dan keberagaman.	Evaluasi yang dilakukan adalah : kurikulum sebagai planning pembelajaran (menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik), Assessment (alat evaluasi-pentingnya asesmen di bidang lain diluar kognitif).	

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
7. <b>[UMPAN BALIK]</b> Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan SNP masa depan diposisikan sebagai salah satu indikator untuk menjamin MUTU pendidikan? Apakah sebagai indikator kinerja? Apakah sebagai umpan balik untuk peningkatan MUTU? Apakah sebagai rujukan bagi pemangku kepentingan untuk memenuhi aspek-aspek yang menjadi tanggungjawabnya dalam menjamin MUTU pendidikan? Lainnya?	Ace: Umpan balik merupakan hasil dari evaluasi penerapan, penilaian, dan pemetaan, harus selalu diusahakan untuk meng-update atau memperbarui standar itu sendiri. Bisa tiap 2 / 5 tahunan	Standar membuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keunggulan</li> <li>• Kemandirian</li> <li>• Keberagaman</li> </ul> Isi dan proses sangat menentukan outcomes: berbudaya dan beradab.  Aspek-aspek ini perlu menjadi perhatian dalam proses evaluasi dan umpan balik terhadap SNP	“Siapa melaksanakan apa harus melakukan apa”  Terdapat pembagian kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan standar/etik/target yang telah ditetapkan.	Umpan balik merupakan hasil dari evaluasi penerapan, penilaian, dan pemetaan, harus selalu diusahakan untuk meng-update atau memperbarui standar itu sendiri. Bisa tiap 2 / 5 tahunan



Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
1. Jika berangkat dari SNP yang sekarang, aspek apa yang paling mendasar untuk diubah dalam menyusun SNP masa depan sebagai acuan sistem pendidikan nasional kita yang bermutu?	<p>Dari 8 standar yang ada, standar SKL yang paling utama dan diikuti standar yang berkenaan dengan pendidikan, yaitu standar isi, proses dan penilaian yang menyangkut kinerja guru</p> <p>Jangan menggunakan istilah Masa Depan. Yg dipentingkan adalah utk selalu meng-update atau memperbarui nya. Mengevaluasi dan memetakan penerapannya di</p> <p>BSNP tidak perlu membuat standar, biarlah standar dibuat oleh satuan Pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isi dan proses</li> <li>• Values: outcomes</li> <li>• Focus pada kemandirian dan kebhinekaan</li> </ul>	<p>Peranan yang harus dilaksanakan: jangan melupakan kebijakan mengenai anak. Pengembangan kebijakan berdasarkan pemenuhan UU, dengan pemantauannya, dan secara terbuka mengkomunikasi-mengadvokasi, masyarakat memperoleh informasi yang lengkap mengenai kebijakan-kebijakan nasional apa yang dirumuskan dan dilaksanakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isi dan proses</li> <li>• Values: outcomes</li> <li>• Focus pada kemandirian dan kebhinekaan</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
2. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, aspek penting apa yang harus dimunculkan sebagai sebuah pengaturan standar dalam SNP masa depan? Apakah tetap melihat konteks input/proses/output-outcome? Apakah melihat konteks para pemangku kepentingan yang ada/terlibat?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar masih diperlukan</li> <li>• Bahasa dibuat simpel dan mudah dipahami</li> <li>• Mengatur hal yang pokok-pokok saja</li> <li>• Porsi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan Pendidikan, orang tua dan masyarakat.</li> </ul>	Terdapat guidelines yang tertuang untuk menjamin: <b>“Pemenuhan hak anak indonesia, memperoleh pendidikan terbaik dengan cara non intrusif dengan memperhatikan potensi intrinsik anak”</b>	Terdapat guidelines yang tertuang untuk menjamin: <b>“Pemenuhan hak anak indonesia, memperoleh pendidikan terbaik dengan cara non intrusif dengan memperhatikan potensi intrinsik anak”</b>
3. Aspek apa saja dalam SNP masa depan yang diharapkan lebih memberikan kejelasan tentang berbagai hal yang perlu diatur dalam sistem pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi</li> <li>• Input</li> <li>• Proses</li> <li>• Evaluasi</li> <li>• Menghasilkan lulusan dengan kemandirian dan keberagaman</li> </ul>	Mengaktualisasi potensi intrinsik yang ada pada anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi</li> <li>• Input</li> <li>• Proses</li> <li>• Evaluasi</li> <li>• Menghasilkan lulusan dengan kemandirian dan keberagama</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
nasional kita yang bermutu?				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengaktualisasi potensi intrinsik yang ada pada anak.</li> </ul>
4. Jika berangkat dari SNP yang sekarang, apakah perlu dijabarkan dengan jelas hal-hal yang menjadi hak dan tanggungjawab pihak-pihak terkait/pemangku kepentingan dalam aspek-aspek yang diatur sebagai bagian dari SNP masa depan?		Perlu dijabarkan porsi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan Pendidikan, orang tua dan masyarakat.	Sinergi BSNP-melibatkan banyak unsur (pakar dan praktisi, kementerian, dan akademisi), LPTK/pemenuhan guru-pemerintah-kementerian pendidikan-satuan pendidikan.	

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
<p>5. Bentuk SNP masa depan yang seperti apa yang dipandang akan lebih mudah dipahami semua pihak dan dapat dipakai sebagai acuan MUTU dalam pelaksanaan proses pendidikan? Berbentuk sebuah pengaturan standar yang lengkap dari paud, jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi, atau masing-masing jenjang memiliki pengaturan standar masing-masing? Atau lainnya?</p>	<p>Ace: Jangan re-inventing the wheel – khususnya rumusan2 standar universal (ATM). Kita sebaiknya fokus ke cara2/strategi pencapaiannya. Pemerintah konsentrasi ke daerah2 yg benar2 membutuhkan</p> <p>Konsentrasi standar ada di konten --: SKL, berlaku utk siswa, guru, dan sekolah</p> <p>BSNP →</p> <p>Standar penilaian → lebih ke proses/system yg perlu dibangun; yg harusnya diukur adalah system nya.</p> <p>Evaluasi → badan yg indepen</p> <p>Arie: identifikasi gap/kesenjangan &amp; implementasi untuk mendapatkan lessons-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar masih diperlukan</li> <li>• Bahasa dibuat simpel dan mudah dipahami</li> <li>• Mengatur hal yang pokok-pokok saja</li> </ul>	<p>a. SNP landasannya sudah UUD dan Pancasila, diperlukan untuk menjamin hak layanan pendidikan untuk WNI. Fungsinya untuk memberikan kepastian bahwa standar-standar ini bs diimplementasikan ke standar-standar berikutnya ke daerah, satuan pendidikan, sampai ke siswa. Tugas standar adalah memastikan bahwa Hak Rakyat memperoleh pendidikan bermutu diperoleh secara merata oleh seluruh rakyat indonesia.</p> <p>b. Memastikan bahwa kebijakan betul-betul dilaksanakan sampai daerah, pemenuhan hak seluruh rakyat di Indonesia dipenuhi. Sehingga mencapai keadilan oleh seluruh rakyat indonesia.</p> <p>c. Balance/equilibrium antara <b>Equity dan Quality</b>. Memaurnya daerah dan pusat, akan membawa budaya pada anak didik yang sudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Terdapat benturan antara perspektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa dibuat simpel dan mudah dipahami</li> <li>• Mengatur hal yang pokok-pokok saja</li> <li>• Jangan re-inventing the wheel – khususnya rumusan2 standar universal (ATM). Kita sebaiknya fokus ke cara2/strategi pencapaiannya.</li> <li>• Pemerintah konsentrasi ke daerah2 yg benar2 membutuhkan</li> <li>• Balance/equilibrium antara <b>Equity dan Quality</b>.</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>learned atau feedback utk update SNP Masa depan harus Terbuka, inklusif, adaptif. SNP Masadepan harus berparadigma pada teknologi, budaya inovasi dan daya saing.</p> <p>Menggigit → memiliki konsekuensi yang lebih besar dan lebih mengikat</p> <p>Standar nilai → - integritas, kejujuran bisa dimasukkan dalam standar2 yg lain E.g. BOS</p> <p>Learning Compass OECD <a href="https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_concept_note.pdf">https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_concept_note.pdf</a></p>		<p>domestik dengan budaya sekolah-maka akan sulit berbicara tentang target yang sama yang harus dicapai peserta didik .</p>	

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>Core foundation yang terdiri dari 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cognitif foundation</i>: kemampuan literasi dan numerasi yang bisa berkembang menjadi data literasi.</li> <li>2. <i>Health condition</i>: siswa bisa belajar efisien dan efektif harus sehat jasmani dan rohani, harus ada kesejahteraan.</li> <li>3. <i>Sosial and emotional foundation</i>: bagaimana iya bermasyarakat, moral ethic.</li> </ol> <p>Ketiga ini harus ada dalam standar.</p> <p>Standar Guru yang diharapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Guru → pengukuran yg lebih baik</li> <li>2. Kinerja mengajar</li> <li>3. Portofolio</li> </ol>			



Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>Yg perlu dipusatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKL (tidak semua muatan pembelajaran tidak dinasionalkan)</li> <li>• SK Guru</li> </ul> <p>Standar difokuskan utk siswa dan guru</p> <p>Ada Fokus Pembelajaran Penyederhaan satndar diperlukan, yg meliputi: standar konten, standar penyampaian, dan standar kewenangan. Satndar konten berisi rumusan konsep umum ttg standar nasional dan standar universal. Standar penyampaian berisi rumusan konsep umum ttg penyampaian konten nasional dan universal yang membantu peningkatan kemampuan siswa terhadap konten. Selanjutnya, standar kewenangan berisi rumusan konsep umum</p>			

Rumusan Pertanyaan	Rumusan Jawaban			Kesimpulan
	A	B	C	
	<p>pembagian ororitas kewenangan antar struktur kelembagaan dalam rangka penyiapan guru yang berbasis kinerja dan output pembelajaran.</p> <p>✓ Standar pendidikan harus menggigit namun disesuaikan dengan situasi dan konsisi sebuah daerah atau satuan pendidikan.</p>			

## 2. DKT 2 (Hasil)

<b>Rumusan Pertanyaan</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>
<p>a. Apakah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan itu disebabkan oleh rumusan SNP yang tidak mudah dipahami atau memang ada kendala dalam melaksanakan standar yang ada?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan SNP yang sekarang memang banyak permasalahan yang disebabkan kondisi daerah yang variatif, sehingga perlu ada perubahan, misal tentang sarana dan prasarana, tenaga pendidik perlu disesuaikan dengan kondisi daerah</li> <li>2. Rumusan standar belum jelas misalnya, Standar Pembiayaan yang belum jelas, unit cost tidak dihitung sehingga saat pilkada rawan dipolitisasi</li> <li>3. Rumusan Standar Pendidik belum selaras, masih bertabrakan dengan peraturan yang lain, misalnya topuksi pengawas sekolah.</li> </ol>	<p>Kelima responden menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar telah dibuat dengan baik, namun permasalahan muncul pada tahap implementasi.</li> <li>2. Bahasa SNP dirasa sulit dipahami dan memiliki indikator kerja terlalu banyak.</li> <li>3. SDM pelaksana standar kurang mumpuni.</li> <li>4. Support sarpras, keuangan, dalam usaha pemenuhan standar sangat kurang</li> <li>5. Tidak ada sinergi dalam pelaksanaan</li> <li>6. Bahasa dalam standar tidak mudah dipahami karena terlalu luas, terlalu generik, tidak sederhana, kurang substantif.</li> </ol>	<p>Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan SNP terlalu detail;</li> <li>2. Kemampuan daerah yang berbeda-beda;</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi/variasi kemampuan daerah yg tidak sama → wilayah &amp; pengelola</li> <li>• Standar hanya menjadi instrumen yang tingkat ketercapaiannya tidak jelas. Rumusan standar sulit dipahami. Standar menjadi beban. Hendaknya standar berkeadilan.</li> <li>• Benturan yuridis antara UU dg PP yang perlu dikaji kembali</li> <li>• SNP diperlukan tapi ada konsekuensi yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Harus mempertimbangkan variasi kemampuan daerah, lembaga dll.</li> <li>• Hendaknya ada kebijakan dimasing-masing wilayah untuk menurunkan standar di wilayah tertentu.</li> <li>• SNP hendaknya substansinya tetap di jaga, tapi</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
	<p>4. Masih tingginya politisasi pendidikan di daerah terutama ketika Pilkada.</p> <p>5. Evaluasi pelaksanaan standar tidak berjalan secara maksimal hasil tidak dipakai untuk tindak lanjut. Guru yang tidak berkualitas saat ini malah di "pengawaskan" sehingga evaluasi menjadi tidak berjalan baik.</p> <p>6. Tingkat pemahaman tentang standar tidak sama/bervariasi antara lembaga dan antar tingkat satuan pengelola pendidikan.</p>		<p>implementasinya fleksibel. Indikator2nya dibuat tidak terlalu kaku, tapi untuk menjadi inspirasi untuk pendidikan yang lebih baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar perlu memfasilitasi pola belajar yang merdeka</li> </ul>
<p>b. Apakah sebaiknya standar terkait dengan kompetensi guru dipisahkan dari SNP?</p>	<p>Kompetensi guru tidak perlu masuk pada SNP masa depan, empat standar saja yang menjadi bagian dari SNP masa depan: SKL, Isi</p>	<p><u>Standar guru jangan dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan</u> dari sebuah sistem standar pendidikan yang utuh. Guru menjadi penting sebagai ujung tombak pelaksanaan</p>	<p>Standar terkait dengan kompetensi guru tidak perlu dipisahkan dari SNP sehingga lebih efektif dan tidak terjadi pertentangan antara satu aturan dengan aturan lainnya</p>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
	pembelajaran, Proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran	standar. Guru harus dibekali dengan kemampuan mengajar yang general dan harus mengenal body knowledge pengetahuan yang diajarkan, serta diberi pelatihan berkelanjutan.	
c. Apakah SNP yang sekarang tidak mengatur mengenai hak-hak dari siswa?	Hak-hak siswa perlu diatur dalam standar dengan melihat kearifan lokal	Standar yang diperlukan adalah standar generik, yang mampu mengakomodir daerah-daerah khusus.	<p>Sesungguhnya hak-hak siswa sudah ada meski tidak eksplisit menyebut siswa. Misalnya dalam standar kompetensi lulusan dan standar proses. Yang belum dimuat dalam SNP adalah hak rasa aman dan nyaman untuk terus belajar dalam kondisi apapun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ada wajib belajar, maka Pemerintah juga harus menjamin hak2 siswa</li> <li>• Hak &amp; kewajiban secara proposional spy para ortu sadar atas keterlibatannya</li> <li>• Ada 3 potensi dasar (knowledge, skills, attitude) anak didik harus difasilitasi dengan baik utk pengembangan siswa</li> <li>• Pendidikan harus bisa memberikan layanan utk mengembangkan bakat dan minat siswa</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Pendidikan harus bisa membantu siswa utk keluar dari masalahnya</li> </ul>
<p>d. Pengaturan tata nilai apakah yang harus diatur dalam sebuah Standar Pendidikan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan tidak hanya membahas luaran namun juga outcome yang mempunyai sikap dan mengandung nilai-nilai kehidupan, sehingga diperlukan tata nilai dalam SNP</li> <li>Pertimbangan kualitatif, mempertimbangkan perbedaan yang ada.</li> </ol>	<p>Standar pendidikan lebih mengatur kepada Value: Quality culture, Critical thinking, Morality, Integrity.</p>	<p>Perlu dicantumkan tata nilai yang bersifat filosofis dan umum misalnya norma spiritual dan sosial dan profil pancasila di dunia global. Tata nilai yang dimaksud tidak diatur dalam standar namun memayungi standar pendidikan. Tata nilai yang dicantumkan yang bersifat inklusif berlaku untuk semua dimana di satuan pendidikan merupakan rumusan dari satuan pendidikan sendiri sesuai dengan keunikannya. Tata nilai tersebut sebaiknya diawali dengan tata nilai yang mengarah pada karakter lembaga baru karakter personal.</p> <p>Ada tata nilai yang bersifat umum &amp; inklusif yang dikembangkan oleh Pusat dan diberlakukan ke semua, dan ada tata nilai yg diturunkan dan dikembangkan menjadi ke-khas-an di setiap satuan Pendidikan.</p> <p>→ Seperti wawasan kebangsaan, moral virtues (moralitas), intellectual virtues (rasa ingin tau,</p>



Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
			<p>disiplin, tidak malas berpikir), &amp; spiritual virtues → Diturunkan dari Pancasila → Norma dan etos kinerja</p> <p>Ada 5-6 aspek tata nilai yg harus diikuti oleh Lembaga pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas</li> <li>2. Responsibility atau rasa tanggung jawab</li> <li>3. Sinergitas atau Kerjasama</li> <li>4. Dinamis → responsif terhadap perkembangan yg ada</li> <li>5. Kemandirian</li> <li>6. Keunggulan</li> </ol> <p>Penataan gradasi kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Norma (payung) → standar (jabaran dari sistem norma, sampai dengan prosedur?) → kriteria dan penjabarannya diserahkan ke daerah atau ke satuan2 pendidikan</li> <li>2. Pedoman harus dibuat juga</li> <li>3. Standar cukup di output</li> <li>4. Proses dan Input dilakukan di daerah</li> </ol>
e. Siapakah yang bertanggungjawab			Semua pihak bertanggung jawab;

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
			Perlu di susun road map secara nasional bahkan sampai road map di satuan pendidikan.
<p>a. Apakah pengaturan Standar Pendidikan masih perlu dikelompokkan dalam pengaturan <b>Input, Proses, Ouput dan Outcome?</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan SNP dengan menyatukan empat standar berikut: SKL, Isi pembelajaran, Proses pembelajaran, daan penilaian pembelajaran</li> <li>2. Rumusan standar yang abstrak agar memberikan keluasaan dalam implementasi teknis operasional.</li> </ol>	<p>Pendapat responden pakar yang berbeda mengenai hal ini, namun <b>kesemuanya setuju bahwa ada penggabungan standar (menjadi lebih sedikit):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar yang dibuat adalah standar ekosistem pendidikan (secara tidak langsung terkoneksi dengan pendidikan) dan standar pendidikan itu sendiri.</li> <li>2. Apa yang perlu diatur dalam 8 standar-namun bs dipisah 3 kategori: Kurikulum (SKL), Pelaksana (manusia), Pendukung/pengelolaan (manajemen, keuangan, sarpras).</li> <li>3. 8 standar terlalu banyak, 6 standar cukup. Standar pembiayaan masuk ke pengelolaan, penilaian masuk ke Standar kependidikan.</li> <li>4. Penggabungan standar, tidak perlu banyak namun sangat <i>critical</i>.</li> <li>5. 4 standar: SKL, Isi, proses, evaluasi, pendidik dan tindak, support</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang paling utama harus diatur atau distandarkan adalah output dan outcome. Input dan proses sebaiknya bersifat global saja, secara detail diserahkan pada satuan pendidikan.</li> <li>• Untuk standar proses, gaya belajar dirubah menjadi bagaimana anak melakukan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi dengan sumber belajar.</li> <li>• Kualitas kompetensi lulusan harus menyeluruh, baik ke sektor formal maupun informal.</li> <li>• Standar jangan dipecah-pecah, biarlah utuh, supaya mudah dipahami supaya dapat dilaksanakan dengan baik.</li> <li>• Terkait dengan input, jangan sampai diskriminasi dalam aspek ekonomi.</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
b. Apakah ada kelompok pengaturan yang tidak perlu diatur lagi dalam Standar Pendidikan?	sda	Sda, namun Idealnya, ketika kita menyusun standar-apakah kita akan menetapkan satu standar yang sama atau menetapkan kedaerahan-namun, empowering, facilitating, enabling rencana strategis secara nasional yang mampu pemeratakan kualitas pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar yg ada bisa tetap ada , namun hanya sebagai acuan</li> <li>• Input tidak perlu diatur (secara ketat) – tidak dibuat secara nasional, ada kewenangan utk pengembangan di level institusi pendidikan</li> <li>• Utk proses, cukup diberikan ttg filosofinya saja sehingga guru2 bisa diberikan kewenangan (agar guru tidak seperti robot)</li> <li>• By All and for all → top-down dan bottom-up</li> </ul>
c. Bagaimana pengaturan softskill dalam Standar Pendidikan, apakah harus selengkap2nya atau cukup memberikan koridor kemampuan yang diperlukan?	Diperlukan pengaturan softskill sesuai dengan kondisi daerah untuk menghasilkan outcome sesuai dengan kondisi daerah.	<p>Responden pakar tidak menjelaskan secara detail, namun dalam menghasilkan tahapan evaluatif terhadap outcome-diperlukan adanya sinergi antara lembaga pemerintah (kementerian pendidikan-perindustrian-panrb-dll) dalam menyusun SKL dan sinergi dalam pelaksanaan.</p> <p>Softskill menjadi salah satu hasil pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soft skills adalah hal yang sangat penting untuk keberhasilan peserta didik. Keberhasilan di masa depan dipengaruhi oleh bagaimana lembaga pendidikan memberikan kesempatan peserta didik dalam mengembangkan diri, sehingga perlu dibuat standar yang sifatnya umum dan lentur dan jangan terlalu detail. Sifatnya berlaku umum, tidak terlalu teknis.</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
d. Apakah kita memiliki indikator yang baik untuk mengukur pemenuhan softskill jika diatur dalam Standar Pendidikan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator pengaturan softskil melalui outcome sesuai dengan kondisi daerah indonesia yang sangat variatif</li> <li>2. Definisi softskills harus jelas</li> <li>3. Softskills, nilai kebangsaan, value religiusitas, citizenship yang harus menjadi standar pendidikan.</li> </ol>	<p>SNP saat ini tidak mampu mengukur sampai kepada ke transformally character. Disparitas indonesia sehingga mempengaruhi keragaman kualitas lulusan. Standar perlu disesuaikan kebutuhan dan keunggulan masing-masing daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberhasilan di masa depan dipengaruhi oleh bagaimana lembaga pendidikan memberikan kesempatan peserta didik dalam mengembangkan diri, sehingga perlu dibuat standar yang sifatnya umum dan lentur dan jangan terlalu detail. Sifatnya berlaku umum, tidak terlalu teknis.</li> <li>• Indikator perlu karena merupakan jabaran dari standar kompetensi lulusan</li> <li>•</li> </ul>
e. Apakah SNP masa depan masih diberlakukan sebagai produk pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku pendidikan atau dilihat sebagai produk yang dimiliki oleh seluruh pelaku pendidikan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada standar yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan ada yang menjadi kewajiban dari pemeritah daerah</li> <li>2. Pusat merumuskan dan mengawal standar yang bersifat softskills, nilai kebangsaan, value religiusitas, citizenship yang harus menjadi standar pendidikan.</li> </ol>	<p>SNP masa depan perlu dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia industri, dan lembaga pendidikan. Pemerintah Daerah mengukur outcome, dan sekolah mengukur output. Sesuai kebutuhan masing-masing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNP sebagai produk yang dimiliki pelaku pendidikan.</li> <li>• Kombinasi antara top down dan bottom up, keterwakilannya juga dapat merepresentasikan secara umum</li> <li>• SNP dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga penyusunannya harus melibatkan semua stake-holders, dan yang bertanggung jawab adalah Pemerintah</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
	<p>3. Pusat merumuskan standar non softskills implementasi bisa dibagi dalam kewenangan-kewenangan baik Nasional, Regional dan unit lainnya.</p>		
<p>f. Hal apa saja yang perlu <u>ditetapkan secara eksplisit</u> dalam standar pendidikan masa depan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hal utama yang hendaknya menjadi perhatian adalah proses pendidikan sebagai dasar menghasilkan output yang berkualitas dan outcome yang diharapkan</li> <li>2. Pilar proses dan pilar outcome penting dalam standar pendidikan. Pendidikan hakikatnya adalah suatu proses.</li> </ol>	<p>Pengaturan adanya <b>value</b> dalam standar. Pendidik dan Tenaga pendidik perlu dieksplisitkan. SKL perlu dieksplisitkan, dengan memperhatikan keunggulan yang ingin dibangun Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tren perubahan yang cepat dan disruptif sehingga bisa menjadi alasan dan landasan kerangka pikir yang kuat bahwa SNP harus <i>adaptable</i></li> <li>• SNP yang mampu beradaptasi, ada ruang modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman, yang responsif terhadap perkembangan zaman.</li> <li>• Standar adalah kriteria maksimal. Standar untuk menjamin hal yang pasti dan tidak pasti, sehingga yang terjadi jika ada hal yang tidak terduga maka bisa fleksibel dan mudah beradaptasi dengan kondisi.</li> <li>• Perumusan kriteria minimal harus mempertimbangkan perubahan teknologi yang begitu cepat. Sehingga harus betul-betul mempertimbangkan</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
			tren dunia pendidikan yang begitu cepat.
g. Bagaimana kita menempatkan Evaluasi Standar Pendidikan di masa depan? Apakah sebagai ukuran kinerja atau sebagai umpan balik untuk perbaikan atau untuk yang lain?	Diperlukan badan independen yang dapat mengurus masalah pelaksanaan pendidikan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan	Evaluasi SNP dilakukan sesuai standar yang diberlakukan. Kedepannya-SNP harus mampu mengelola/mendukung generasi alpha dan gen Z dan <i>life long learning</i> . <u>Evaluasinya perlu berjenjang.</u> Pemerintah pusat mengevaluasi Impaknya. Pemerintah daerah mengevaluasi Outcome dan Satuan Pendidikan mengevaluasi Output. Model evaluasi yang dikembangkan adalah evaluasi yang menjamin adanya sustainability.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesmen harus distandarkan agar memiliki tolok ukur yg sama. Jika suatu asesmen tidak valid dan reliabel, maka hasilnya tidak bisa digunakan untuk membuat kebijakan akademik atau kebijakan strategis.</li> <li>• Penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan utk mengevaluasi kebijakan atau proses, sementara penilaian yg dilakukan oleh satuan Pendidikan bisa ditujukan utk mengevaluasi hasil belajar.</li> <li>• Tidak bersifat ritualistik dan dijadikan alat untuk kompetisi/pemeringkatan siswa/sekolah, tapi lebih ke profiling akan pencapaian dan proses utk perbaikan dan peningkatan mutu sehingga hasil tidak perlu dipoles untuk kepentingan institusi/lembaga</li> <li>• Proses penilaian jangan menjadi momok bagi anak didik atau orangtua</li> <li>• Merupakan evaluasi atau umpan balik terhadap kebijakan</li> </ul>



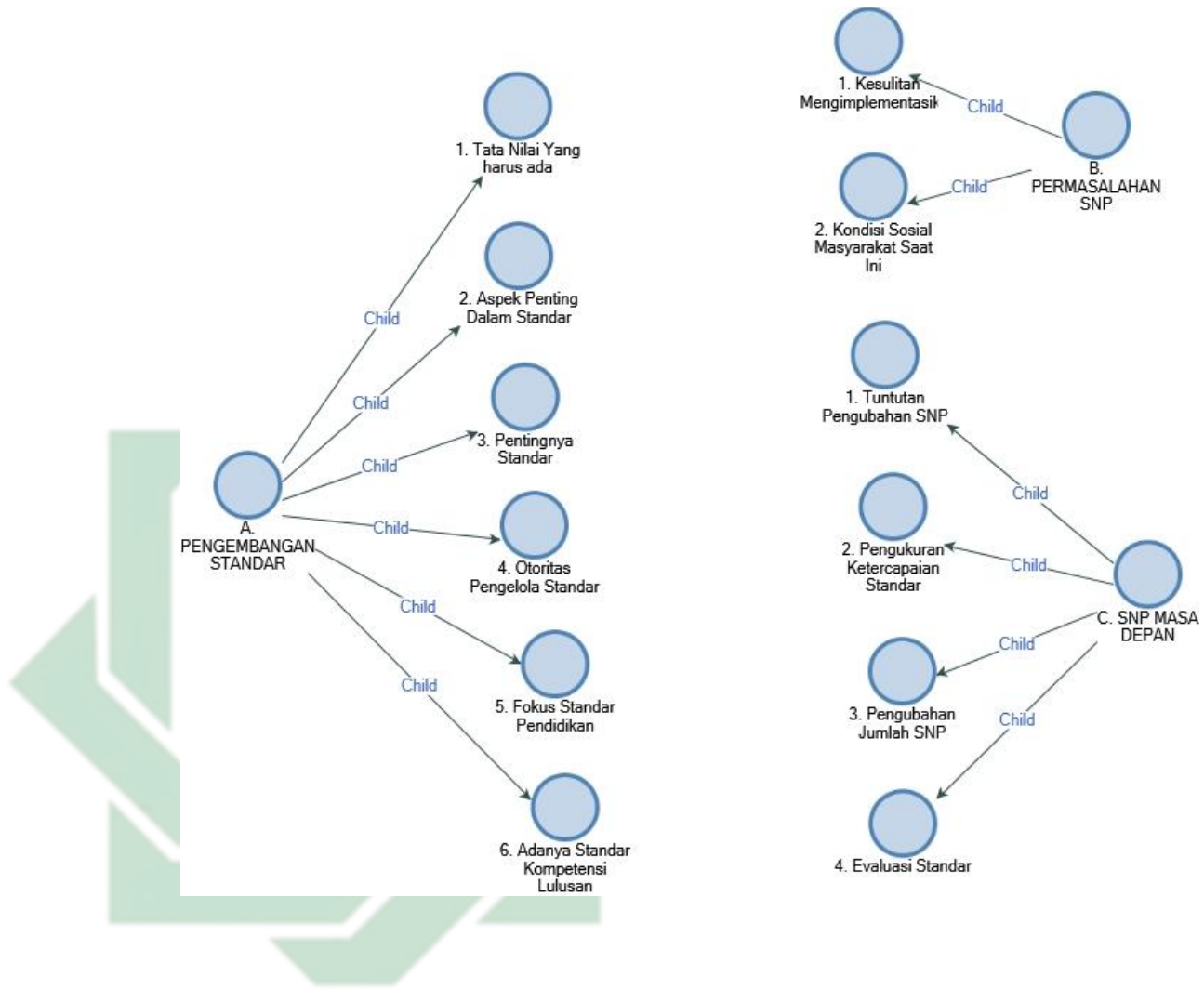
Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
			<p>pemerintah, lembaga pendidikan atas semua standar yg berlaku dan menjadi ukuran kinerja Lembaga tersebut, dan evaluasi terhadap peserta didik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi menjadi sia-sia jika tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tapi jika instrument evaluasi-nya tidak tepat, maka pemanfaatannya bisa bias.</li> </ul>
<p>h. Apakah evaluasi ini perlu dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tanggungjawabnya atau dilakukan oleh pihak lain yang ditetapkan tersendiri?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi tidak difokuskan sebagai ukuran performance yang akhirnya mengalami distorsi (misal evaluasi dalam bentuk UN), tetapi lebih ke arah untuk perbaikan berkelanjutan dan evaluasi kehadiran negara dalam pendidikan (khususnya di daerah tertinggal)</li> <li>• Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan sesuai pemangku kepentingan. Salah satu narasumber</li> </ul>	<p>Yang melakukan evaluasi siapa? Perlu ada lembaga yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi evaluatif (unsur satuan pendidikan, LPTK, dll), yang nantinya hasil evaluasinya betuk-betul bisa dipergunakan untuk memperbaiki sekolah,</p> <p>Evaluasi bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kompetensi.</p> <p>KONDISI RIIL DI PAPUA: Untuk level PT saja mahasiswa akan menulis, susah. Pendidikan penting, dengan daerah yang sulit. Small Schooling menjadi metode yang cocok. Lulusannya baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil evaluasi utk setiap peserta didik tiap satuan kependidikan bisa berbeda, namun ada standar atau bagian yg sama dan itu yg dipakai utk menentukan keberlanjutan pendidikan ke jenjang pendidikan yg lebih tinggi. Ada bagian lain yang mengukur kemampuan lain seperti softskill, tanpa mengganggu syarat kelulusan peserta didik</li> <li>• Masing2 institusi diberi wewenang utk membuat standar2 tersendiri, namun tetap memasukkan SNP yang sudah ada. Lalu, mereka juga bisa membuat standar pelampauan, yang melampaui SNP dan menurunkan indikator2 sendiri. Instrumen</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
	menyarankan dilakukan oleh	<p>ditransfer pada pendidikan sebelumnya. Evaluasi kualitas belajar. Evaluasi tidak hanya dikenai pada siswa. Namun juga dikenakan pada manajemen.</p> <p>Penilaian: merupakan tanggung jawab negara melakukan evaluasi SKL : pengguna yg melakukan evaluasi</p>	<p>pengukuran harus dibuat sesuai dengan indikator2 yg dibuat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan sekolah berbeda-beda dalam melakukan proses penilaian karena ada berbagai peraturan. Jadi, sosialisasi panduan/pedoman proses penilaian harus <i>down-to-earth</i>.</li> <li>• Pemerintah harus memberikan apresiasi kepada sekolah2 yang berhasil memberikan kinerja penilaian peserta didiknya yang melampaui standar, dan tidak meninggalkan sekolah2 yang belum mencapai standar – tidak membangun diskriminasi</li> <li>• Harus ada meta-evaluasi terhadap kebijakan2 yang diberlakukan</li> <li>• Untuk mengukur kinerja, jangan hanya mengandalkan ke satu instrumen saja – tapi dari berbagai instrumen</li> </ul>
a. Aspek apa yang paling penting untuk diatur dalam Standar Pendidikan untuk merefleksikan sistem pendidikan nasional yang bermutu?	SNP standar 1-4 (SKL, Isi pembelajaran, Proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran) diringkas jadi 1 dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Adanya standar yang mengatur (dukungan) kualitas guru sejak dari LPTK, baik secara biaya dan sarpras pendukung peningkatan kualitas Guru melalui berbagai pelatihan yang berkelanjutan. Strict pada prinsip2 Quality (vital view).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Big view SNP sbg Standar peradaban dalam kehidupan berbangsa</li> <li>• Standar hanya memuat aspek2 kunci saja, jangan diatur sampai detail karena biasanya semakin banyak yang masuk</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
		<p>Jangan terjebak dalam trivial many (keribetan). Apakah guru perlu di rolling dalam penugasan di sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu di semua sekolah.</p>	<p>dalam standar, makin sedikit ketercapaiannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus ada prosedur atau Pedoman untuk sosialisasi dan implementasi</li> <li>• SNP harus memberikan ruang utk peserta didik mengembangkan dirinya, sesuai dengan tuntutan jaman/masa depan</li> </ul>
<p>b. Apakah yang menjadi kesulitan utama dalam pelaksanaan SNP jika dikaitkan dengan bentuk SNP yang ada sekarang yang dipakai sebagai acuan mutu?</p>	<p>Kesulitan yang ada jika menggunakan SNP yang sekarang terlatak pada implementasi dilapangan yang sangat variatif kondisi daerah di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNP masa depan jangan sampai “moving too far” jumping too far. Strategic plan-dipikirkan sampai implementasinya. Intergrasi antar standar. Dewan sekolah dilibatkan.</li> <li>• Tahapan: yang paling mudah diubah, yang diprioritaskan,</li> <li>• BSNP: kompetensi, kewenangan, otoritas, BAN PT/SM: mengacu pada SNP.</li> <li>• Cost effective, cost effectiveness, dan cost consiusness.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlalu banyak lembaga atau unit yang menangani pendidikan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada level implementasi, transformasi gagasan, ide, rumusan, sampainya di hilir tidak sama.</li> <li>• Faktor egosektoral, seperti keterwakilan yang tidak tersampaikan di bawah sehingga ada gap informasi, kebijakan, dll.</li> </ul> </li> <li>• Ketidakberdayaan lembaga yang tidak mendapat support dari pemerintah.</li> <li>• Perlu ada konsistensi dan kesinkronan kebijakan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain.</li> </ul>

Rumusan Pertanyaan	X	Y	Z
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gap masih besar antar daerah di segi akses, informasi, dan SDM. Kurangi gap terlebih dahulu agar implementasi bisa dilaksanakan lebih baik</li> </ul>
<p>c. Apakah SNP masa depan perlu mempertimbangkan aspek 'equity' lebih baik dibandingkan dengan aspek 'equality'?</p>	<p>Aspek equity dan equity sangat diperlukan dalam penyusunan SNP masa depan, namun aspek equity lebih diutamakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Value tidak berubah: Integrity dan disiplin.</li> <li>• Value kebangsaan harus diukur.</li> <li>• Membangun persamaan Hak.</li> <li>• <u>Equity dan equality</u> merupakan hal yang tidak terpisahkan. Bagaimana unsur-unsur tersebut diterjemahkan dalam kebijakan kurikulum?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa memiliki latar belakang yg berbeda shg bisa mendapatkan perlakuan yg tidak sama rata</li> <li>• Persoalan keterbatasan sumberdaya yang sangat timpang</li> <li>• Keberpihakan pemerintah terhadap lembaga kecil sangat kurang</li> <li>• SNP MD harus memberikan stressing lebih k equity utk memberikan keberpihakan kepada mereka yang lebih membutuhkan utk mempercepat kemajuan Lembaga Pendidikan kita</li> <li>• Equity tanpa mengesampingkan equality → bagaimana menstandarisasi keberagaman?</li> <li>• Melalui equity, standar jadi bisa didistribusikan secara proposional sesuai dengan kebutuhan masing2 daerah/satuan pendidikan</li> </ul>

### 3. Output Nvivo



# **NASKAH KAJIAN KONSEP DAN BENTUK STANDAR PENDIDIKAN MASA DEPAN**

**Kajian ini memberikan gambaran pelaksanaan implementasi Standar Nasional Pendidikan secara nasional pada saat ini melalui Diskusi Kelompok Terpumpun.**

**Kajian Konsep dan Bentuk Standar Nasional Pendidikan Masa Depan memiliki keunikan, yaitu data diperoleh secara kualitatif melalui Diskusi Kelompok Terpumpun sebanyak 2 tahap. Integrasi data antara hasil diskusi dan analisis menggunakan software Nvivo menjadi penguat rumusan rekomendasi untuk pengembangan Standar Nasional Masa Depan**